



**KABUPATEN BEKASI**

**2024  
TRIWULAN IV**



# **LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BEKASI**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>2</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>3</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>4</b>
1.1. LATAR BELAKANG.....	4
1.2. DASAR HUKUM.....	5
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN .....	8
1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN .....	8
<b>BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BEKASI.....</b>	<b>10</b>
2.1. TUJUAN DAN SASARAN KABUPATEN BEKASI .....	10
2.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024.....	13
2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024.....	23
<b>BAB III CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024.....</b>	<b>28</b>
3.1 CAPAIAN KINERJA TUJUAN .....	28
3.2 CAPAIAN KINERJA SASARAN .....	29
3.3. CAPAIAN KINERJA TEMATIK.....	30
3.4 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN.....	167
3.5. DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN NASIONAL .....	173
<b>BAB IV FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA.....</b>	<b>291</b>
4.1 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA.....	291
4.2 TINDAK LANJUT BAGI PELAKSANAAN RKPD BERIKUTNYA.....	313
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>315</b>
5.1 KESIMPULAN.....	315
5.2 REKOMENDASI.....	315



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa Laporan Pelaksanaan Evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Bekasi Triwulan IV Tahun 2024 telah selesai disusun. Laporan ini merupakan pelaksanaan dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bupati Bekasi melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Kabupaten Bekasi, antarkabupaten/kota dalam wilayah Kabupaten Bekasi.

Pelaksanaan Evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2024 dilakukan secara berkala setiap triwulan. Penyusunan laporan tersebut diformulasikan berdasarkan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja PD Kabupaten Bekasi yang disampaikan kepada Bappeda secara berkala setiap triwulan juga. Laporan ini merupakan hasil pencermatan dari tim pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Bekasi Triwulan IV Tahun 2024 yang meliputi:

- 1) Penelaahan terhadap realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD Kabupaten Bekasi.
- 2) Penelaahan realisasi penyerapan anggaran program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD Kabupaten Bekasi.

Hasil evaluasi sebagaimana yang telah tersusun di dalam laporan ini akan dipergunakan sebagai masukan/acuan guna percepatan pelaksanaan RKPD Kabupaten Bekasi Triwulan IV Tahun 2024.

Akhir kata, kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan maka kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan laporan ini. Terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya laporan ini.

Cikarang, Desember 2024

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Kabupaten Bekasi,



**AGUS BUDIONO, S.STP, M.Tr.I.P.**

NIP. 198311172002121001



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana (Ginjar Kartasmita, 1994). Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Perencanaan pembangunan dalam lingkup waktu dibedakan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Sistem perencanaan pembangunan daerah yang baik mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- 1) Politik;
- 2) Teknokratik;
- 3) Partisipatif;
- 4) Atas-bawah (top-down); dan
- 5) Bawah-atas (bottom-up).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan bupati dan wakil bupati adalah proses penyusunan rencana karena rakyat menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh masing-masing calon bupati. Karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan bupati terpilih pada saat kampanye ke dalam RPJMD. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu (akademisi). Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, dimana rencana hasil proses atas bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan di tingkat desa/kelurahan, kabupaten, provinsi dan nasional.



Penyusunan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2024 berpedoman pada RKP Tahun 2024 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 5 ayat (3) juga disebutkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) dijelaskan bahwa RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun ke depan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan RKPD harus dilakukan setiap tahun agar dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi, kebijakan pemerintah dan kemampuan keuangan daerah pada tahun bersangkutan.

RKPD disusun melalui tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah dan musrenbang, perumusan rancangan akhir, fasilitasi gubernur, serta penetapan.

Evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mencakup sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan. Evaluasi hasil untuk memastikan dan mengetahui secara obyektif kesesuaian antara hasil capaian rencana pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dan kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan rencana pembangunan dimaksud. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD Kabupaten Bekasi, untuk mengetahui realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD, dan realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD. Evaluasi yang dimaksud, dilakukan unntuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bekasi dan mencapai sasaran pembangunan tahunan daerah Propinsi Jawa Barat.

## **1.2. DASAR HUKUM**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan evaluasi RKPD Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 antaran lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan



- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23); sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
  7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
  10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017



11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun



- 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2011
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 195 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024- 2026 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 195);
23. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 25);
24. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2024 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 53 Tahun 2018)

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Evaluasi RKPD Kabupaten Bekasi Triwulan IV Tahun 2024 dimaksudkan untuk menilai hasil pelaksanaan RKPD di lingkup wilayah Kabupaten Bekasi dan bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikatornya yang telah disusun dalam RKPD sesuai dengan pelaksanaan APBD.

### **1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN**

Evaluasi RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyajian Laporan



## BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BEKASI

- 2.1 Tujuan Dan Sasaran Kabupaten Bekasi
- 2.2 Prioritas Pembangunan Kabupaten Bekasi Tahun 2024
- 2.3 Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2024

## BAB III CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

- 3.1 Capaian Kinerja Indikator Makro
- 3.2 Capaian Kinerja Tematik
- 3.3 Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan
- 3.4 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (Tabel Evaluasi RKPD)

## BAB I FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

- 4.1 Faktor Pendorong Dan Penghambat Pencapaian Kinerja
- 4.2 Tindak Lanjut Bagi Pelaksanaan Triwulan/RKPD Berikutnya

## BAB V PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Rekomendasi



## **BAB II**

### **PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BEKASI**

#### **2.1. TUJUAN DAN SASARAN KABUPATEN BEKASI**

##### **2.1.1. TUJUAN KABUPATEN BEKASI**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 dijelaskan sasaran pembangunan daerah untuk RPJMD tahap ke lima (Tahun 2022-2025) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bekasi yang agamis dan unggul melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan menekankan pembangunan sektor ekonomi yang berdaya saing di seluruh wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, berakhlak dan berbudaya. Berdasarkan hal tersebut, sektor ekonomi menjadi fokus utama pembangunan daerah dengan berorientasi pada peningkatan daya saing daerah yang bersifat komparatif baik dalam skala regional maupun nasional. Memperhatikan keunggulan yang dimiliki Kabupaten Bekasi baik secara geografis, sosial maupun infrastruktur yang memadai untuk terus tumbuh dan berkembang secara perekonomian, sektor ekonomi didorong sebagai penopang utama pembangunan daerah dengan didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pertumbuhan perekonomian daerah kabupaten Bekasi juga dapat mendukung peningkatan pertumbuhan perekonomian Provinsi Jawa Barat dan nasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan hasil analisa isu-isu strategis serta evaluasi kinerja pembangunan daerah pada periode sebelumnya, sektor utama pembangunan yang terdampak dan memberikan pengaruh cukup luas yaitu perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan angka kemiskinan, maka Pemerintah Kabupaten Bekasi kemudian menetapkan 2 (dua) tujuan pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi, yaitu:

- 1) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan menurunnya kemiskinan
- 2) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Adapun indikator dan target kedua tujuan di atas untuk tahun 2024 dengan mempertimbangkan target nasional untuk Jawa Barat untuk tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.1 Indikator dan Target Tujuan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024**

No	TUJUAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2024
1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan menurunnya kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	Persen	4,66
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	4,7 – 5,3

### 2.1.2. SASARAN KABUPATEN BEKASI

Berdasarkan isu strategis dan tujuan yang telah ditetapkan di atas, kemudian ditetapkan 5 (lima) sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu penyebab sulitnya masyarakat miskin untuk keluar dari siklus kemiskinan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut telah menyebabkan masyarakat miskin tidak mampu bersaing dalam upaya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sehingga pada akhirnya masyarakat miskin tidak dapat keluar dari siklus kemiskinan. Oleh sebab itu, dalam rangka menurunkan kemiskinan dan mencegah timbulnya masyarakat miskin baru, maka intervensi utama yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan manusia.
2. Menurunnya pengangguran dengan peningkatan kesempatan kerja Besarnya angkatan kerja di Kabupaten Bekasi dimana tidak semua pencari kerja memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang memenuhi standar perusahaan sementara lapangan pekerjaan yang tersedia terbatas menyebabkan tingkat persaingan semakin tinggi. Dengan kemudahan akses transportasi dan komunikasi saat ini, tidak menutup kemungkinan bahwa ke depannya angkatan kerja di Kabupaten Bekasi tidak hanya bersaing dengan angkatan kerja dari daerah lain saja, melainkan juga akan bersaing dengan angkatan kerja yang berasal dari luar negeri, terutama pada sektor-sektor yang pekerjaannya dapat dilakukan dari rumah. Oleh karenanya, diperlukan adanya intervensi untuk mendorong pembukaan lapangan pekerjaan baru serta penyiapan angkatan kerja agar dapat berdaya saing dalam pencarian kerja.



3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dalam mendorong perekonomian daerah diperlukan mengingat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus menurun. Peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan swasta kepada pemerintah yang pada akhirnya dapat mendorong masuknya investasi serta pembukaan bisnis baru dan usaha di Kabupaten Bekasi.
4. Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas antarwilayah Faktor lainnya yang dapat diintervensi oleh pemerintah daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi adalah infrastruktur dan konektivitas wilayah. Pengeluaran pemerintah yang besar di infrastruktur pelayanan publik dapat meningkatkan nilai PDRB kabupaten. Sementara konektivitas antarwilayah yang baik akan memudahkan akses barang dan jasa, yang dapat menurunkan biaya transportasi serta menurunkan biaya operasional keseluruhan sehingga akan menarik investasi dan bisnis untuk masuk dan berkembang.
5. Terwujudnya kondusifitas wilayah dalam rangka stabilisasi ekonomi Kondisi lainnya yang diperlukan untuk mendorong perkembangan bisnis dan usaha adalah kondusifitas wilayah. Bencana atau kerusakan yang terjadi tiap hari tentunya akan menghalangi jalannya bisnis dan usaha masyarakat. Kebijakan pembatasan yang ketat selama 2 tahun terakhir telah membuktikan bagaimana banyak perusahaan dan bisnis yang gulung tikar akibat omset yang diterima perusahaan tidak dapat menutupi biaya operasional yang besar dengan menurunnya produktivitas serta permintaan konsumen. Oleh karenanya, kondusifitas wilayah sangat diperlukan untuk menciptakan stabilisasi ekonomi agar dapat mendorong perekonomian untuk tumbuh lebih cepat.
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Dalam menunjang perekonomian daerah, faktor penunjang lain yang tidak kalah penting adalah kualitas lingkungan hidup. Dengan semakin padatnya penduduk serta banyaknya aktivitas, kualitas lingkungan hidup semakin menurun. Apalagi orientasi yang cenderung kepada profit seringkali melupakan dampaknya terhadap lingkungan sehingga diperlukan adanya intervensi pemerintah agar kualitas lingkungan hidup tidak semakin merosot di masa yang akan datang. Degradasi kualitas lingkungan hidup pada akhirnya akan menyebabkan timbulnya bencana baru yang akan mempengaruhi



kondusifitas wilayah. Selain itu dengan kualitas lingkungan hidup yang baik, masyarakat dapat melakukan aktivitas ekonominya dengan nyaman yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan. Daya dukung lingkungan juga dibutuhkan untuk usaha dalam skala besar. Untuk itu, kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mendukung upaya mewujudkan kondusifitas wilayah.

Indikator dan target sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bekasi untuk tahun 2024 dapat dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel 2.2 Indikator dan Target Sasaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024**

No	TUJUAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2024
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	76,43
2	Menurunnya pengangguran dengan peningkatan kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,76
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	73,99
4	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas antarwilayah	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Persen	63,36
5	Terwujudnya kondusifitas wilayah dalam rangka stabilisasi ekonomi	Indeks Resiko Bencana	Poin	113,46
		Indeks Demokrasi	Poin	83,5
		Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Poin	85,75
6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	45,02

## 2.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan sasaran daerah, selaras dengan tema pembangunan Kabupaten Bekasi Tahun 2024, maka prioritas pembangunan dan arah kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

LAPORAN EVALUASI TERHADAP HASIL RKPd KABUPATEN BEKASI TRIWULAN IV TAHUN 2024



## **I. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**

- a. Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah pada jenjang pendidikan dasar
- b. Mendorong peningkatan Pendidikan masyarakat melalui Pendidikan non formal dan kesetaraan
- c. Meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi siswa pada jenjang pendidikan dasar
- d. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan pada jenjang pendidikan dasar negeri
- e. Meningkatkan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan
- f. Mendorong sekolah negeri pada jenjang pendidikan dasar untuk menerapkan kurikulum berbasis muatan lokal
- g. Meningkatkan kuantitas dan kualitas bangunan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan standar nasional pendidikan
- h. Mendorong peningkatan minat masyarakat untuk membaca melalui peningkatan kualitas perpustakaan
- i. Melestarikan koleksi nasional dan naskah kuno
- j. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan pada satuan kesehatan
- k. Meningkatkan pengawasan atas usaha kefarmasian, alat kesehatan, produk makanan, dan usaha pengelolaan makanan agar memenuhi standar kesehatan
- l. Mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk menerapkan gaya hidup bersih dan sehat
- m. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat miskin
- n. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan pada satuan kesehatan
- o. Mengoptimalkan peran desa, kecamatan, dan posyandu dalam mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan
- p. Meningkatkan kualitas layanan rumah sakit
- q. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan pada rumah sakit umum daerah
- r. Meningkatkan kuantitas dan kualitas bangunan pada satuan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan standar layanan fasilitas kesehatan
- s. Menyediakan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan atau perluasan fasilitas umum



- t. Mengoptimalkan pemanfaatan tanah kosong untuk memenuhi kebutuhan TPU
- u. Melakukan mediasi atas sengketa tanah milik pemerintah daerah
- v. Menyelesaikan masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
- w. Meningkatkan cakupan sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan bagi masyarakat
- x. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian layanan air minum perpipaan
- y. Menyelesaikan penanganan kawasan kumuh pada wilayah yang belum tertangani
- z. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan pada daerah yang berpotensi menjadi kumuh
- aa. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam olahraga
- bb. Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas ruang terbuka olahraga
- cc. Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas SDM keolahragaan
- dd. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana pertanian yang digunakan oleh petani untuk mendorong peningkatan produksi pertanian
- ee. Meningkatkan pengawasan terhadap usaha obat hewan
- ff. Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan teknologi pertanian yang digunakan oleh petani
- gg. Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
- hh. Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
- ii. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap usaha pertanian
- jj. Meningkatkan kualitas penyuluhan pertanian
- kk. Mendorong peningkatan produksi perikanan tangkap melalui bantuan sarana prasarana perikanan tangkap, pengembangan kapasitas nelayan, pengelolaan TPI, serta pengendalian dan pengawasan perizinan kapal perikanan
- ll. Mendorong peningkatan produksi perikanan budidaya melalui bantuan sarana prasarana perikanan budidaya, pengembangan kapasitas petani ikan, serta pengendalian dan pengawasan perizinan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan



- mm. Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas produk hasil olahan perikanan
- nn. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha untuk tertib ukur
- oo. Mendorong penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang ekspor
- pp. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan
- qq. Melakukan pengendalian, pemantauan, dan pengawasan terhadap harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting
- rr. Mendorong diversifikasi pangan dan meningkatkan ketersediaan cadangan pangan pokok daerah
- ss. Mendistribusikan cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan
- tt. Meningkatkan ketersediaan serta kualitas infrastruktur dan pendukung ketersediaan pangan daerah
- uu. Meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuh
- vv. Mengoptimalkan pengendalian penduduk melalui sinkronisasi kebijakan dan penguatan
- ww. Mengoptimalkan pengendalian penduduk melalui sinkronisasi kebijakan dan penguatan data kependudukan
- xx. Mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga
- yy. Mendorong peningkatan peserta KB aktif dan baru melalui optimalisasi pelayanan KB
- zz. Mendorong peningkatan kepatuhan dan ketertiban desa dalam pengelolaan keuangan desa
- aaa. Mendorong peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan administrasi keuangan desa
- bbb. Mendorong peningkatan kompetensi aparatur desa dalam administrasi pemerintahan serta pengelolaan keuangan dan aset desa
- ccc. Membantu desa dalam melakukan penataan desa
- ddd. Mendorong pembentukan kawasan perdesaan
- eee. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum ada
- fff. Mendorong pencapaian target indikator PUG
- ggg. Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap perempuan



- hhh. Mendorong peningkatan kualitas ketahanan keluarga
- iii. Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan data
- jjj. Meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak
- kkk. Meningkatkan kualitas perlindungan khusus anak
- lll. Meningkatkan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial, keluarga pahlawan, dan janda PKRI melalui pemberdayaan sosial dan pemberian santunan
- mmm. Meningkatkan cakupan bantuan dan kualitas layanan sosial bagi warga negara migran korban kekerasan
- nnn. Meningkatkan kualitas dan cakupan rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial
- ooo. Meningkatkan kualitas dan cakupan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin
- ppp. Meningkatkan kualitas pengelolaan data fakir miskin
- qqq. Mendorong peningkatan nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial di masyarakat melalui pembinaan
- rrr. Meningkatkan cakupan bantuan bagi korban bencana
- sss. Mendorong peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi dan kegiatan kewirausahaan
- ttt. Mendorong peningkatan pemuda berprestasi
- uuu. Mendorong peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan kepramukaan
- vvv. Mengembangkan budaya daerah dan kesenian tradisional
- www. Meningkatkan kompetensi SDM sejarah lokal
- xxx. Melestarikan cagar budaya daerah
- yyy. Meningkatkan kunjungan masyarakat ke museum untuk meningkatkan wawasan masyarakat terhadap sejarah daerah

## **II. Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja**

- a. Meningkatkan kualitas lembaga dan SDM pariwisata
- b. Meningkatkan kinerja promosi pariwisata untuk menarik wisatawan
- c. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan kekayaan intelektual
- d. Meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata
- e. Mendorong pembentukan dan pengembangan koperasi simpan pinjam
- f. Mendorong pertumbuhan koperasi sehat melalui penilaian kesehatan, pengawasan, dan pemeriksaan koperasi



- g. Meningkatkan kompetensi SDM koperasi melalui pendidikan dan pelatihan perkoperasian
- h. Mendorong pertumbuhan volume usaha koperasi melalui pemberdayaan dan perlindungan koperasi
- i. Mendorong pengembangan UMKM melalui peningkatan kualitas kelembagaan dan daya saing UMKM
- j. Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif melalui kebijakan yang jelas dan terarah
- k. Meningkatkan kinerja promosi penanaman modal untuk mendorong masuknya investasi
- l. Melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
- m. Meningkatkan kualitas pengelolaan sistem informasi, perencanaan, pembangunan dan pengembangan industri yang menjadi kewenangan kabupaten
- n. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian
- o. Mendorong peningkatan ekspor produk UMKM lokal
- p. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap perizinan dan pendaftaran perusahaan perdagangan
- q. Meningkatkan layanan administrasi penunjang ekspor
- r. Membantu penempatan pencari kerja terdaftar
- s. Meningkatkan kinerja pengelolaan dan penyampaian informasi kesempatan kerja kepada masyarakat
- t. Meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja dan membantu mewujudkan iklim kerja yang kondusif bagi perusahaan dan tenaga kerja
- u. Meningkatkan kompetensi pencari kerja agar dapat memenuhi standar perusahaan melalui pelatihan
- v. Meningkatkan kerjasama di bidang transmigrasi

### **III. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

- a. Meningkatkan kualitas integrasi dan sinkronisasi antara program nasional, provinsi, daerah, dan perangkat daerah
- b. Meningkatkan kinerja pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah
- c. Meningkatkan kualitas laporan penyelenggaraan pemerintah daerah



- d. Mendorong tindak lanjut rekomendasi perbaikan program dan kegiatan
- e. Mendorong penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai ketentuan
- f. Mendorong peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan
- h. Meningkatkan kapabilitas APIP
- i. Mendorong penerapan SPIP sampai ke tingkat perangkat daerah
- j. Meningkatkan kualitas perencanaan kebutuhan dan mendorong pengadaan ASN yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel
- k. Meningkatkan kinerja pengelolaan data dan sistem informasi ASN
- l. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja serta reward and punishment bagi ASN
- m. Mendorong pejabat struktural, fungsional dan PNS untuk mengikuti pengembangan kompetensi
- n. Meningkatkan kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
- o. Mendorong peningkatan kerjasama dalam penyelesaian permasalahan pembangunan
- p. Meningkatkan kualitas kebijakan bidang ekonomi
- q. Meningkatkan kualitas deregulasi kebijakan
- r. Meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa
- s. Meningkatkan kualitas layanan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekretaris daerah
- t. Meningkatkan kualitas penguatan organisasi, pelayanan publik, ketatalaksanaan, dan manajemen perubahan pada perangkat daerah
- u. Mendorong pelaksanaan dan pengembangan rencana inovasi yang telah disusun
- v. Mendorong tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi kebijakan
- w. Meningkatkan aksesibilitas teknologi informasi dan komunikasi pada instansi pemerintah daerah
- x. Meningkatkan kinerja layanan media informasi dan komunikasi publik
- y. Meningkatkan kinerja pengelolaan, pengolahan, dan analisa data statistik sektoral



- z. Meningkatkan keamanan informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah sampai ke tingkat perangkat daerah
- aa. Meningkatkan kualitas layanan perizinan dan non perizinan bagi pelaku usaha
- bb. Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
- cc. Mendorong peningkatan tertib arsip pada perangkat daerah
- dd. Menindaklanjuti permohonan perizinan dan non perizinan yang diajukan oleh masyarakat
- ee. Meningkatkan tertib administrasi pada pemerintah desa dan kelurahan
- ff. Meningkatkan kualitas dan cakupan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
- gg. Mencegah timbulnya konflik sosial ekonomi melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan peningkatan partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum
- hh. Meningkatkan kualitas penyusunan penganggaran belanja daerah
- ii. Mendorong optimalisasi penyerapan anggaran belanja daerah
- jj. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan laporan barang milik daerah
- kk. Menyusun rencana optimalisasi potensi pendapatan asli daerah
- ll. Meningkatkan kinerja penagihan pajak daerah
- mm. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi wajib pajak daerah
- nn. Mendorong sertifikasi laik fungsi bagi gedung milik pemerintah
- oo. pemerintah Program Penataan Bangunan Gedung Persentase SLF yang diterbitkan 32% 4.900.000.000 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Meningkatkan layanan persetujuan bangunan gedung
- pp. Melakukan pembinaan terhadap perusahaan jasa konstruksi
- qq. Meningkatkan kondisi bangunan negara lainnya melalui penataan bangunan dan lingkungan.

#### **IV. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah**

- a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan kabupaten
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan desa
- c. Membangun dan meningkatkan kualitas drainase pada jalan desa untuk mencegah terjadinya genangan yang dapat merusak jalan melalui rekayasa lalu lintas dan penyediaan perlengkapan jalan



- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan perumahan
- e. Membangun dan meningkatkan kualitas drainase pada jalan perumahan untuk mencegah terjadinya genangan yang dapat merusak jalan
- f. Meningkatkan pemenuhan perlengkapan jalan penghubung antarpermukiman dan jalan perumahan serta fasilitas penunjang lainnya
- g. Menyediakan kebutuhan lahan untuk meningkatkan kapasitas jalan
- h. Meningkatkan kinerja layanan pengujian berkala kendaraan bermotor
- i. Meningkatkan ketersediaan pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan
- j. Menurunkan derajat kejenuhan jalan

#### **V. Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilitas Ekonomi**

- a. Meningkatkan kualitas pencegahan, kesiapsiagaan, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana
- b. Meningkatkan kualitas kinerja petugas dalam pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan korban bencana
- c. Meningkatkan pemenuhan ketersediaan sarana prasarana pencegahan, pengendalian, penanggulangan dan penyelamatan bencana kebakaran
- d. Meningkatkan kinerja penanganan banjir dan kekeringan
- e. Membangun dan mengembangkan sistem drainase yang terhubung dengan sungai
- f. Meningkatkan cakupan penanganan rumah korban bencana atau yang terkena relokasi program pemerintah daerah
- g. Meningkatkan peran partai politik dan lembaga pendidikan dalam pencegahan konflik melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
- h. Mengoptimalkan peran DPRD melalui dukungan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- i. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan daerah
- j. Meningkatkan kinerja pengamanan lingkungan
- k. Meningkatkan peran organisasi masyarakat dalam pencegahan konflik melalui pemberdayaan dan pengawasan



- l. Melakukan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya bagi tokoh agama dan/atau penghayat kepercayaan
- m. Meningkatkan kerjasama antarinstansi di daerah untuk mencegah terjadinya konflik agama dan sosial
- n. Meningkatkan pemahaman mengenai ideologi pancasila dan karakter kebangsaan

## **VI. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan**

- a. Meningkatkan cakupan layanan pengelolaan persampahan
- b. Meningkatkan kinerja pengelolaan limbah non B3 sesuai dengan standar ketentuan teknis
- c. Menyusun perencanaan pengelolaan lingkungan hidup
- d. Melakukan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- e. Meningkatkan dan menjaga luasan ruang terbuka hijau untuk mengurangi pencemaran udara dan melestarikan habitat keanekaragaman hayati
- f. Meningkatkan kinerja pengendalian pengelolaan limbah B3
- g. Mendorong peningkatan ketaatan pelaku usaha/kegiatan melalui pembinaan dan pengawasan atas izin lingkungan dan izin PPLH
- h. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan, pengendalian, dan pengelolaan persampahan secara mandiri melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pemberian penghargaan bagi masyarakat
- i. Menindaklanjuti pengaduan kasus lingkungan
- j. Meningkatkan kinerja layanan air limbah domestik kepada masyarakat
- k. Membantu penyediaan infrastruktur sanitasi bagi masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk buang air besar sembarangan
- l. Meningkatkan kualitas rencana umum dan rinci tata ruang sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan
- m. Meningkatkan kinerja pengendalian pemanfaatan, dan kepatuhan terhadap rencana tata ruang wilayah



### **2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024**

Program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi pada tahun 2024 adalah sebanyak 140 program, yang terdiri dari 1 program non urusan/unsur dan 139 program urusan/unsur. Jumlah program ini tidak memperhatikan perangkat daerah pelaksana sehingga program yang sama dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah akan dihitung sebanyak 1 (satu) kali. Program-program tersebut antara lain:

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. Program Pengembangan Kurikulum
4. Program Pembinaan Perpustakaan
5. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
8. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
9. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
10. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
12. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
13. Program Penatagunaan Tanah
14. Program Pengelolaan Tanah Kosong
15. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
16. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
17. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
18. Program Kawasan Permukiman
19. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
20. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
21. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
22. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
23. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
24. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
25. Program Perizinan Usaha Pertanian
26. Program Penyuluhan Pertanian



27. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
28. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
29. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
30. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
31. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
32. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
33. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
34. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
35. Program Penanganan Kerawanan Pangan
36. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
37. Program Pengawasan Keamanan Pangan
38. Program Pengendalian Penduduk
39. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
40. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
41. Program Administrasi Pemerintahan Desa
42. Program Penataan Desa
43. Program Peningkatan Kerja Sama Desa
44. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
45. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
46. Program Perlindungan Perempuan
47. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
48. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
49. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
50. Program Perlindungan Khusus Anak
51. Program Pemberdayaan Sosial
52. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
53. Program Rehabilitasi Sosial
54. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
55. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
56. Program Penanganan Bencana
57. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
58. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
59. Program Pengembangan Kebudayaan
60. Program Pengembangan Kesenian Tradisional



61. Program Pembinaan Sejarah
62. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
63. Program Pengelolaan Permuseuman
64. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
65. Program Pemasaran Pariwisata
66. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
67. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
68. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
69. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
70. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
71. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
72. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
73. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
74. Program Pengembangan UMKM
75. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
76. Program Promosi Penanaman Modal
77. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
78. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
79. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
80. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
81. Program Pengembangan Ekspor
82. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
83. Program Penempatan Tenaga Kerja
84. Program Hubungan Industrial
85. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
86. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
87. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
88. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
89. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
90. Program Perekonomian dan Pembangunan
91. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
92. Program Pendaftaran Penduduk
93. Program Pencatatan Sipil
94. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan



95. Program Penyelenggaraan Pengawasan
96. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
97. Program Kepegawaian Daerah
98. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
99. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
100. Program Perekonomian dan Pembangunan
101. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
102. Program Perekonomian dan Pembangunan
103. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
104. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
105. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
106. Program Penyelenggaraan Statistik sektoral
107. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
108. program pelayanan penanaman modal
109. program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
110. program pengelolaan arsip
111. program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
112. program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
113. program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
114. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
115. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
116. program pengelolaan keuangan daerah
117. Program pengelolaan Barang Milik daerah
118. Program pengelolaan pendapatan daerah
119. program penataan bangunan gedung
120. program pengembangan jasa konstruksi
121. program penataan bangunan dan lingkungannya
122. program penyelenggaraan jalan
123. program pengembangan permukiman
124. program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
125. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
126. program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
127. Program penanggulangan bencana
128. program pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran



129. program pengelolaan sumber daya air (SDA)
130. program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
131. program pengembangan perumahan
132. program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
133. program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
134. program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
135. program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
136. program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
137. program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial
138. program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
139. program pengelolaan persampahan
140. program perencanaan lingkungan hidup
141. program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
142. program pengelolaan keaneka ragaman hayati
143. program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)
144. program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
145. program peningkatan pendidikan dan pelatihan dan penyluhuna lingkungan hidup untuk masyarakat
146. program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
147. program penanganan pengaduan lingkungan hidup
148. program pengelolaan dan pengembangan sistem sistem air limbah
149. program penyelenggaraan penataan ruang

Sementara itu, kegiatan yang direncanakan pada 60 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah sebanyak 913 kegiatan dengan kegiatan yang termasuk ke dalam program urusan/unsur sebanyak 483 kegiatan, dan 430 kegiatan lainnya termasuk ke dalam program non urusan/non unsur. Sedangkan subkegiatan yang direncanakan adalah sebanyak 2.663 subkegiatan dengan jumlah subkegiatan urusan/unsur sebanyak 1.356 subkegiatan, dan non urusan/non unsur sebanyak 1.307 subkegiatan. Jumlah kegiatan dan subkegiatan ini tidak memperhitungkan double kegiatan atau subkegiatan yang dilaksanakan oleh 1 perangkat daerah yang sama karena keberadaan subunit organisasi sehingga judul kegiatan/subkegiatan yang double akan dihitung 1 (satu) kali. Jumlah program, kegiatan, maupun subkegiatan di atas dapat mengalami pengurangan, menyesuaikan

LAPORAN EVALUASI TERHADAP HASIL RKPd KABUPATEN BEKASI TRIWULAN IV TAHUN 2024



dengan perkiraan kemampuan keuangan daerah pada tahun 2024 dan penyempurnaan lainnya di tahap penganggaran.

### BAB III

## CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

### 3.1 CAPAIAN KINERJA TUJUAN

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Dengan memperhatikan hasil analisa isu-isu strategis serta evaluasi kinerja pembangunan daerah pada periode sebelumnya, sektor utama pembangunan yang terdampak dan memberikan pengaruh cukup luas yaitu perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan angka kemiskinan, maka Pemerintah Kabupaten Bekasi kemudian menetapkan 2 (dua) tujuan pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi, yaitu:

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan menurunnya kemiskinan
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah

Tujuan tersebut dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur dan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan. Tujuan beserta capaian kinerja tujuan Kabupaten Bekasi tersebut dijabarkan ke dalam Tabel 3.1. sebagai berikut:

**Tabel 3.1. Tingkat Capaian Kinerja Tujuan Kabupaten Bekasi Tahun 2024**

No	TUJUAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
				2024	2024
1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan menurunnya kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	Persen	4,66	4,8
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	4,7 – 5,3	5,34

Hasil capaian kinerja tujuan pembangunan daerah “Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan menurunnya kemiskinan” sampai dengan Triwulan 4 Tahun Anggaran 2024 sebesar 4,80% telah mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menekan angka penduduk miskin di Kabupaten Bekasi. Sejalan dengan keberhasilan tersebut, hasil capaian kinerja tujuan pembangunan daerah “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah” sampai dengan Triwulan 4 Tahun Anggaran 2024 sebesar 5,34% telah mencapai target yang telah ditetapkan.



### 3.2 CAPAIAN KINERJA SASARAN

Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga tiga tahun ke depan. Sasaran RPD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi, juga dapat diterjemahkan ke dalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan tahunan. Berdasarkan tujuan di atas, ditetapkan 5 (lima) sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
2. Menurunnya pengangguran dengan peningkatan kesempatan kerja
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
4. Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas antarwilayah
5. Terwujudnya kondusivitas wilayah dalam rangka stabilisasi ekonomi

Indikator dan target sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bekasi untuk Tahun 2024 dan capaiannya dapat dilihat melalui Tabel 3.2. sebagai berikut:

**Tabel 3.2. Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Kabupaten Bekasi Tahun 2024**

No	TUJUAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
				2024	2024
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	76,43	76,8
2	Menurunnya pengangguran dengan peningkatan kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,76	8,82
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	73,99	75,41
4	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas antarwilayah	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Persen	63,36	65,846
5	Terwujudnya kondusivitas wilayah dalam rangka stabilisasi ekonomi	Indeks Resiko Bencana	Poin	113,46	106,39
		Indeks Demokrasi	Poin	83,5	83,52
		Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Poin	85,75	85,916



No	TUJUAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
				2024	2024
6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	45,02	49,36

### 3.3. CAPAIAN KINERJA TEMATIK

Sebagaimana arah kebijakan RB Nasional 2020–2024, adalah untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital dan mempercepat dampak pelaksanaan RB, maka terdapat dua strategi utama untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut. Pertama, untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital maka ditetapkan kebijakan percepatan dalam RB General; kedua, untuk mempercepat dampak pelaksanaan RB maka ditetapkan isu prioritas nasional dalam RB Tematik.

Terdapat empat fokus RB Tematik yang ditetapkan saat ini, antara lain:

1. Pengentasan Kemiskinan. RB Tematik pengentasan kemiskinan ditujukan agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada dan telah menggunakan sumber daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap penurunan angka kemiskinan;
2. Peningkatan Investasi. RB Tematik peningkatan investasi ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan omnibus law dan meningkatkan indeks daya saing (*competitiveness index*);
3. Akselerasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Secara umum, pelaksanaan RB Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan ditujukan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital. Dukungan RB Tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus akan diarahkan pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional, misalnya penanganan stunting; dan
4. Percepatan Prioritas Aktual Presiden. Perbaikan dan penguatan tata kelola yang dilakukan melalui pelaksanaan RB dilakukan untuk merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan Presiden. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian Inflasi.

Fokus RB tematik tersebut didukung pelaksanaannya melalui sejumlah program dan kegiatan yang tercantum di dalam RKPd. Evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan tersebut dilakukan dengan mengukur kinerja pencapaian target berdasarkan rentang selisih nilai antara realisasi capaian pada tahun berjalan terhadap target



capaian yang ditetapkan dalam RPD untuk tahun berjalan (2024) dan tahun terakhir periode RPD.

Pencapaian kinerja tematik tersebut sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut sebagai berikut:

#### 1. Pengentasan Kemiskinan

Kinerja tematik pertama yaitu Pengentasan Kemiskinan yang diampu oleh beberapa Perangkat Daerah dengan kelompok program, antara lain:

1. Bantuan sosial terpadu berbasis keluarga
  - a. Dinas Sosial
  - b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak
  - c. Dinas kesehatan
  - d. Dinas Pendidikan
  - e. Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana
2. Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
  - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - b. Dinas Pertanian
  - c. Dinas Ketenagakerjaan
  - d. Dinas Pariwisata
  - e. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
  - f. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
  - g. Dinas Perumahan Ralyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
  - h. Dinas Sumber Daya Air, Binamarga dan Bina Kontruksi
3. Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
  - a. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
  - b. Dinas Perindustrian
  - c. Dinas Perdagangan

Terkait capaian kinerja tematik Pengentasan Kemiskinan dijabarkan ke dalam Tabel 3.2.

#### 2. Penanganan Stunting

Kinerja tematik selanjutnya yaitu Penanganan Stunting yang diampu oleh beberapa Perangkat Daerah, diantaranya yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Lingkungan Hidup. Terkait capaian kinerja tematik Penanganan Stunting dijabarkan ke dalam Tabel 3.3.



### 3. Standar Pelayanan Minimal

Kinerja tematik terakhir yaitu terkait Standar Pelayanan Minimal yaitu urusan wajib pelayanan dasar antara lain urusan pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan pekerjaan Umum, urusan Perumahan Rakyat, urusan trantibumlinmas dan urusan sosial yang diampu oleh beberapa Perangkat Daerah, diantaranya yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Sumber Daya Air, Binamarga dan Bina Kontruksi, Dinas Sosial, Dinas Pemadam kebakaran dan Dinas Satpol PP. Terkait capaian kinerja tematik Standar Pelayanan Minimal dijabarkan ke dalam Tabel 3.4.



**Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tematik Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Bekasi**

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
KODE	URAIAN	PAGU DANA (Rp.)	REAL. KEUANGAN		TARGET FISIK	REAL. FISIK	
			(Rp.)	(%)		K	(%)
1	2	4	5	6	7	8	6
2.08	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>1.055.863.900,00</b>	<b>951.918.101,00</b>	<b>90,16</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>100,00</b>
2.08.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>280.932.200,00</b>	<b>258.971.641,00</b>	<b>92,18</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00</b>
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280.932.200,00	258.971.641,00	92,18	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	280.932.200,00 <i>0,00</i>	258.971.641,00 <i>0,00</i>	92,18 <i>0,00</i>	<i>0,00</i> <i>1,00</i>	<i>0,00</i> <i>1,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
2.08.02	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>257.027.500,00</b>	<b>213.285.360,00</b>	<b>82,98</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00</b>
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	257.027.500,00	213.285.360,00	82,98	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
2.08.02.2.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota - Jumlah Perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di Bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum Pd LPLPP tingkat Kab/Kota	257.027.500,00 <i>0,00</i>	213.285.360,00 <i>0,00</i>	82,98 <i>0,00</i>	<i>0,00</i> <i>220,00</i>	<i>0,00</i> <i>220,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
2.08.03	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>69.020.000,00</b>	<b>65.217.500,00</b>	<b>94,49</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00</b>
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.020.000,00	65.217.500,00	94,49	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	69.020.000,00	65.217.500,00	94,49	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,00

	- Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	100,00
2.08.06	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b> - Nilai Capaian Kluster KLA	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	0,00 100,00	0,00 100,00	<b>100,00</b> 100,00
2.08.07	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>448.884.200,00</b>	<b>414.443.600,00</b>	<b>92,33</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Fasilitas Advokasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	101.500.000,00 0,00	81.765.000,00 0,00	80,56 0,00	0,00 300,00	0,00 300,00	100,00 100,00
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA - Jumlah SDM yang Memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan Pencegahan KTA	101.500.000,00 0,00	81.765.000,00 0,00	80,56 0,00	0,00 300,00	0,00 300,00	100,00 100,00
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	234.530.000,00	232.447.000,00	99,11	0,00	0,00	100,00
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	234.530.000,00 0,00	232.447.000,00 0,00	99,11 0,00	0,00 30,00	0,00 30,00	100,00 100,00
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	112.854.200,00	100.231.600,00	88,82	0,00	0,00	100,00
2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota - Jumlah KIE perlindungan khusus anak	112.854.200,00 0,00	100.231.600,00 0,00	88,82 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00

<b>JUMLAH</b>	1.055.863.900,00	951.918.101,00	90,16			100,00
---------------	------------------	----------------	-------	--	--	--------

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL**

KODE	URAIAN	LOKASI	PAGU DANA (Rp.)	REAL. KEUANGAN		TARGET FISIK	REAL. FISIK	
				(Rp.)	(%)		K	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	6
1.06	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>		2.147.109.000,00	1.983.613.144,00	92,39	0,00	0,00	65,08
1.06.04	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>		2.147.109.000,00	1.983.613.144,00	92,39	0,00	0,00	0,00
	- <i>Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang diberikan bimbingan Sosial dan bantuan sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat</i>		0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		2.147.109.000,00	1.983.613.144,00	92,39	0,00	0,00	97,61
	- <i>Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar</i>		0,00	0,00	0,00	2.620,00	2.567,00	97,98
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan		2.147.109.000,00	1.983.613.144,00	92,39	0,00	0,00	97,25
	- <i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		0,00	0,00	0,00	1.929,00	1.876,00	97,25
<b>JUMLAH</b>			<b>2.147.109.000,00</b>	<b>1.983.613.144,00</b>	<b>92,39</b>			<b>65,08</b>

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN**

KODE	URAIAN	LOKASI		REAL. KEUANGAN		REAL. FISIK
------	--------	--------	--	----------------	--	-------------

1	2	3	PAGU DANA (Rp.)	(Rp.)	(%)	TARGET FISIK	K	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	6
1.02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>		<b>387.887.321.685,00</b>	<b>379.092.268.882,00</b>	<b>97,73</b>	0,00	0,00	<b>102,08</b>
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>9.687.212.273,00</b>	<b>8.900.000.000,00</b>	<b>91,87</b>	0,00	0,00	<b>100,00</b>
	- <i>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</i>		0,00	0,00	0,00	23,40	23,40	100,00
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		9.687.212.273,00	8.900.000.000,00	91,87	0,00	0,00	100,00
1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		9.687.212.273,00	8.900.000.000,00	91,87	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan</i>		0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	100,00
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		<b>376.229.167.112,00</b>	<b>368.276.481.082,00</b>	<b>97,89</b>	0,00	0,00	<b>109,09</b>
	- <i>Persentase pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan rumah sakit dan FKTP sesuai standar</i>		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	- <i>Kabupaten/ Kota Sehat</i>		0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	200,00
	- <i>Persentase fasilitas kesehatan yang terpenuhi kebutuhan alkes sesuai standar</i>		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	- <i>Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	- <i>Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	- <i>Persentase kasus Penyakit Menular &amp; Penyakit Tidak menular yang berhasil tertangani</i>		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	- <i>Prevalensi stunting</i>		0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	100,00
	- <i>Persentase desa yang melaksanakan STBM</i>		0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	100,00
	- <i>Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan primer dan sekunder sesuai standar</i>		0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	100,00

	- Jumlah Angka Kematian Ibu		0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	100,00
	- Jumlah Angka Kematian Bayi		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		376.229.167.112,00	368.276.481.082,00	97,89	0,00	0,00	96,67
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		1.438.936.320,00	1.421.993.720,00	98,82	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	100,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		168.000.000,00	160.600.000,00	95,60	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	100,00
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		128.000.000,00	126.026.000,00	98,46	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0,00	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00	100,00
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		6.717.544.100,00	6.589.914.200,00	98,10	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		90.000.000,00	89.809.080,00	99,79	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		425.679.850,00	416.760.000,00	97,90	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan pelayanan Promosi Kesehatan		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		367.122.768.842,00	359.408.773.082,00	97,90	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00

1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional - Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa Ke Laboratorium Rujukan / Nasional Yang Didistribusikan	88.032.000,00 0,00	23.194.000,00 0,00	26,35 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - Jumlah Dokuomen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	17.350.000,00 0,00	7.150.000,00 0,00	41,21 0,00	0,00 3,00	0,00 2,00	66,67 66,67
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak - Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	32.856.000,00 0,00	32.261.000,00 0,00	98,19 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00
1.02.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b> - Persentase tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat uji kompetensi	<b>1.630.942.300,00</b> 0,00	<b>1.578.203.200,00</b> 0,00	<b>96,77</b> 0,00	0,00 100,00	0,00 100,00	<b>100,00</b> 100,00
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	241.340.000,00	231.287.600,00	95,83	0,00	0,00	100,00
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan - Jumlah dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	241.340.000,00 0,00	231.287.600,00 0,00	95,83 0,00	0,00 93,00	0,00 93,00	100,00 100,00

1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1.389.602.300,00	1.346.915.600,00	96,93	0,00	0,00	100,00
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1.389.602.300,00	1.346.915.600,00	96,93	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	100,00
1.02.04	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>		<b>340.000.000,00</b>	<b>337.584.600,00</b>	<b>99,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	- Persentase usaha Kefarmasian, alat kesehatan dan produk makanan yang memenuhi standar		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	- Persentase usaha pengelolaan makanan berizin yang sesuai standar		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		120.000.000,00	119.708.600,00	99,76	0,00	0,00	100,00
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		120.000.000,00	119.708.600,00	99,76	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00

1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		140.000.000,00	139.094.000,00	99,35	0,00	0,00	100,00
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		140.000.000,00	139.094.000,00	99,35	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</i>		0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		80.000.000,00	78.782.000,00	98,48	0,00	0,00	100,00
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		80.000.000,00	78.782.000,00	98,48	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</i>		0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	100,00
<b>JUMLAH</b>			<b>387.887.321.685,00</b>	<b>379.092.268.882,00</b>	<b>97,73</b>			<b>102,08</b>

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN**

KODE	URAIAN	LOKASI	REAL. KEUANGAN	REAL. FISIK
------	--------	--------	----------------	-------------

1	2	3	PAGU DANA (Rp.)	(Rp.)	(%)	TARGET FISIK	K	(%)
1.01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>		<b>373.776.964.550,00</b>	<b>265.879.428.099,00</b>	<b>71,13</b>	0,00	0,00	<b>91,36</b>
1.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>1.339.739.550,00</b>	<b>1.308.802.190,00</b>	<b>97,69</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		57.615.550,00	38.900.000,00	67,52	0,00	0,00	66,67
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		57.615.550,00 0,00	38.900.000,00 0,00	67,52 0,00	0,00 3,00	0,00 2,00	66,67 66,67
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		420.624.000,00	409.680.000,00	97,40	0,00	0,00	100,00
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD		420.624.000,00 0,00	409.680.000,00 0,00	97,40 0,00	0,00 2,00	0,00 2,00	100,00 100,00
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		661.500.000,00	661.500.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		661.500.000,00 0,00	661.500.000,00 0,00	100,00 0,00	0,00 150,00	0,00 150,00	100,00 100,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	- Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada PD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada PD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		200.000.000,00	198.722.190,00	99,36	0,00	0,00	100,00
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		200.000.000,00	198.722.190,00	99,36	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>		<b>371.842.690.000,00</b>	<b>264.088.265.409,00</b>	<b>71,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		256.840.620.000,00	188.150.661.087,00	73,26	0,00	0,00	100,00
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah		12.000.000.000,00	11.570.320.120,00	96,42	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia		0,00	0,00	0,00	199,00	199,00	100,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		243.735.620.000,00	175.544.311.967,00	72,02	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	712,00	712,00	100,00
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		1.105.000.000,00	1.036.029.000,00	93,76	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar		0,00	0,00	0,00	212,00	212,00	100,00
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		113.189.400.000,00	74.687.804.322,00	65,98	0,00	0,00	80,00
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah		9.000.000.000,00	6.805.730.640,00	75,62	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		0,00	0,00	0,00	149,00	149,00	100,00
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang menerima Biaya Personil Peserta Didik		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	102.539.400.000,00	67.734.679.682,00	66,06	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mengelola Dana BOS	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	100,00
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100.000.000,00	98.230.000,00	98,23	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	50.000.000,00	49.164.000,00	98,33	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.114.750.000,00	1.076.952.000,00	96,61	0,00	0,00	100,00
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	186.885.000,00	164.500.000,00	88,02	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	100,00
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	377.865.000,00	374.521.000,00	99,12	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	100,00
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	550.000.000,00	537.931.000,00	97,81	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	697.920.000,00	172.848.000,00	24,77	0,00	0,00	75,00
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Jumlah Peserta Didik Non Formal / Kesetaraan yang menerima biaya personal peserta didik	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	47.920.000,00	43.700.000,00	91,19	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan - <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan - <i>Jumlah Kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang pendidikan yang dilaksanakan</i>	150.000.000,00 0,00	129.148.000,00 0,00	86,10 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00
1.01.03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>444.933.500,00</b>	<b>336.815.000,00</b>	<b>75,70</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	444.933.500,00	336.815.000,00	75,70	0,00	0,00	100,00
1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar - <i>Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun</i>	46.198.000,00 0,00	45.892.000,00 0,00	99,34 0,00	0,00 2,00	0,00 2,00	100,00 100,00
1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar - <i>Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersusun</i>	398.735.500,00 0,00	290.923.000,00 0,00	72,96 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00
1.01.04	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b> - <i>Presentase pemenuhan pemerataan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan</i>	<b>149.601.500,00</b> 0,00	<b>145.545.500,00</b> 0,00	<b>97,29</b> 0,00	0,00 100,00	0,00 100,00	<b>100,00</b> 100,00
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	149.601.500,00	145.545.500,00	97,29	0,00	0,00	100,00
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - <i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>	149.601.500,00 0,00	145.545.500,00 0,00	97,29 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00

<b>JUMLAH</b>	373.776.964.550,00	265.879.428.099,00	71,13			91,36
---------------	--------------------	--------------------	-------	--	--	-------

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

KODE	URAIAN	LOKASI	PAGU DANA (Rp.)	REAL. KEUANGAN		TARGET FISIK	REAL. FISIK	
				(Rp.)	(%)		K	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	6
2.13	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>		5.719.558.819,00	5.510.694.164,00	96,35	0,00	0,00	97,92
2.13.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		2.446.382.162,00	2.281.250.814,00	93,25	0,00	0,00	100,00
	- <i>Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah</i>		0,00	0,00	0,00	32,10	32,10	100,00
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.608.344.940,00	1.491.466.294,00	92,73	0,00	0,00	91,67
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		150.000.000,00	136.928.000,00	91,29	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>		0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	100,00
2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		200.000.000,00	133.050.000,00	66,53	0,00	0,00	66,67
	- <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>		0,00	0,00	0,00	12,00	8,00	66,67
2.13.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu		150.000.000,00	131.738.500,00	87,83	0,00	0,00	91,67
	- <i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>		0,00	0,00	0,00	12,00	11,00	91,67
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD		958.344.940,00	941.144.834,00	98,21	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD</i>		0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	100,00
2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD		150.000.000,00	148.604.960,00	99,07	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD</i>		0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	100,00
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		438.037.222,00	436.507.720,00	99,65	0,00	0,00	100,00
2.13.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		438.037.222,00	436.507.720,00	99,65	0,00	0,00	100,00

	- Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	100,00
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		150.000.000,00	148.092.800,00	98,73	0,00	0,00	100,00
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		150.000.000,00	148.092.800,00	98,73	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	100,00
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		250.000.000,00	205.184.000,00	82,07	0,00	0,00	100,00
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100.000.000,00	87.144.000,00	87,14	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	100,00
2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		150.000.000,00	118.040.000,00	78,69	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	100,00
2.13.02	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>		<b>2.480.000.000,00</b>	<b>2.453.034.850,00</b>	<b>98,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	- Persentase desa yang difasilitasi dalam penataan desa		0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	100,00
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa		2.480.000.000,00	2.453.034.850,00	98,91	0,00	0,00	100,00
2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa		200.000.000,00	197.673.800,00	98,84	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya		0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	100,00
2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa		2.280.000.000,00	2.255.361.050,00	98,92	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi		0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	100,00
2.13.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	- Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa		0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	100,00

2.13.04	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>175.000.000,00</b>	<b>174.270.000,00</b>	<b>99,58</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>100,00</b>
	- <i>Cakupan Desa yang tertib pengelolaan aset desa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>	<i>100,00</i>
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		175.000.000,00	174.270.000,00	99,58	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa		75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
	- <i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>	<i>100,00</i>
2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		100.000.000,00	99.270.000,00	99,27	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
	- <i>Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>179,00</i>	<i>179,00</i>	<i>100,00</i>
2.13.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>		<b>618.176.657,00</b>	<b>602.138.500,00</b>	<b>97,41</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>100,00</b>
	- <i>Persentase desa yang difasilitasi dalam pemberdayaan kelembagaan</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>	<i>100,00</i>
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		618.176.657,00	602.138.500,00	97,41	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		297.450.000,00	291.208.500,00	97,90	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
	- <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna ) Lembaga adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77,00</i>	<i>77,00</i>	<i>100,00</i>
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		320.726.657,00	310.930.000,00	96,95	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
	- <i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>100,00</i>

<b>JUMLAH</b>			<b>5.719.558.819,00</b>	<b>5.510.694.164,00</b>	<b>96,35</b>			<b>97,92</b>

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTANIAN**

KODE	URAIAN	LOKASI	PAGU DANA (Rp.)	REAL. KEUANGAN		TARGET FISIK	REAL. FISIK	
				(Rp.)	(%)		K	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	6
3.27	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>		<b>12.087.665.251,00</b>	<b>11.283.436.890,00</b>	<b>93,35</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>84,69</b>
3.27.02	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>		<b>4.546.243.840,00</b>	<b>3.782.309.510,00</b>	<b>83,20</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>100,00</b>
	- <i>Persentase peningkatan jumlah unit usaha obat hewan yang diawasi</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>	<i>100,00</i>
	- <i>Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Utama Tanaman Holtikultura dan Perkebunan per tahun</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2,20</i>	<i>2,20</i>	<i>100,00</i>
	- <i>Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Utama Tanaman Pangan</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4,50</i>	<i>4,50</i>	<i>100,00</i>
	- <i>Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Utama Peternakan (Daging, Telur)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,94</i>	<i>0,94</i>	<i>100,00</i>
	- <i>Persentase Peningkatan Jumlah Kelompok Tani yang dibina dalam Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Holtikultura dan Perkebunan</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>100,00</i>
	- <i>Persentase pemenuhan sarana pertanian untuk mendukung pertumbuhan produksi pertanian dalam 1 Tahun</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,50</i>	<i>1,50</i>	<i>100,00</i>
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		3.351.603.840,00	2.756.876.260,00	82,26	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	41,81
	- <i>Jumlah Produksi ubi kayu</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- <i>Jumlah Produksi ubi jalar</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>425,00</i>	<i>3,00</i>	<i>0,71</i>
	- <i>Jumlah Produksi kacang tanah</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72,00</i>	<i>6,00</i>	<i>8,33</i>

3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman - Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2.851.603.840,00 0,00	2.275.080.260,00 0,00	79,78 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00
3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman - Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	500.000.000,00 0,00	481.796.000,00 0,00	96,36 0,00	0,00 4,00	0,00 4,00	100,00 100,00
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.194.640.000,00	1.025.433.250,00	85,84	0,00	0,00	100,00
3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak - Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	1.194.640.000,00 0,00	1.025.433.250,00 0,00	85,84 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00
3.27.03	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b> - Persentase penerapan teknologi inseminasi buatan pada sapi potong	<b>7.541.421.411,00</b> 0,00	<b>7.501.127.380,00</b> 0,00	<b>99,47</b> 0,00	0,00 77,00	0,00 77,00	<b>100,00</b> 100,00
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	464.040.000,00	461.986.120,00	99,56	0,00	0,00	100,00
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya - Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	464.040.000,00 0,00	461.986.120,00 0,00	99,56 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	7.077.381.411,00	7.039.141.260,00	99,46	0,00	0,00	100,00
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani - Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2.245.920.000,00 0,00	2.229.965.000,00 0,00	99,29 0,00	0,00 22,00	0,00 22,00	100,00 100,00
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani - Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	4.831.461.411,00 0,00	4.809.176.260,00 0,00	99,54 0,00	0,00 27,00	0,00 27,00	100,00 100,00
3.27.04	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b> - Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ternak/Hewan Pemeliharaan	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	0,00 14,00	0,00 14,00	<b>100,00</b> 100,00

3.27.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota - Luas lahan tanaman pangan terdampak perubahan iklim		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	473,00	473,00	100,00
3.27.06	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b> - Persentase peningkatan kelompok tani terdaftar yang dibina dan diawasi usahanya		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	100,00
<b>JUMLAH</b>			<b>12.087.665.251,00</b>	<b>11.283.436.890,00</b>	<b>93,35</b>			<b>84,69</b>

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS KETENAGAKERJAAN**

KODE	URAIAN	LOKASI	PAGU DANA (Rp.)	REAL. KEUANGAN		TARGET FISIK	REAL. FISIK	
				(Rp.)	(%)		K	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	6
2.07	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>		<b>16.773.659.879,00</b>	<b>16.122.366.746,00</b>	<b>96,12</b>	0,00	0,00	<b>102,91</b>
2.07.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>2.803.742.000,00</b>	<b>2.653.177.626,00</b>	<b>94,63</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		215.780.000,00	210.180.000,00	97,40	0,00	0,00	100,00
2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Jumlah Pegawai Perangkat Daerah yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		215.780.000,00	210.180.000,00	97,40	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	100,00
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		200.000.000,00	186.276.000,00	93,14	0,00	0,00	100,00
2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD - Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD		200.000.000,00	186.276.000,00	93,14	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.737.962.000,00	1.623.479.000,00	93,41	0,00	0,00	100,00
2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1.737.962.000,00	1.623.479.000,00	93,41	0,00	0,00	100,00

	- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	100,00
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		650.000.000,00	633.242.626,00	97,42	0,00	0,00	100,00
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100.000.000,00	96.300.000,00	96,30	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00
2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		550.000.000,00	536.942.626,00	97,63	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
2.07.03	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>		<b>7.215.231.300,00</b>	<b>7.054.754.800,00</b>	<b>97,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	- Persentase Perusahaan kecil yang ditingkatkan produktivitasnya		0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		7.215.231.300,00	7.054.754.800,00	97,78	0,00	0,00	100,00
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		7.215.231.300,00	7.054.754.800,00	97,78	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		0,00	0,00	0,00	1.162,00	1.162,00	100,00
2.07.04	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>		<b>3.886.393.530,00</b>	<b>3.711.626.520,00</b>	<b>95,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	- Persentase lowongan kerja yang terinformasikan		0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	100,00
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		2.791.533.530,00	2.639.329.510,00	94,55	0,00	0,00	111,05
2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja		328.625.000,00	315.905.000,00	96,13	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Sumber Daya Pelayanan Tenaga Kerja yang disediakan		0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	100,00
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja		652.642.880,00	613.249.880,00	93,96	0,00	0,00	155,25
	- Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL		0,00	0,00	0,00	15.500,00	24.064,00	155,25

2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja - Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	180.415.750,00 0,00	175.685.000,00 0,00	97,38 0,00	0,00 170,00	0,00 170,00	100,00 100,00
2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan - Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	593.000.000,00 0,00	536.148.000,00 0,00	90,41 0,00	0,00 700,00	0,00 700,00	100,00 100,00
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja - Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	1.036.849.900,00 0,00	998.341.630,00 0,00	96,29 0,00	0,00 150,00	0,00 150,00	100,00 100,00
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	500.000.000,00	490.129.000,00	98,03	0,00	0,00	100,00
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online - Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (Karirhub)	500.000.000,00 0,00	490.129.000,00 0,00	98,03 0,00	0,00 80,00	0,00 80,00	100,00 100,00
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	594.860.000,00	582.168.010,00	97,87	0,00	0,00	100,00
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) - Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	594.860.000,00 0,00	582.168.010,00 0,00	97,87 0,00	0,00 200,00	0,00 200,00	100,00 100,00
2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan - Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2.07.05	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b> - Persentase Perusahaan yang memiliki syarat kerja	<b>2.868.293.049,00</b> 0,00	<b>2.702.807.800,00</b> 0,00	<b>94,23</b> 0,00	0,00 2,00	0,00 2,00	<b>100,00</b> 100,00
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2.868.293.049,00	2.702.807.800,00	94,23	0,00	0,00	100,00

2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1.751.653.049,00 0,00	1.663.669.000,00 0,00	94,98 0,00	0,00 190,00	0,00 190,00	100,00 100,00
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	1.116.640.000,00 0,00	1.039.138.800,00 0,00	93,06 0,00	0,00 190,00	0,00 190,00	100,00 100,00
3.32	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
3.32.03	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b> - Persentase Perjanjian Kerja sama di bidang transmigrasi	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>100,00</b> 100,00
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi - Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>16.773.659.879,00</b>	<b>16.122.366.746,00</b>	<b>96,12</b>			<b>101,45</b>

**Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tematik Penanganan Stunting Kabupaten Bekasi**

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH :		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
KODE	URAIAN	PAGU DANA (Rp.)	REAL. KEUANGAN		TARGET FISIK	REAL. FISIK	
			(Rp.)	(%)		K	(%)
1	2	4	5	6	7	8	6
2.08	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>1.055.863.900,00</b>	<b>951.918.101,00</b>	<b>90,16</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>100,00</b>
2.08.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>280.932.200,00</b>	<b>258.971.641,00</b>	<b>92,18</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00</b>
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280.932.200,00	258.971.641,00	92,18	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	280.932.200,00 <i>0,00</i>	258.971.641,00 <i>0,00</i>	92,18 <i>0,00</i>	<i>0,00</i> <i>1,00</i>	<i>0,00</i> <i>1,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
2.08.02	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>257.027.500,00</b>	<b>213.285.360,00</b>	<b>82,98</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00</b>
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	257.027.500,00	213.285.360,00	82,98	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
2.08.02.2.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota - <i>Jumlah Perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di Bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum Pd LPLPP tingkat Kab/Kota</i>	257.027.500,00 <i>0,00</i>	213.285.360,00 <i>0,00</i>	82,98 <i>0,00</i>	<i>0,00</i> <i>220,00</i>	<i>0,00</i> <i>220,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
2.08.03	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>69.020.000,00</b>	<b>65.217.500,00</b>	<b>94,49</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00</b>
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota - <i>Jumlah Layanan Penunjang Perlindungan Perempuan dan Anak yang disediakan</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i>	<i>0,00</i> <i>120,00</i>	<i>0,00</i> <i>120,00</i>	100,00 <i>100,00</i>

2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.020.000,00	65.217.500,00	94,49	0,00	0,00	100,00
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota - Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	69.020.000,00 0,00	65.217.500,00 0,00	94,49 0,00	0,00 52,00	0,00 52,00	100,00 100,00
2.08.06	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b> - Nilai Capaian Kluster KLA	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	0,00 100,00	0,00 100,00	<b>100,00</b> 100,00
2.08.07	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b> - Nilai Capaian Kluster Perlindungan Khusus Anak	<b>448.884.200,00</b> 0,00	<b>414.443.600,00</b> 0,00	<b>92,33</b> 0,00	0,00 100,00	0,00 100,00	<b>100,00</b> 100,00
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Fasilitas Advokasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	101.500.000,00 0,00	81.765.000,00 0,00	80,56 0,00	0,00 300,00	0,00 300,00	100,00 100,00
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA - Jumlah SDM yang Memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan Pencegahan KTA	101.500.000,00 0,00	81.765.000,00 0,00	80,56 0,00	0,00 300,00	0,00 300,00	100,00 100,00
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	234.530.000,00	232.447.000,00	99,11	0,00	0,00	100,00

2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	234.530.000,00 0,00	232.447.000,00 0,00	99,11 0,00	0,00 30,00	0,00 30,00	100,00 100,00
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	112.854.200,00	100.231.600,00	88,82	0,00	0,00	100,00
2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota - Jumlah KIE perlindungan khusus anak	112.854.200,00 0,00	100.231.600,00 0,00	88,82 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.055.863.900,00</b>	<b>951.918.101,00</b>	<b>90,16</b>			<b>100,00</b>

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL**

KODE	URAIAN	PAGU DANA (Rp.)	REAL. KEUANGAN		TARGET FISIK	REAL. FISIK	
			(Rp.)	(%)		K	(%)
1	2	4	5	6	7	8	6
1.06	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>	<b>1.199.582.400,00</b>	<b>1.106.171.970,00</b>	<b>92,21</b>	0,00	0,00	<b>50,00</b>
1.06.05	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>1.199.582.400,00</b>	<b>1.106.171.970,00</b>	<b>92,21</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	- Cakupan jumlah pendamping sosial yang dibutuhkan untuk pendampingan kepada KPM PKH di Kabupaten Bekasi	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.199.582.400,00	1.106.171.970,00	92,21	0,00	0,00	100,00
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga - Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.199.582.400,00 0,00	1.106.171.970,00 0,00	92,21 0,00	0,00 54.563,00	0,00 54.563,00	100,00 100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.199.582.400,00</b>	<b>1.106.171.970,00</b>	<b>92,21</b>			<b>50,00</b>

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN**

KODE	URAIAN	PAGU DANA (Rp.)	REAL. KEUANGAN		TARGET FISIK	REAL. FISIK	
			(Rp.)	(%)		K	(%)
1	2	4	5	6	7	8	6
1.02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>20.764.552.843,00</b>	<b>19.683.495.800,00</b>	<b>94,79</b>	0,00	0,00	<b>102,15</b>
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>9.687.212.273,00</b>	<b>8.900.000.000,00</b>	<b>91,87</b>	0,00	0,00	<b>100,00</b>
	- <i>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</i>	0,00	0,00	0,00	23,40	23,40	100,00
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.687.212.273,00	8.900.000.000,00	91,87	0,00	0,00	100,00
1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.687.212.273,00	8.900.000.000,00	91,87	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan</i>	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	100,00
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>9.106.398.270,00</b>	<b>8.867.708.000,00</b>	<b>97,38</b>	0,00	0,00	<b>109,09</b>
	- <i>Persentase pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan rumah sakit dan FKTP sesuai standar</i>	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	- <i>Kabupaten/ Kota Sehat</i>	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	200,00
	- <i>Persentase fasilitas kesehatan yang terpenuhi kebutuhan alkes sesuai standar</i>	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	- <i>Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	- <i>Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	- <i>Persentase kasus Penyakit Menular &amp; Penyakit Tidak menular yang berhasil tertangani</i>	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	- <i>Prevalensi stunting</i>	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	100,00
	- <i>Persentase desa yang melaksanakan STBM</i>	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	100,00

	- <i>Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan primer dan sekunder sesuai standar</i>	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	100,00
	- <i>Jumlah Angka Kematian Ibu</i>	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	100,00
	- <i>Jumlah Angka Kematian Bayi</i>	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.106.398.270,00	8.867.708.000,00	97,38	0,00	0,00	96,30
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.438.936.320,00	1.421.993.720,00	98,82	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	100,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	168.000.000,00	160.600.000,00	95,60	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	0,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	100,00
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	128.000.000,00	126.026.000,00	98,46	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	0,00	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00	100,00
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	6.717.544.100,00	6.589.914.200,00	98,10	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	90.000.000,00	89.809.080,00	99,79	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i>	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	425.679.850,00	416.760.000,00	97,90	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan pelayanan Promosi Kesehatan</i>	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00

1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional - Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa Ke Laboratorium Rujukan / Nasional Yang Didistribusikan	88.032.000,00 0,00	23.194.000,00 0,00	26,35 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - Jumlah Dokuomen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	17.350.000,00 0,00	7.150.000,00 0,00	41,21 0,00	0,00 3,00	0,00 2,00	66,67 66,67
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak - Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	32.856.000,00 0,00	32.261.000,00 0,00	98,19 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00
1.02.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b> - Persentase tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat uji kompetensi	<b>1.630.942.300,00</b> 0,00	<b>1.578.203.200,00</b> 0,00	<b>96,77</b> 0,00	0,00 100,00	0,00 100,00	<b>100,00</b> 100,00
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	241.340.000,00	231.287.600,00	95,83	0,00	0,00	100,00
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan - Jumlah dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	241.340.000,00 0,00	231.287.600,00 0,00	95,83 0,00	0,00 93,00	0,00 93,00	100,00 100,00
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.389.602.300,00	1.346.915.600,00	96,93	0,00	0,00	100,00

1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  - Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1.389.602.300,00  0,00	1.346.915.600,00  0,00	96,93  0,00	0,00  490,00	0,00  490,00	100,00  100,00
1.02.04	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>  - Persentase usaha Kefarmasian, alat kesehatan dan produk makanan yang memenuhi standar  - Persentase usaha pengelolaan makanan berizin yang sesuai standar	340.000.000,00  0,00  0,00	337.584.600,00  0,00  0,00	99,29  0,00  0,00	0,00  100,00  100,00	0,00  100,00  100,00	100,00  100,00  100,00
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	120.000.000,00	119.708.600,00	99,76	0,00	0,00	100,00

1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	120.000.000,00	119.708.600,00	99,76	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	140.000.000,00	139.094.000,00	99,35	0,00	0,00	100,00
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	140.000.000,00	139.094.000,00	99,35	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	80.000.000,00	78.782.000,00	98,48	0,00	0,00	100,00
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	80.000.000,00	78.782.000,00	98,48	0,00	0,00	100,00

	- Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>20.764.552.843,00</b>	<b>19.683.495.800,00</b>	<b>94,79</b>			<b>102,15</b>

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN**

KODE	URAIAN	PAGU DANA (Rp.)	REAL. KEUANGAN		TARGET FISIK	REAL. FISIK	
			(Rp.)	(%)		K	(%)
1	2	4	5	6	7	8	6
1.01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>5.542.227.350,00</b>	<b>4.808.233.190,00</b>	<b>86,76</b>	0,00	0,00	<b>100,04</b>
1.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.071.359.850,00</b>	<b>2.523.712.190,00</b>	<b>82,17</b>	0,00	0,00	<b>80,00</b>
	- Cakupan layanan administrasi umum yang terpenuhi	0,00	0,00	0,00	100,00	80,00	80,00
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	179.900.850,00	112.700.000,00	62,65	0,00	0,00	83,33
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57.615.550,00	38.900.000,00	67,52	0,00	0,00	66,67
	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	66,67
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PD	122.285.300,00	73.800.000,00	60,35	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Dokumen RKA-PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-PD	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	420.624.000,00	409.680.000,00	97,40	0,00	0,00	100,00
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	420.624.000,00	409.680.000,00	97,40	0,00	0,00	100,00

	- <i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD</i>	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	661.500.000,00	661.500.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	661.500.000,00	661.500.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	100,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.609.335.000,00	1.141.110.000,00	70,91	0,00	0,00	98,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.609.335.000,00	1.141.110.000,00	70,91	0,00	0,00	90,00
	- <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	0,00	0,00	0,00	10,00	9,00	90,00
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada PD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada PD</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.000.000,00	198.722.190,00	99,36	0,00	0,00	100,00
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	198.722.190,00	99,36	0,00	0,00	100,00

	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>1.743.862.000,00</b>	<b>1.675.090.000,00</b>	<b>96,06</b>	0,00	0,00	<b>100,00</b>
	- Persentase anak putus sekolah yang berpartisipasi dalam pendidikan Non Formal	0,00	0,00	0,00	64,70	64,70	100,00
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100.000.000,00	98.230.000,00	98,23	0,00	0,00	100,00
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100.000.000,00	98.230.000,00	98,23	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.308.210.000,00	1.267.262.000,00	96,87	0,00	0,00	100,00
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	186.885.000,00	164.500.000,00	88,02	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	100,00
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	377.865.000,00	374.521.000,00	99,12	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	100,00
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	193.460.000,00	190.310.000,00	98,37	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	550.000.000,00	537.931.000,00	97,81	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	335.652.000,00	309.598.000,00	92,24	0,00	0,00	125,00

1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	137.732.000,00 0,00	136.750.000,00 0,00	99,29 0,00	0,00 213,00	0,00 426,00	200,00 200,00
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan - Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	47.920.000,00 0,00	43.700.000,00 0,00	91,19 0,00	0,00 100,00	0,00 100,00	100,00 100,00
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan - Jumlah Kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang pendidikan yang dilaksanakan	150.000.000,00 0,00	129.148.000,00 0,00	86,10 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00
1.01.03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>444.933.500,00</b>	<b>336.815.000,00</b>	<b>75,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar - Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	444.933.500,00 0,00	336.815.000,00 0,00	75,70 0,00	0,00 1.011,00	0,00 650,00	88,10 64,29
1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar - Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	46.198.000,00 0,00	45.892.000,00 0,00	99,34 0,00	0,00 2,00	0,00 2,00	100,00 100,00
1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar - Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersusun	398.735.500,00 0,00	290.923.000,00 0,00	72,96 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00
1.01.04	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>282.072.000,00</b>	<b>272.616.000,00</b>	<b>96,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

	- <i>Presentase pemenuhan pemerataan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan</i>	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	282.072.000,00	272.616.000,00	96,65	0,00	0,00	100,00
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	132.470.500,00	127.070.500,00	95,92	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	149.601.500,00	145.545.500,00	97,29	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>5.542.227.350,00</b>	<b>4.808.233.190,00</b>	<b>86,76</b>			<b>100,04</b>

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

KODE	URAIAN	PAGU DANA (Rp.)	REAL. KEUANGAN		TARGET FISIK	REAL. FISIK	
			(Rp.)	(%)		K	(%)
1	2	4	5	6	7	8	6
2.13	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>17.866.753.179,00</b>	<b>17.010.809.212,00</b>	<b>95,21</b>	0,00	0,00	<b>98,81</b>
2.13.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.801.382.162,00</b>	<b>2.633.179.774,00</b>	<b>94,00</b>	0,00	0,00	<b>100,00</b>
	- <i>Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah</i>	0,00	0,00	0,00	32,10	32,10	100,00
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.963.344.940,00	1.843.395.254,00	93,89	0,00	0,00	94,05

2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	300.000.000,00	297.669.960,00	99,22	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	100,00
2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	55.000.000,00	54.259.000,00	98,65	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	100,00
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150.000.000,00	136.928.000,00	91,29	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	100,00
2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	200.000.000,00	133.050.000,00	66,53	0,00	0,00	66,67
	- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0,00	0,00	0,00	12,00	8,00	66,67
2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	150.000.000,00	131.738.500,00	87,83	0,00	0,00	91,67
	- Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00	12,00	11,00	91,67
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	958.344.940,00	941.144.834,00	98,21	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	100,00
2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD	150.000.000,00	148.604.960,00	99,07	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	100,00
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	438.037.222,00	436.507.720,00	99,65	0,00	0,00	100,00
2.13.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	438.037.222,00	436.507.720,00	99,65	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	100,00

2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.000.000,00	148.092.800,00	98,73	0,00	0,00	100,00
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.000.000,00	148.092.800,00	98,73	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	100,00
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.000.000,00	205.184.000,00	82,07	0,00	0,00	100,00
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000,00	87.144.000,00	87,14	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	100,00
2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000,00	118.040.000,00	78,69	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	100,00
2.13.02	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>2.680.000.000,00</b>	<b>2.645.308.650,00</b>	<b>98,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	- Persentase desa yang difasilitasi dalam penataan desa	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	100,00
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	2.680.000.000,00	2.645.308.650,00	98,71	0,00	0,00	100,00
2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	200.000.000,00	192.273.800,00	96,14	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	100,00
2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	200.000.000,00	197.673.800,00	98,84	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	100,00
2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	2.280.000.000,00	2.255.361.050,00	98,92	0,00	0,00	100,00

	- Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	100,00
2.13.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>	<b>5.387.950.000,00</b>	<b>4.887.207.158,00</b>	<b>90,71</b>	0,00	0,00	<b>100,00</b>
	- Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	100,00
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	5.387.950.000,00	4.887.207.158,00	90,71	0,00	0,00	100,00
2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	219.255.000,00	218.811.000,00	99,80	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	5.168.695.000,00	4.668.396.158,00	90,32	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	100,00
2.13.04	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>3.813.360.000,00</b>	<b>3.751.962.740,00</b>	<b>98,39</b>	0,00	0,00	<b>100,00</b>
	- Cakupan Desa yang tertib pengelolaan aset desa	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	100,00
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3.813.360.000,00	3.751.962.740,00	98,39	0,00	0,00	100,00
2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	100,00
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1.100.000.000,00	1.094.742.790,00	99,52	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	100,00

2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.050.000.000,00	1.028.982.000,00	98,00	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	100,00
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	604.000.000,00	599.031.200,00	99,18	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	100,00
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	200.000.000,00	194.183.000,00	97,09	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	450.000.000,00	433.509.950,00	96,34	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	100.000.000,00	99.270.000,00	99,27	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	100,00
2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	234.360.000,00	227.243.800,00	96,96	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	100,00
2.13.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>3.184.061.017,00</b>	<b>3.093.150.890,00</b>	<b>97,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	- Persentase desa yang difasilitasi dalam pemberdayaan kelembagaan	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	100,00

2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.184.061.017,00	3.093.150.890,00	97,14	0,00	0,00	100,00
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat - Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.107.600.000,00  0,00	1.097.108.000,00  0,00	99,05  0,00	0,00  3,00	0,00  3,00	100,00  100,00
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat - Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	300.000.000,00  0,00	295.459.750,00  0,00	98,49  0,00	0,00  4,00	0,00  4,00	100,00  100,00
2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat - Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna ) Lembaga adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	297.450.000,00  0,00	291.208.500,00  0,00	97,90  0,00	0,00  77,00	0,00  77,00	100,00  100,00
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna - Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	344.284.360,00  0,00	304.141.790,00  0,00	88,34  0,00	0,00  5,00	0,00  5,00	100,00  100,00
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat - Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	320.726.657,00  0,00	310.930.000,00  0,00	96,95  0,00	0,00  1,00	0,00  1,00	100,00  100,00
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	814.000.000,00	794.302.850,00	97,58	0,00	0,00	100,00

	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>17.866.753.179,00</b>	<b>17.010.809.212,00</b>	<b>95,21</b>			<b>98,81</b>

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTANIAN**

KODE	URAIAN	PAGU DANA (Rp.)	REAL. KEUANGAN		TARGET FISIK	REAL. FISIK	
			(Rp.)	(%)		K	(%)
1	2	4	5	6	7	8	6
3.27	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>	<b>1.454.847.429,00</b>	<b>1.365.231.306,00</b>	<b>93,84</b>	0,00	0,00	<b>80,60</b>
3.27.02	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>1.454.847.429,00</b>	<b>1.365.231.306,00</b>	<b>93,84</b>	0,00	0,00	<b>100,00</b>
	- Persentase peningkatan jumlah unit usaha obat hewan yang diawasi	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	100,00
	- Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Utama Tanaman Holtikultura dan Perkebunan per tahun	0,00	0,00	0,00	2,20	2,20	100,00
	- Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Utama Tanaman Pangan	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	100,00
	- Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Utama Peternakan (Daging, Telur)	0,00	0,00	0,00	0,94	0,94	100,00
	- Persentase Peningkatan Jumlah Kelompok Tani yang dibina dalam Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Holtikultura dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	100,00
	- Persentase pemenuhan sarana pertanian untuk mendukung pertumbuhan produksi pertanian dalam 1 Tahun	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	100,00
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1.039.827.680,00	974.754.440,00	93,74	0,00	0,00	27,26
	- Jumlah Produksi ubi kayu	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00
	- Jumlah Produksi ubi jalar	0,00	0,00	0,00	425,00	3,00	0,71

	- Jumlah Produksi kacang tanah	0,00	0,00	0,00	72,00	6,00	8,33
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1.039.827.680,00	974.754.440,00	93,74	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	415.019.749,00	390.476.866,00	94,09	0,00	0,00	100,00
3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	415.019.749,00	390.476.866,00	94,09	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	100,00
3.27.03	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	- Persentase penerapan teknologi inseminasi buatan pada sapi potong	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00	100,00
3.27.04	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	- Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ternak/Hewan Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	100,00
3.27.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	- Luas lahan tanaman pangan terdampak perubahan iklim	0,00	0,00	0,00	473,00	473,00	100,00
3.27.06	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	- Persentase peningkatan kelompok tani terdaftar yang dibina dan diawasi usahanya	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.454.847.429,00</b>	<b>1.365.231.306,00</b>	<b>93,84</b>			<b>80,60</b>

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH :

DINAS PERIKANAN

KODE	URAIAN	PAGU DANA (Rp.)	REAL. KEUANGAN		TARGET FISIK	REAL. FISIK	
			(Rp.)	(%)		K	(%)
1	2	4	5	6	7	8	6
3.25	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>9.954.363.615,00</b>	<b>9.100.339.363,00</b>	<b>91,42</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>100,00</b>
3.25.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.491.375.018,00</b>	<b>2.403.708.218,00</b>	<b>96,48</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>100,00</b>
	- <i>Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	- <i>Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	- <i>Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	- <i>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000,00	149.972.245,00	99,98	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000,00	149.972.245,00	99,98	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
	- <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>100,00</i>
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	120.000.000,00	119.934.860,00	99,95	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
	- <i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4,00</i>	<i>4,00</i>	<i>100,00</i>
3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD	100.000.000,00	99.934.860,00	99,93	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
	- <i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>	<i>100,00</i>

3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	304.445.298,00	286.737.680,00	94,18	0,00	0,00	100,00
3.25.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - <i>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pengolahan Administrasi</i>	150.000.000,00 0,00	149.137.680,00 0,00	99,43 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00
3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - <i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	154.445.298,00 0,00	137.600.000,00 0,00	89,09 0,00	0,00 38,00	0,00 38,00	100,00 100,00
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	839.752.000,00	820.284.576,00	97,68	0,00	0,00	100,00
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan</i>	239.752.000,00 0,00	236.004.000,00 0,00	98,44 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00
3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	30.000.000,00 0,00	29.616.900,00 0,00	98,72 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00
3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu - <i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	20.000.000,00 0,00	19.825.000,00 0,00	99,13 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD - <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD</i>	500.000.000,00 0,00	487.785.676,00 0,00	97,56 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00
3.25.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD - <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD</i>	50.000.000,00 0,00	47.053.000,00 0,00	94,11 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	264.350.000,00	254.572.000,00	96,30	0,00	0,00	100,00

3.25.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	264.350.000,00 0,00	254.572.000,00 0,00	96,30 0,00	0,00 15,00	0,00 15,00	100,00 100,00
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.070.720,00	118.029.326,00	95,90	0,00	0,00	100,00
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	70.000.000,00 0,00	64.996.046,00 0,00	92,85 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	53.070.720,00 0,00	53.033.280,00 0,00	99,93 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	689.757.000,00	654.177.531,00	94,84	0,00	0,00	100,00
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya  - Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara dalam setahun	139.757.000,00 0,00 0,00	108.733.300,00 0,00 0,00	77,80 0,00 0,00	0,00 33,00 63,00	0,00 33,00 63,00	100,00 100,00 100,00
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	50.000.000,00 0,00	49.185.000,00 0,00	98,37 0,00	0,00 75,00	0,00 75,00	100,00 100,00
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	500.000.000,00 0,00	496.259.231,00 0,00	99,25 0,00	0,00 4,00	0,00 4,00	100,00 100,00

	- Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara dalam setahun	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	100,00
3.25.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>3.496.037.120,00</b>	<b>2.944.229.650,00</b>	<b>84,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	- Persentase Pertumbuhan Kelompok Nelayan	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	- Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2.281.044.480,00	1.904.627.120,00	83,50	0,00	0,00	100,00
3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	50.000.000,00	48.172.000,00	96,34	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
	- Jumlah Sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00
3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	2.231.044.480,00	1.856.455.120,00	83,21	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	989.992.640,00	814.926.650,00	82,32	0,00	0,00	100,00
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	939.992.640,00	765.586.650,00	81,45	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah kelompok nelayan kecil yang diberdayakan di kabupaten bekasi	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	100,00
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	50.000.000,00	49.340.000,00	98,68	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	100,00
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	225.000.000,00	224.675.880,00	99,86	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	100,00
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	225.000.000,00	224.675.880,00	99,86	0,00	0,00	100,00

	- Jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	100,00
3.25.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>2.079.351.477,00</b>	<b>1.941.417.790,00</b>	<b>93,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	- Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	811.659.480,00	785.679.620,00	96,80	0,00	0,00	100,00
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	142.571.000,00	138.735.000,00	97,31	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	100,00
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	669.088.480,00	646.944.620,00	96,69	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	100,00
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.267.691.997,00	1.155.738.170,00	91,17	0,00	0,00	100,00
3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000,00	39.910.000,00	99,78	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	560.495.517,00	533.605.600,00	95,20	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	100,00
3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	592.196.480,00	508.202.570,00	85,82	0,00	0,00	100,00

	- Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00
3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	75.000.000,00	74.020.000,00	98,69	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Pembudidaya yang memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	100,00
3.25.06	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>1.887.600.000,00</b>	<b>1.810.983.705,00</b>	<b>95,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	- Cakupan unit pengolahan ikan yang dibina	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	- Persentase Produksi hasil olahan perikanan	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	200.000.000,00	195.526.750,00	97,76	0,00	0,00	100,00
3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	200.000.000,00	195.526.750,00	97,76	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00	100,00
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.687.600.000,00	1.615.456.955,00	95,73	0,00	0,00	100,00
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.537.600.000,00	1.467.482.225,00	95,44	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 2 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	79.351,00	79.351,00	100,00

3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	147.974.730,00	98,65	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>9.954.363.615,00</b>	<b>9.100.339.363,00</b>	<b>91,42</b>			<b>100,00</b>

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI**

KODE	URAIAN	PAGU DANA (Rp.)	REAL. KEUANGAN		TARGET FISIK	REAL. FISIK	
			(Rp.)	(%)		K	(%)
1	2	4	5	6	7	8	6
1.03	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>255.890.898.948,00</b>	<b>253.115.689.272,00</b>	<b>98,92</b>	0,00	0,00	<b>44,98</b>
1.03.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.950.430.500,00</b>	<b>2.776.379.745,00</b>	<b>94,10</b>	0,00	0,00	<b>81,83</b>
	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	64,77	53,00	81,83
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	519.565.000,00	452.019.846,00	87,00	0,00	0,00	16,67
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	429.425.000,00	386.629.846,00	90,03	0,00	0,00	33,33
	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	0,00	0,00	0,00	6,00	2,00	33,33
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.140.000,00	65.390.000,00	72,54	0,00	0,00	0,00
	- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	150.000.000,00	146.094.840,00	97,40	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	50.000.000,00 0,00	49.791.000,00 0,00	99,58 0,00	0,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD - Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD	100.000.000,00 0,00	96.303.840,00 0,00	96,30 0,00	0,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Jumlah barang milik daerah yang diadakan dalam satu tahun	968.672.000,00 0,00	895.210.000,00 0,00	92,42 0,00	0,00 24,00	0,00 20,00	31,48 83,33
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel - Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	350.000.000,00 0,00	345.370.000,00 0,00	98,68 0,00	0,00 25,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	618.672.000,00 0,00	549.840.000,00 0,00	88,87 0,00	0,00 18,00	0,00 2,00	11,11 11,11
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.312.193.500,00	1.283.055.059,00	97,78	0,00	0,00	57,22
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	182.193.500,00 0,00	160.425.660,00 0,00	88,05 0,00	0,00 15,00	0,00 3,00	20,00 20,00
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.130.000.000,00 0,00	1.122.629.399,00 0,00	99,35 0,00	0,00 18,00	0,00 17,00	94,44 94,44
1.03.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>17.787.350.092,00</b>	<b>17.678.776.696,00</b>	<b>99,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	17.614.370.092,00	17.505.796.696,00	99,38	0,00	0,00	24,27
1.03.02.2.01.0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku - Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	5.476.470.000,00 0,00	5.453.715.000,00 0,00	99,58 0,00	0,00 25,00	0,00 12,00	48,00 48,00
1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya - Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	994.000.000,00 0,00	982.577.000,00 0,00	98,85 0,00	0,00 10,00	0,00 4,00	40,00 40,00
1.03.02.2.01.0124	Pembangunan Polder/Kolam Retensi - Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	6.895.000.000,00 0,00	6.880.686.600,00 0,00	99,79 0,00	0,00 3,00	0,00 1,00	33,33 33,33
1.03.02.2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku - Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	2.406.400.092,00 0,00	2.371.390.765,00 0,00	98,55 0,00	0,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya - Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1.842.500.000,00 0,00	1.817.427.331,00 0,00	98,64 0,00	0,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	172.980.000,00	172.980.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.02.2.02.0031	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa - Jumlah Kawasan Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi	172.980.000,00 0,00	172.980.000,00 0,00	100,00 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00
1.03.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>9.846.113.957,00</b>	<b>9.770.915.562,00</b>	<b>99,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	9.846.113.957,00	9.770.915.562,00	99,24	0,00	0,00	15,05
1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) - Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	222.000.000,00 0,00	217.363.310,00 0,00	97,91 0,00	0,00 80,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) - Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	350.820.000,00 0,00	347.540.722,00 0,00	99,07 0,00	0,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan - Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	9.273.293.957,00 0,00	9.206.011.530,00 0,00	99,27 0,00	0,00 1.329,00	0,00 600,00	45,15 45,15
1.03.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>2.951.876.000,00</b>	<b>2.836.178.023,00</b>	<b>96,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.951.876.000,00	2.836.178.023,00	96,08	0,00	0,00	22,97
1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan - Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	2.754.876.000,00 0,00	2.640.277.023,00 0,00	95,84 0,00	0,00 17.417,00	0,00 8.000,00	45,93 45,93
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan - Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	197.000.000,00 0,00	195.901.000,00 0,00	99,44 0,00	0,00 3.667,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.10	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>222.355.128.399,00</b>	<b>220.053.439.246,00</b>	<b>98,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	222.355.128.399,00	220.053.439.246,00	98,96	0,00	0,00	88,99

1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan - Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	707.000.000,00 0,00	703.756.083,00 0,00	99,54 0,00	0,00 4,00	0,00 3,60	90,00 90,00
1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa - Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	18.850.419.505,00 0,00	18.117.224.382,00 0,00	96,11 0,00	0,00 87,00	0,00 81,71	93,92 93,92
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan - Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	12.994.972.000,00 0,00	12.900.756.599,00 0,00	99,27 0,00	0,00 13,00	0,00 13,00	100,00 100,00
1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar - Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	6.123.537.670,00 0,00	5.980.829.960,00 0,00	97,67 0,00	0,00 3,80	0,00 3,23	85,00 85,00
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan - Jumlah Jembatan yang Dibangun	173.625.591.864,00 0,00	173.279.097.352,00 0,00	99,80 0,00	0,00 400,00	0,00 336,00	84,00 84,00
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan - Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	3.483.000.000,00 0,00	3.420.885.170,00 0,00	98,22 0,00	0,00 947,00	0,00 662,90	70,00 70,00
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan - Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	6.570.607.360,00 0,00	5.650.889.700,00 0,00	86,00 0,00	0,00 20,00	0,00 20,00	100,00 100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>255.890.898.948,00</b>	<b>253.115.689.272,00</b>	<b>98,92</b>			<b>44,98</b>

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

KODE	URAIAN	PAGU DANA (Rp.)	REAL. KEUANGAN		TARGET FISIK	REAL. FISIK	
			(Rp.)	(%)		K	(%)
1	2	4	5	6	7	8	6
2.14	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>34.294.588.640,00</b>	<b>23.462.038.433,00</b>	<b>68,41</b>	0,00	0,00	<b>62,88</b>
2.14.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>20.757.050.340,00</b>	<b>16.794.201.691,00</b>	<b>80,91</b>	0,00	0,00	<b>100,00</b>
	- <i>Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	- <i>Terlaksananya Pembayaran ASN yang menerima gaji dan tunjangan selama 12 bulan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	336.475.340,00	304.443.750,00	90,48	0,00	0,00	100,00
2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	276.475.340,00	256.942.250,00	92,93	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	100,00
2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	60.000.000,00	47.501.500,00	79,17	0,00	0,00	100,00
	- <i>Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD</i>	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.270.575.000,00	15.789.216.325,00	81,93	0,00	0,00	50,00

2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.170.575.000,00	15.707.703.125,00	81,94	0,00	0,00	0,00
	- <i>Terlaksananya Pembayaran ASN yang menerima gaji dan tunjangan selama 12 bulan</i>	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00
2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD	100.000.000,00	81.513.200,00	81,51	0,00	0,00	100,00
	- <i>Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD</i>	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	593.000.000,00	377.234.049,00	63,61	0,00	0,00	105,00
2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000,00	181.815.000,00	90,91	0,00	0,00	200,00
	- <i>jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor</i>	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	200,00
2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000,00	42.497.400,00	84,99	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	94.500.000,00	72.150.000,00	76,35	0,00	0,00	50,00
	- <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	50,00
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	248.500.000,00	80.771.649,00	32,50	0,00	0,00	70,00
	- <i>Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi PD</i>	0,00	0,00	0,00	10,00	7,00	70,00
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	302.000.000,00	185.221.872,00	61,33	0,00	0,00	50,00

2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	302.000.000,00	185.221.872,00	61,33	0,00	0,00	50,00
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	50,00
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	255.000.000,00	138.085.695,00	54,15	0,00	0,00	71,27
2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.000.000,00	5.163.400,00	7,82	0,00	0,00	60,98
	- Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	0,00	0,00	0,00	82,00	50,00	60,98
2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124.000.000,00	90.124.695,00	72,68	0,00	0,00	69,51
	- Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	0,00	0,00	0,00	82,00	57,00	69,51
2.14.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.000.000,00	42.797.600,00	65,84	0,00	0,00	83,33
	- tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0,00	0,00	0,00	12,00	10,00	83,33
2.14.02	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>658.618.000,00</b>	<b>599.849.142,00</b>	<b>91,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	- Tersedianya Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	- Selarasnya Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	192.620.000,00	188.635.000,00	97,93	0,00	0,00	100,00

2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota - <i>Jumlah Dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK)</i>	127.620.000,00  0,00	124.742.500,00  0,00	97,75  0,00	0,00  1,00	0,00  1,00	100,00  100,00
2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal - <i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal</i>	65.000.000,00  0,00	63.892.500,00  0,00	98,30  0,00	0,00  5,00	0,00  5,00	100,00  100,00
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	465.998.000,00	411.214.142,00	88,24	0,00	0,00	92,50
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga - <i>tersedianya dokumen pendataan keluarga</i>	112.200.000,00  0,00	112.200.000,00  0,00	100,00  0,00	0,00  1,00	0,00  1,00	100,00  100,00
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB - <i>Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB</i>	183.380.000,00  0,00	166.343.816,00  0,00	90,71  0,00	0,00  1,00	0,00  1,00	100,00  100,00
2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	95.418.000,00	58.872.176,00	61,70	0,00	0,00	70,00

	- Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana \$Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	0,00	0,00	0,00	10,00	7,00	70,00
2.14.02.2.02.0019	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	75.000.000,00	73.798.150,00	98,40	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
2.14.03	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>11.979.085.000,00</b>	<b>5.754.745.470,00</b>	<b>48,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	- Meningkatnya Penggunaan KB & MKJP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	- Terlaksananya Advokasi Program Banggakencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada stakeholders dan mitra kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	- Cakupan Peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota dalam Pelaksanaan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	909.480.000,00	681.739.340,00	74,96	0,00	0,00	16,30
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	138.480.000,00	55.389.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00

	- Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	156.000.000,00	122.820.240,00	78,73	0,00	0,00	0,00
	- Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	345.000.000,00	311.770.000,00	90,37	0,00	0,00	50,00
	- Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	50,00
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	50.000.000,00	13.605.100,00	27,21	0,00	0,00	0,00
	- Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	70.000.000,00	32.205.000,00	46,01	0,00	0,00	0,00
	- Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	150.000.000,00	145.950.000,00	97,30	0,00	0,00	47,83

	- Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana \$Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	0,00	0,00	0,00	23,00	11,00	47,83
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	6.198.440.000,00	3.478.834.000,00	56,12	0,00	0,00	26,74
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	611.000.000,00	344.400.000,00	56,37	0,00	0,00	30,23
	- Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan ( IMP)	0,00	0,00	0,00	215,00	65,00	30,23
2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	45.000.000,00	40.104.000,00	89,12	0,00	0,00	0,00
	- Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	5.542.440.000,00	3.094.330.000,00	55,83	0,00	0,00	50,00
	- Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	0,00	0,00	0,00	12,00	6,00	50,00
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	4.407.465.000,00	1.537.352.130,00	34,88	0,00	0,00	67,43
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	90.500.000,00	47.004.250,00	51,94	0,00	0,00	0,00
	- Jumlah Alat dan Obat Kontrasepsi serta sarana penunjang Pelayanan KB	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.650.505.000,00	503.768.200,00	19,01	0,00	0,00	100,00
	- Meningkatnya Pelayanan IUD Implant pada Kegiatan Gebyar Pelayanan KB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	- Meningkatnya Pelayanan IUD Implant pada Kegiatan TMKK	0,00	0,00	0,00	5.000,00	333,00	6,66

	- Meningkatkan Pelayanan IUD Implant pada Kegiatan Kampung KB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	- Meningkatkan Pelayanan IUD Implant pada Kegiatan Bakti IBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	- Meningkatkan Pelayanan MOW-MOP di Kabupaten Bekasi	0,00	0,00	0,00	10,00	5,00	50,00
	- Meningkatkan Pelayanan IUD Implant pada Kegiatan TMKK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	- Meningkatkan Pelayanan IUD Implant pada Kegiatan Gebyar Pelayanan KB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.586.460.000,00	920.199.400,00	58,00	0,00	0,00	2,47
	- Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB	0,00	0,00	0,00	81,00	2,00	2,47
2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	80.000.000,00	66.380.280,00	82,98	0,00	0,00	82,64
	- Jumlah Peserta KB yang mengikuti pembinaan pasca pelayanan	0,00	0,00	0,00	121,00	100,00	82,64
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	463.700.000,00	56.820.000,00	12,25	0,00	0,00	20,00

2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB  - Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	202.500.000,00  0,00	6.120.000,00  0,00	3,02  0,00	0,00  1,00	0,00  0,40	40,00  40,00
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas  - Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	261.200.000,00  0,00	50.700.000,00  0,00	19,41  0,00	0,00  6,00	0,00  0,00	0,00  0,00
2.14.04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b> - Cakupan Jumlah kelompok Bina Keluarga Balita, (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), UPPKS	<b>899.835.300,00</b>  0,00	<b>313.242.130,00</b>  0,00	<b>34,81</b>  0,00	0,00  0,00	0,00  0,00	<b>100,00</b>  100,00
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	858.035.300,00	313.242.130,00	36,51	0,00	0,00	27,52
2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) - Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	200.000.000,00  0,00	174.490.330,00  0,00	87,25  0,00	0,00  1,00	0,00  1,00	100,00  100,00
2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas - Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	55.000.000,00  0,00	44.006.800,00  0,00	80,01  0,00	0,00  23,00	0,00  12,00	52,17  52,17

2.14.04.2.01.0016	<p>Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)</li> </ul>	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.0017	<p>Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</li> </ul>	98.598.000,00	29.300.000,00	29,72	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.0018	<p>Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia</li> </ul>	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.0019	<p>Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga \$BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK6R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)</li> </ul>	100.000.000,00	45.460.000,00	45,46	0,00	0,00	45,53
		0,00	0,00	0,00	380,00	173,00	45,53
2.14.04.2.01.0021	<p>Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)</li> </ul>	57.837.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.0024	<p>Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana \$Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

	<i>Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan</i>						
2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberda - <i>Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk</i>	37.000.000,00	19.985.000,00	54,01	0,00	0,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	8,00	4,00	50,00
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	41.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) - <i>Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) - <i>Jumlah Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)</i>	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>34.294.588.640,00</b>	<b>23.462.038.433,00</b>	<b>68,41</b>			<b>62,88</b>

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE	URAIAN	PAGU DANA (Rp.)	REAL. KEUANGAN		TARGET FISIK	REAL. FISIK	
			(Rp.)	(%)		K	(%)
1	2	4	5	6	7	8	6

2.09	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>	<b>2.104.516.000,00</b>	<b>2.069.876.209,00</b>	<b>98,35</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>100,00</b>
2.09.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>2.104.516.000,00</b>	<b>2.069.876.209,00</b>	<b>98,35</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>100,00</b>
	- <i>Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86,90</i>	<i>86,90</i>	<i>100,00</i>
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.104.516.000,00	2.069.876.209,00	98,35	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
	- <i>Jumlah laporan Skor PPH</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>100,00</i>
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.735.026.000,00	1.706.246.109,00	98,34	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
	- <i>Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>100,00</i>
2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	369.490.000,00	363.630.100,00	98,41	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
	- <i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>100,00</i>
<b>JUMLAH</b>		<b>2.104.516.000,00</b>	<b>2.069.876.209,00</b>	<b>98,35</b>			<b>100,00</b>

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

KODE	URAIAN	PAGU DANA (Rp.)	REAL. KEUANGAN		TARGET FISIK	REAL. FISIK	
			(Rp.)	(%)		K	(%)
1	2	4	5	6	7	8	6
2.11	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>5.610.169.240,00</b>	<b>4.923.122.421,00</b>	<b>87,75</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>92,11</b>
2.11.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>655.991.000,00</b>	<b>650.680.000,00</b>	<b>99,19</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00</b>
	- <i>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,00

2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD - <i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD</i>	25.000.000,00 0,00	25.000.000,00 0,00	100,00 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00
2.11.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran - <i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	25.000.000,00 0,00	25.000.000,00 0,00	100,00 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	252.500.000,00	252.000.000,00	99,80	0,00	0,00	100,00
2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - <i>Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</i>	252.500.000,00 0,00	252.000.000,00 0,00	99,80 0,00	0,00 72,00	0,00 72,00	100,00 100,00
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	353.491.000,00	348.680.000,00	98,64	0,00	0,00	100,00
2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	353.491.000,00 0,00	348.680.000,00 0,00	98,64 0,00	0,00 24,00	0,00 24,00	100,00 100,00
2.11.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>1.706.200.000,00</b>	<b>1.597.008.925,00</b>	<b>93,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	1.306.200.000,00	1.279.833.495,00	97,98	0,00	0,00	100,00
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota - <i>Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten / Kota</i>	756.200.000,00 0,00	744.764.035,00 0,00	98,49 0,00	0,00 3,00	0,00 3,00	100,00 100,00
2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota - <i>Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan</i>	550.000.000,00 0,00	535.069.460,00 0,00	97,29 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00

2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	400.000.000,00	317.175.430,00	79,29	0,00	0,00	100,00
2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang - Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	400.000.000,00 0,00	317.175.430,00 0,00	79,29 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00
2.11.03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>797.280.000,00</b>	<b>779.184.516,00</b>	<b>97,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	447.280.000,00	438.575.516,00	98,05	0,00	0,00	100,00
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	447.280.000,00 0,00	438.575.516,00 0,00	98,05 0,00	0,00 2,00	0,00 2,00	100,00 100,00
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat - Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten Bekasi	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	350.000.000,00	340.609.000,00	97,32	0,00	0,00	100,00
2.11.03.2.03.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi - Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	350.000.000,00 0,00	340.609.000,00 0,00	97,32 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00
2.11.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>297.450.000,00</b>	<b>279.748.500,00</b>	<b>94,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

	- <i>Persentase Taman Keaneekaragaman Hayati</i>	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	100,00
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	297.450.000,00	279.748.500,00	94,05	0,00	0,00	100,00
2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati - <i>Jumlah Dokumen Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati</i>	297.450.000,00 0,00	279.748.500,00 0,00	94,05 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00
2.11.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>347.218.310,00</b>	<b>86,80</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000,00	347.218.310,00	86,80	0,00	0,00	100,00
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - <i>Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi</i>	400.000.000,00 0,00	347.218.310,00 0,00	86,80 0,00	0,00 50,00	0,00 50,00	100,00 100,00
2.11.08	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>116.782.720,00</b>	<b>97,32</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	120.000.000,00	116.782.720,00	97,32	0,00	0,00	100,00
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat - <i>Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH</i>	120.000.000,00 0,00	116.782.720,00 0,00	97,32 0,00	0,00 120,00	0,00 120,00	100,00 100,00

2.11.10	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>243.248.240,00</b>	<b>240.261.610,00</b>	<b>98,77</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00</b>
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	243.248.240,00	240.261.610,00	98,77	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota - <i>Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani</i>	243.248.240,00 <i>0,00</i>	240.261.610,00 <i>0,00</i>	98,77 <i>0,00</i>	<i>0,00</i> <i>50,00</i>	<i>0,00</i> <i>50,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
2.11.11	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b> - <i>Persentase pengelolaan limbah non B3 sesuai dengan standar ketentuan teknis</i>	<b>1.390.000.000,00</b> <i>0,00</i>	<b>912.237.840,00</b> <i>0,00</i>	<b>65,63</b> <i>0,00</i>	<i>0,00</i> <i>30,00</i>	<i>0,00</i> <i>30,00</i>	<b>100,00</b> <i>100,00</i>
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	770.000.000,00	341.591.000,00	44,36	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	50,00
2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota - <i>Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan</i>	770.000.000,00 <i>0,00</i>	341.591.000,00 <i>0,00</i>	44,36 <i>0,00</i>	<i>0,00</i> <i>4,00</i>	<i>0,00</i> <i>2,00</i>	50,00 <i>50,00</i>
2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	620.000.000,00	570.646.840,00	92,04	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
2.11.11.2.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah - <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah</i>	620.000.000,00 <i>0,00</i>	570.646.840,00 <i>0,00</i>	92,04 <i>0,00</i>	<i>0,00</i> <i>69,00</i>	<i>0,00</i> <i>69,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
<b>JUMLAH</b>		<b>5.610.169.240,00</b>	<b>4.923.122.421,00</b>	<b>87,75</b>			<b>92,11</b>

**Tabel 3.4. Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bekasi**

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

:

DINAS SOSIAL

KODE	URAIAN	PAGU DANA (Rp.)	REAL. KEUANGAN		TARGET FISIK	REAL. FISIK	
			(Rp.)	(%)		K	(%)
1	2	4	5	6	7	8	6
1.06	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>	<b>5.214.584.870,00</b>	<b>4.440.882.933,00</b>	<b>85,16</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>74,40</b>
1.06.04	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>3.745.962.120,00</b>	<b>3.430.451.183,00</b>	<b>91,58</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00</b>
	- <i>Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang diberikan bimbingan Sosial dan bantuan sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	3.745.962.120,00	3.430.451.183,00	91,58	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	99,40
	- <i>Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.620,00</i>	<i>2.567,00</i>	97,98
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	2.147.109.000,00	1.983.613.144,00	92,39	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	97,25
	- <i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.929,00</i>	<i>1.876,00</i>	97,25
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	175.640.000,00	171.640.000,00	97,72	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,00

	- Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00	100,00
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	480.300.000,00	367.575.000,00	76,53	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	100,00
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	165.000.000,00	161.960.440,00	98,16	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	100,00
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	220.000.000,00	218.021.450,00	99,10	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	100,00
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	115.000.000,00	113.179.800,00	98,42	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	100,00
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	442.913.120,00	414.461.349,00	93,58	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	100,00
1.06.05	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.06.06	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>1.468.622.750,00</b>	<b>1.010.431.750,00</b>	<b>68,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	- <i>Persentase korban dampak Bencana yang ditangani</i>	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.388.922.750,00	935.805.490,00	67,38	0,00	0,00	40,28
	- <i>Jumlah korban bencana alam dan sosial kabupaten yang mendapatkan perlindungan sosial</i>	0,00	0,00	0,00	7.800,00	1.353,00	17,35
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	688.922.750,00	316.914.400,00	46,00	0,00	0,00	3,49
	- <i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	0,00	0,00	0,00	6.680,00	233,00	3,49
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	700.000.000,00	618.891.090,00	88,41	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	100,00
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	79.700.000,00	74.626.260,00	93,63	0,00	0,00	100,00
	- <i>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten</i>	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	79.700.000,00	74.626.260,00	93,63	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>5.214.584.870,00</b>	<b>4.440.882.933,00</b>	<b>85,16</b>			<b>74,40</b>

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

:

DINAS KESEHATAN

KODE	URAIAN	PAGU DANA (Rp.)	REAL. KEUANGAN		TARGET FISIK	REAL. FISIK	
			(Rp.)	(%)		K	(%)
1	2	4	5	6	7	8	6

1.02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>774.331.625.735,00</b>	<b>727.816.412.643,00</b>	<b>93,99</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>99,55</b>
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>366.163.687.273,00</b>	<b>331.457.932.566,00</b>	<b>90,52</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>100,00</b>
	- <i>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23,40</i>	<i>23,40</i>	<i>100,00</i>
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	690.000.000,00	675.962.650,00	97,97	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
	- <i>Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan Ketentuan</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>	<i>100,00</i>
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	510.000.000,00	499.257.650,00	97,89	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
	- <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>	<i>100,00</i>
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	180.000.000,00	176.705.000,00	98,17	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
	- <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>	<i>100,00</i>
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	348.079.475.000,00	315.010.882.439,00	90,50	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	99,49
	- <i>Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	347.849.475.000,00	314.786.577.139,00	90,50	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	98,46
	- <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.625,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>98,46</i>
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD	230.000.000,00	224.305.300,00	97,52	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
	- <i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18,00</i>	<i>18,00</i>	<i>100,00</i>

1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	500.000.000,00	499.870.000,00	99,97	0,00	0,00	100,00
	- <i>Capaian Pegawai yang terlayani administrasinya kepegawaian</i>	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	500.000.000,00	499.870.000,00	99,97	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00	100,00
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.750.000.000,00	2.303.180.312,00	83,75	0,00	0,00	100,00
	- <i>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum</i>	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.300.000.000,00	1.057.452.312,00	81,34	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	100,00
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	1.450.000.000,00	1.245.728.000,00	85,91	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD</i>	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.687.212.273,00	11.855.850.000,00	93,45	0,00	0,00	100,00
	- <i>Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas/Dinas Jabatan</i>	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.687.212.273,00	8.900.000.000,00	91,87	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan</i>	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	100,00
1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000.000,00	2.955.850.000,00	98,53	0,00	0,00	100,00

	- Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	900.000.000,00	716.264.200,00	79,58	0,00	0,00	100,00
	- Tercapainya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Selama 12 Bulan	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	900.000.000,00	716.264.200,00	79,58	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	257.000.000,00	100.548.965,00	39,12	0,00	0,00	72,50
	- Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan perorangan dinas/ dinas jabatan yang terpelihara	0,00	0,00	0,00	100,00	75,00	75,00
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	257.000.000,00	100.548.965,00	39,12	0,00	0,00	70,00
	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0,00	0,00	0,00	30,00	21,00	70,00
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	300.000.000,00	295.374.000,00	98,46	0,00	0,00	100,00
	- Meningkatnya Pelayanan BLUD di FKTP	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	300.000.000,00	295.374.000,00	98,46	0,00	0,00	100,00

	- Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	100,00
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>404.012.316.162,00</b>	<b>392.287.346.662,00</b>	<b>97,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,09</b>
	- Persentase pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan rumah sakit dan FKTP sesuai standar	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	- Kabupaten/ Kota Sehat	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	200,00
	- Persentase fasilitas kesehatan yang terpenuhi kebutuhan alkes sesuai standar	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	- Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	- Persentase warga negara usia 60 tahun Ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

	- <i>Persentase kasus Penyakit Menular &amp; Penyakit Tidak menular yang berhasil tertangani</i>	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	- <i>Prevalensi stunting</i>	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	100,00
	- <i>Persentase desa yang melaksanakan STBM</i>	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	100,00
	- <i>Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan primer dan sekunder sesuai standar</i>	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	100,00
	- <i>Jumlah Angka Kematian Ibu</i>	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	100,00
	- <i>Jumlah Angka Kematian Bayi</i>	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6.228.713.344,00	5.529.681.400,00	88,78	0,00	0,00	100,00
	- <i>Terpenuhinya kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP di Kabupaten</i>	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	307.720.000,00	284.282.400,00	92,38	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar</i>	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.558.200.000,00	2.939.769.900,00	82,62	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan</i>	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00
1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	200.000.000,00	185.719.000,00	92,86	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/ Regional Maintenance Center</i>	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00

1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	225.000.000,00 0,00	183.710.000,00 0,00	81,65 0,00	0,00 110,00	0,00 110,00	100,00 100,00
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit - Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	100.000.000,00 0,00	98.964.500,00 0,00	98,96 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1.801.593.344,00 0,00	1.801.038.600,00 0,00	99,97 0,00	0,00 4,00	0,00 4,00	100,00 100,00
1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga - Jumlah Keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	36.200.000,00 0,00	36.197.000,00 0,00	99,99 0,00	0,00 46.000,00	0,00 46.000,00	100,00 100,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pesentase Masyarakat yang Mendapatkan pelayanan kesehatan di daerah	397.263.602.818,00 0,00	386.268.690.812,00 0,00	97,23 0,00	0,00 100,00	0,00 100,00	97,77 100,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	428.000.000,00 0,00	419.696.450,00 0,00	98,06 0,00	0,00 80.650,00	0,00 80.650,00	100,00 100,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	192.140.000,00	190.069.600,00	98,92	0,00	0,00	100,00

	- Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0,00	0,00	0,00	76.950,00	76.950,00	100,00
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.438.936.320,00	1.421.993.720,00	98,82	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	100,00
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	440.000.000,00	436.366.200,00	99,17	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0,00	0,00	0,00	232.500,00	232.500,00	100,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	168.000.000,00	160.600.000,00	95,60	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	100,00
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	799.200.000,00	754.036.000,00	94,35	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai standar	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	128.000.000,00	126.026.000,00	98,46	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0,00	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00	100,00
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	236.350.000,00	219.701.450,00	92,96	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	6.717.544.100,00	6.589.914.200,00	98,10	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	150.000.000,00	149.757.000,00	99,84	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00

1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - <i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>	2.166.002.800,00 0,00	874.663.600,00 0,00	40,38 0,00	0,00 39.873,00	0,00 30.000,00	75,24 75,24
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV - <i>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>	600.000.000,00 0,00	570.135.850,00 0,00	95,02 0,00	0,00 18.516,00	0,00 18.516,00	100,00 100,00
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana - <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar</i>	800.000.000,00 0,00	792.619.600,00 0,00	99,08 0,00	0,00 5,00	0,00 5,00	100,00 100,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - <i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat</i>	4.879.597.620,00 0,00	4.805.642.400,00 0,00	98,48 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i>	90.000.000,00 0,00	89.809.080,00 0,00	99,79 0,00	0,00 2,00	0,00 2,00	100,00 100,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>	1.152.295.000,00 0,00	1.142.572.680,00 0,00	99,16 0,00	0,00 3,00	0,00 3,00	100,00 100,00
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan - <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan pelayanan Promosi Kesehatan</i>	425.679.850,00 0,00	416.760.000,00 0,00	97,90 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya - <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan</i>	50.000.000,00 0,00	49.867.000,00 0,00	99,73 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00

	<i>Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya</i>						
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.097.420.000,00	2.041.495.700,00	97,33	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	100,00
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	120.000.000,00	119.835.000,00	99,86	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	155.928.800,00	145.185.000,00	93,11	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4.921.951.486,00	3.478.506.000,00	70,67	0,00	0,00	88,89
	- Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	0,00	0,00	9,00	8,00	88,89
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	367.122.768.842,00	359.408.773.082,00	97,90	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	88.032.000,00	23.194.000,00	26,35	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa Ke Laboratorium Rujukan / Nasional Yang Didistribusikan	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	250.000.000,00	238.030.750,00	95,21	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00

1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	130.000.000,00 0,00	129.572.000,00 0,00	99,67 0,00	0,00 2,00	0,00 2,00	100,00 100,00
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - Jumlah Dokuomen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	17.350.000,00 0,00	7.150.000,00 0,00	41,21 0,00	0,00 3,00	0,00 2,00	66,67 66,67
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota - Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1.315.550.000,00 0,00	1.284.793.000,00 0,00	97,66 0,00	0,00 109,00	0,00 109,00	100,00 100,00
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah - Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	150.000.000,00 0,00	149.664.450,00 0,00	99,78 0,00	0,00 3,00	0,00 3,00	100,00 100,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak - Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	32.856.000,00 0,00	32.261.000,00 0,00	98,19 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan yang Terintegrasi	420.000.000,00 0,00	419.624.450,00 0,00	99,91 0,00	0,00 100,00	0,00 100,00	100,00 100,00
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan - Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	420.000.000,00 0,00	419.624.450,00 0,00	99,91 0,00	0,00 4,00	0,00 4,00	100,00 100,00

1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - <i>Cakupan SPKS yang berizin dan yang dibina</i>	100.000.000,00 0,00	69.350.000,00 0,00	69,35 0,00	0,00 100,00	0,00 85,00	89,80 85,00
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya - <i>Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya</i>	100.000.000,00 0,00	69.350.000,00 0,00	69,35 0,00	0,00 407,00	0,00 385,00	94,59 94,59
1.02.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b> - <i>Persentase tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat uji kompetensi</i>	<b>1.680.422.300,00</b> 0,00	<b>1.627.261.200,00</b> 0,00	<b>96,84</b> 0,00	0,00 100,00	0,00 100,00	<b>100,00</b> 100,00
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - <i>Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar</i>	290.820.000,00 0,00	280.345.600,00 0,00	96,40 0,00	0,00 100,00	0,00 100,00	100,00 100,00
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar - <i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)</i>	49.480.000,00 0,00	49.058.000,00 0,00	99,15 0,00	0,00 130,00	0,00 130,00	100,00 100,00
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan - <i>Jumlah dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	241.340.000,00 0,00	231.287.600,00 0,00	95,83 0,00	0,00 93,00	0,00 93,00	100,00 100,00
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - <i>Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti peningkatan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan</i>	1.389.602.300,00 0,00	1.346.915.600,00 0,00	96,93 0,00	0,00 100,00	0,00 100,00	100,00 100,00

1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1.389.602.300,00 0,00	1.346.915.600,00 0,00	96,93 0,00	0,00 490,00	0,00 490,00	100,00 100,00
1.02.04	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b> - Persentase usaha Kefarmasian, alat kesehatan dan produk makanan yang memenuhi standar - Persentase usaha pengelolaan makanan berizin yang sesuai standar	<b>375.000.000,00</b> 0,00 0,00	<b>371.895.895,00</b> 0,00 0,00	<b>99,17</b> 0,00 0,00	0,00 100,00 100,00	0,00 100,00 100,00	<b>100,00</b> 100,00 100,00
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) - Persentase usaha apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang patuh memenuhi komitmen perizinan	120.000.000,00 0,00	119.708.600,00 0,00	99,76 0,00	0,00 100,00	0,00 100,00	100,00 100,00
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) - Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	120.000.000,00 0,00	119.708.600,00 0,00	99,76 0,00	0,00 2,00	0,00 2,00	100,00 100,00
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga - Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian pada Usaha Produksi, Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan PKRT Kelas 1 tertentu yang patuh memenuhi Komitmen Perizinan	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00

1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga - Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga - Persentase usaha Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang patuh memenuhi komitmen perizinan	140.000.000,00	139.094.000,00	99,35	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga - Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	140.000.000,00	139.094.000,00	99,35	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) - Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang	80.000.000,00	78.782.000,00	98,48	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

	<i>patuh memenuhi komitmen perizinan Laik Higiene Sanitasi</i>						
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) - <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</i>	80.000.000,00	78.782.000,00	98,48	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	100,00
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga - <i>Persentase usaha Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang patuh memenuhi komitmen perizinan</i>	35.000.000,00	34.311.295,00	98,03	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan - <i>Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan</i>	35.000.000,00	34.311.295,00	98,03	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	100,00
1.02.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b> - <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</i> - <i>Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitaraan dan Pemberdayaan Masyarakat</i>	<b>2.100.200.000,00</b>	<b>2.071.976.320,00</b>	<b>98,66</b>	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	100,00

	- Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	320.000.000,00	315.910.000,00	98,72	0,00	0,00	100,00
	- Persentase desa siaga aktif	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	100,00
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	320.000.000,00	315.910.000,00	98,72	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	100,00
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	440.200.000,00	420.658.120,00	95,56	0,00	0,00	100,00
	- Persentase rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	440.200.000,00	420.658.120,00	95,56	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.340.000.000,00	1.335.408.200,00	99,66	0,00	0,00	100,00
	- Persentase kecamatan melaksanakan pembinaan posyandu aktif	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.340.000.000,00	1.335.408.200,00	99,66	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00

<b>JUMLAH</b>		<b>774.331.625.735,00</b>	<b>727.816.412.643,00</b>	<b>93,99</b>			<b>99,55</b>

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN**

KODE	URAIAN	PAGU DANA (Rp.)	REAL. KEUANGAN		TARGET FISIK	REAL. FISIK	
			(Rp.)	(%)		K	(%)
1	2	4	5	6	7	8	6
1.01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>1.825.595.998.896,00</b>	<b>1.448.250.797.863,00</b>	<b>79,33</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>84,35</b>
1.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.259.380.860.346,00</b>	<b>1.011.026.926.854,00</b>	<b>80,28</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>76,25</b>
	- <i>Persentase keselarasan Renstra dengan Rencana Pembangunan Daerah, Renja dengan Renstra, dan DPA dengan Renja</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>
	- <i>Persentase terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan perangkat daerah</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>
	- <i>Persentase Pegawai yang Terpenuhi Administrasi Kepegawaian</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>
	- <i>Cakupan layanan administrasi umum yang terpenuhi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>
	- <i>Cakupan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah yang terpenuhi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2,00</i>	<i>1,00</i>	<i>50,00</i>
	- <i>Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>
	- <i>Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>
	- <i>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.291.850,00	223.515.000,00	44,68	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77,78</i>
	- <i>Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2,00</i>	<i>1,00</i>	<i>50,00</i>

		<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,</i>						
1.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57.615.550,00	38.900.000,00	67,52	0,00	0,00	66,67
		- <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	66,67
1.01.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PD	122.285.300,00	73.800.000,00	60,35	0,00	0,00	100,00
		- <i>Jumlah Dokumen RKA-PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-PD</i>	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00
1.01.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-PD	46.264.000,00	35.790.000,00	77,36	0,00	0,00	100,00
		- <i>Jumlah Dokumen DPA-PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-PD</i>	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00
1.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	187.217.000,00	47.895.000,00	25,58	0,00	0,00	83,33
		- <i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD</i>	0,00	0,00	0,00	6,00	5,00	83,33
1.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.910.000,00	27.130.000,00	31,22	0,00	0,00	66,67
		- <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	66,67
1.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.247.131.263.000,00	1.002.115.724.926,00	80,35	0,00	0,00	95,00
		- <i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Tersusun</i>	0,00	0,00	0,00	4,00	3,00	75,00
1.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.246.710.639.000,00	1.001.706.044.926,00	80,35	0,00	0,00	100,00

	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	0,00	0,00	8.752,00	8.752,00	100,00
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	420.624.000,00	409.680.000,00	97,40	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	661.500.000,00	661.500.000,00	100,00	0,00	0,00	66,67
	- Tersedianya Laporan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	661.500.000,00	661.500.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00

	- <i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	100,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.674.727.500,00	1.837.472.000,00	68,70	0,00	0,00	88,13
	- <i>Meningkatnya laporan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian</i>	0,00	0,00	0,00	100,00	65,00	65,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.609.335.000,00	1.141.110.000,00	70,91	0,00	0,00	90,00
	- <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	0,00	0,00	0,00	10,00	9,00	90,00
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	296.450.000,00	97.042.000,00	32,73	0,00	0,00	50,00
	- <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	0,00	0,00	0,00	4,00	2,00	50,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	768.942.500,00	599.320.000,00	77,94	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD</i>	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada PD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada PD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.086.940.496,00	5.912.598.996,00	73,11	0,00	0,00	66,67
	- Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000,00	97.564.596,00	65,04	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.936.940.496,00	5.815.034.400,00	73,27	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	326.137.500,00	276.115.932,00	84,66	0,00	0,00	88,89
	- Kendaraan Perorangan Dinas / Dinas Jabatan yang terpelihara	0,00	0,00	0,00	6,00	5,00	83,33
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	126.137.500,00	77.393.742,00	61,36	0,00	0,00	83,33
	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0,00	0,00	0,00	6,00	5,00	83,33
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	198.722.190,00	99,36	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00

1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>565.016.769.050,00</b>	<b>436.185.987.009,00</b>	<b>77,20</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>95,00</b>
	- <i>Persentase anak usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>85,00</i>	<i>85,00</i>
	- <i>Rata-rata Kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2,01</i>	<i>2,01</i>	<i>100,00</i>
	- <i>Persentase anak putus sekolah yang berpartisipasi dalam pendidikan Non Formal</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64,70</i>	<i>64,70</i>	<i>100,00</i>
	- <i>Persentase anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>85,00</i>	<i>85,00</i>
	- <i>Rata-rata Kemampuan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2,01</i>	<i>2,01</i>	<i>100,00</i>
	- <i>Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>100,00</i>
	- <i>Cakupan guru yang berkualitas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>85,00</i>	<i>85,00</i>

	- Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00
	- Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	0,00	0,00	0,00	62,52	62,52	100,00
	- Pertumbuhan Proporsi guru PAUD formal dengan kualifikasi S1/DIV	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	100,00
	- Rasio pengawas pemilik PAUD	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	100,00
	- Persentase Pendidikan Informal	0,00	0,00	0,00	100,00	85,00	85,00
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	389.037.420.900,00	305.818.302.687,00	78,61	0,00	0,00	79,17
	- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	12.000.000.000,00	11.570.320.120,00	96,42	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00	100,00
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa - Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.671.843.500,00 0,00	1.199.066.500,00 0,00	71,72 0,00	0,00 1.227,00	0,00 1.227,00	100,00 100,00
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar - Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	127.501.892.400,00 0,00	115.009.359.600,00 0,00	90,20 0,00	0,00 6.528,00	0,00 6.528,00	100,00 100,00
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar - Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.423.065.000,00 0,00	915.793.500,00 0,00	64,35 0,00	0,00 887,00	0,00 887,00	100,00 100,00
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah - Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	450.000.000,00 0,00	396.265.000,00 0,00	88,06 0,00	0,00 740,00	0,00 740,00	100,00 100,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar - Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS	243.735.620.000,00 0,00	175.544.311.967,00 0,00	72,02 0,00	0,00 712,00	0,00 712,00	100,00 100,00
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar - Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan	100.000.000,00 0,00	98.210.000,00 0,00	98,21 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00

	<i>Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>						
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	50.000.000,00	48.947.000,00	97,89	0,00	0,00	50,00
	- Jumlah Kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	50,00
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	1.105.000.000,00	1.036.029.000,00	93,76	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar	0,00	0,00	0,00	212,00	212,00	100,00
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	171.879.867.850,00	126.921.671.122,00	73,84	0,00	0,00	83,33
	- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	9.000.000.000,00	6.805.730.640,00	75,62	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00	100,00
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.881.761.000,00	1.481.338.000,00	78,72	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0,00	0,00	0,00	5.077,00	5.077,00	100,00
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	54.846.165.600,00	49.000.152.800,00	89,34	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0,00	0,00	0,00	2.861,00	2.861,00	100,00
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	679.189.000,00	669.666.000,00	98,60	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian	0,00	0,00	0,00	887,00	887,00	100,00

		<i>Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>						
1.01.02.2.02.0041		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	345.740.000,00	337.500.000,00	97,62	0,00	0,00	100,00
		- Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	100,00
1.01.02.2.02.0042		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	102.539.400.000,00	67.734.679.682,00	66,06	0,00	0,00	100,00
		- Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mengelola Dana BOS	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	100,00
1.01.02.2.02.0043		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	241.520.000,00	182.160.000,00	75,42	0,00	0,00	100,00
		- Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	100,00
1.01.02.2.02.0051		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100.000.000,00	98.230.000,00	98,23	0,00	0,00	100,00
		- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
1.01.02.2.02.0052		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	50.000.000,00	49.164.000,00	98,33	0,00	0,00	100,00
		- Jumlah Kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
1.01.02.2.02.0058		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	696.092.250,00	563.050.000,00	80,89	0,00	0,00	100,00
		- Jumlah Peserta Didik yang mengikuti proses belajar	0,00	0,00	0,00	407,00	407,00	100,00
1.01.02.2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2.787.375.900,00	2.706.461.000,00	97,10	0,00	0,00	87,50
		- Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	0,00	0,00	0,00	1.246,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.0012		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	186.885.000,00	164.500.000,00	88,02	0,00	0,00	100,00
		- Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	100,00
1.01.02.2.03.0013		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	377.865.000,00	374.521.000,00	99,12	0,00	0,00	100,00

		- Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	100,00
1.01.02.2.03.0015		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	319.262.400,00	292.192.000,00	91,52	0,00	0,00	100,00
		- Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	100,00
1.01.02.2.03.0016		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	888.009.500,00	878.858.000,00	98,97	0,00	0,00	100,00
		- Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0,00	0,00	0,00	935,00	935,00	100,00
1.01.02.2.03.0017		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	271.894.000,00	268.149.000,00	98,62	0,00	0,00	100,00
		- Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00
1.01.02.2.03.0019		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	193.460.000,00	190.310.000,00	98,37	0,00	0,00	100,00
		- Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.01.02.2.03.0026		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	550.000.000,00	537.931.000,00	97,81	0,00	0,00	100,00
		- Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
1.01.02.2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.312.104.400,00	739.552.200,00	56,36	0,00	0,00	87,50
		- Pengelolaan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.0010		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Jumlah Peserta Didik Non Formal / Kesetaraan yang menerima biaya personal peserta didik	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00

1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - <i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>	387.860.400,00 0,00	341.905.200,00 0,00	88,15 0,00	0,00 25,00	0,00 25,00	100,00 100,00
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - <i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>	137.732.000,00 0,00	136.750.000,00 0,00	99,29 0,00	0,00 213,00	0,00 426,00	200,00 200,00
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan - <i>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>	88.592.000,00 0,00	88.049.000,00 0,00	99,39 0,00	0,00 100,00	0,00 100,00	100,00 100,00
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan - <i>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan</i>	47.920.000,00 0,00	43.700.000,00 0,00	91,19 0,00	0,00 100,00	0,00 100,00	100,00 100,00
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan - <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan - <i>Jumlah Kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang pendidikan yang dilaksanakan</i>	150.000.000,00 0,00	129.148.000,00 0,00	86,10 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00
1.01.03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b> - <i>Cakupan Kurikulum Satuan Pendidikan Yang Relevan</i>	<b>916.297.500,00</b> 0,00	<b>765.268.000,00</b> 0,00	<b>83,52</b> 0,00	0,00 100,00	0,00 73,00	<b>73,00</b> 73,00

1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	713.597.500,00	604.974.000,00	84,78	0,00	0,00	91,07
	- <i>Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</i>	0,00	0,00	0,00	1.011,00	650,00	64,29
1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	46.198.000,00	45.892.000,00	99,34	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun</i>	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	268.664.000,00	268.159.000,00	99,81	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya</i>	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	100,00
1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	398.735.500,00	290.923.000,00	72,96	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersusun</i>	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	202.700.000,00	160.294.000,00	79,08	0,00	0,00	50,00
	- <i>Pengelolaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal</i>	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	202.700.000,00	160.294.000,00	79,08	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal yang tersusun</i>	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00
1.01.04	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>282.072.000,00</b>	<b>272.616.000,00</b>	<b>96,65</b>	0,00	0,00	<b>100,00</b>
	- <i>Presentase pemenuhan pemerataan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan</i>	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	282.072.000,00	272.616.000,00	96,65	0,00	0,00	100,00
	- <i>Persentase Satuan Pendidikan Yang Dihitung / Dipetakan Dan Ditata Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan</i>	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	132.470.500,00	127.070.500,00	95,92	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	149.601.500,00	145.545.500,00	97,29	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.825.595.998.896,00</b>	<b>1.448.250.797.863,00</b>	<b>79,33</b>			<b>84,35</b>

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

KODE	URAIAN	PAGU DANA (Rp.)	REAL. KEUANGAN		TARGET FISIK	REAL. FISIK	
			(Rp.)	(%)		K	(%)
1	2	4	5	6	7	8	6

1.03	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>286.513.876.928,00</b>	<b>278.940.994.744,00</b>	<b>97,36</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>62,81</b>
1.03.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>33.573.408.480,00</b>	<b>28.601.685.217,00</b>	<b>85,19</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00</b>
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	721.485.000,00	648.939.756,00	89,95	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	40,15
	- Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11,00</i>	<i>7,00</i>	<i>63,64</i>
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	201.920.000,00	196.919.910,00	97,52	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	63,64
	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11,00</i>	<i>7,00</i>	<i>63,64</i>
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	429.425.000,00	386.629.846,00	90,03	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	33,33
	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6,00</i>	<i>2,00</i>	<i>33,33</i>
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.140.000,00	65.390.000,00	72,54	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
	- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.654.252.000,00	19.345.390.623,00	85,39	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	88,08
	- Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4,00</i>	<i>3,00</i>	<i>75,00</i>
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.428.504.000,00	19.120.022.933,00	85,25	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	77,32
	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,00</i>	<i>75,00</i>	<i>77,32</i>

1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan PD - <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan PD</i>	104.210.000,00 0,00	104.099.720,00 0,00	99,89 0,00	0,00 2,00	0,00 2,00	100,00 100,00
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD - <i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD</i>	121.538.000,00 0,00	121.267.970,00 0,00	99,78 0,00	0,00 2,00	0,00 2,00	100,00 100,00
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - <i>Terkelolanya Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	945.703.200,00 0,00	752.571.050,00 0,00	79,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	68,18 100,00
1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - <i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	945.703.200,00 0,00	752.571.050,00 0,00	79,58 0,00	0,00 11,00	0,00 4,00	36,36 36,36
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah - <i>Tersedianya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah selama 12 bulan</i>	1.989.619.600,00 0,00	1.908.117.735,00 0,00	95,90 0,00	0,00 100,00	0,00 75,00	43,57 75,00
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1.339.239.600,00 0,00	1.300.302.915,00 0,00	97,09 0,00	0,00 42,00	0,00 39,00	92,86 92,86
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	50.000.000,00 0,00	49.791.000,00 0,00	99,58 0,00	0,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00

1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD - <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD</i>	500.380.000,00 0,00	461.719.980,00 0,00	92,27 0,00	0,00 12,00	0,00 6,00	50,00 50,00
1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD - <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD</i>	100.000.000,00 0,00	96.303.840,00 0,00	96,30 0,00	0,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - <i>Jumlah barang milik daerah yang diadakan dalam satu tahun</i>	968.672.000,00 0,00	895.210.000,00 0,00	92,42 0,00	0,00 24,00	0,00 20,00	31,48 83,33
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel - <i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	350.000.000,00 0,00	345.370.000,00 0,00	98,68 0,00	0,00 25,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan</i>	618.672.000,00 0,00	549.840.000,00 0,00	88,87 0,00	0,00 18,00	0,00 2,00	11,11 11,11
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - <i>Jumlah barang milik daerah yang diadakan dalam satu tahun</i>	3.839.067.600,00 0,00	2.713.989.562,00 0,00	70,69 0,00	0,00 4,00	0,00 2,00	55,00 50,00
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	2.575.782.000,00 0,00	1.602.623.332,00 0,00	62,22 0,00	0,00 4,00	0,00 3,00	75,00 75,00
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1.263.285.600,00 0,00	1.111.366.230,00 0,00	87,97 0,00	0,00 5,00	0,00 2,00	40,00 40,00
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - <i>Jumlah barang milik daerah yang dipeliharaan dalam satu tahun</i>	2.454.609.080,00 0,00	2.337.466.491,00 0,00	95,23 0,00	0,00 32,00	0,00 16,00	48,06 50,00

1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	182.193.500,00 0,00	160.425.660,00 0,00	88,05 0,00	0,00 15,00	0,00 3,00	20,00 20,00
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.130.000.000,00 0,00	1.122.629.399,00 0,00	99,35 0,00	0,00 18,00	0,00 17,00	94,44 94,44
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.142.415.580,00 0,00	1.054.411.432,00 0,00	92,30 0,00	0,00 18,00	0,00 5,00	27,78 27,78
1.03.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b> - Persentase Penanganan Banjir - Persentase Penanganan kekeringan - Meningkatnya pengembangan sistem irigasi yang luasnya dibawah 10000 Ha dalam 1 daerah kabupaten/kota	<b>17.787.350.092,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>17.678.776.696,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>99,39</b> 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	<b>100,00</b> 100,00 100,00 100,00
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Upaya Penanganan Banjir dan kekeringan	17.614.370.092,00 0,00	17.505.796.696,00 0,00	99,38 0,00	0,00 6,00	0,00 4,00	31,33 66,67
1.03.02.2.01.0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku - Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	5.476.470.000,00 0,00	5.453.715.000,00 0,00	99,58 0,00	0,00 25,00	0,00 12,00	48,00 48,00

1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya - Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	994.000.000,00 0,00	982.577.000,00 0,00	98,85 0,00	0,00 10,00	0,00 4,00	40,00 40,00
1.03.02.2.01.0124	Pembangunan Polder/Kolam Retensi - Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	6.895.000.000,00 0,00	6.880.686.600,00 0,00	99,79 0,00	0,00 3,00	0,00 1,00	33,33 33,33
1.03.02.2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku - Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	2.406.400.092,00 0,00	2.371.390.765,00 0,00	98,55 0,00	0,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya - Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1.842.500.000,00 0,00	1.817.427.331,00 0,00	98,64 0,00	0,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Dokumen sistem irigasi yang luasnya dibawah 1000 HA	172.980.000,00 0,00	172.980.000,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
1.03.02.2.02.0031	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa - Jumlah Kawasan Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi	172.980.000,00 0,00	172.980.000,00 0,00	100,00 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00
1.03.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>9.846.113.957,00</b>	<b>9.770.915.562,00</b>	<b>99,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

	- <i>Presentase Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	9.846.113.957,00	9.770.915.562,00	99,24	0,00	0,00	36,29
	- <i>Jumlah sambungan rumah terpasang</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	222.000.000,00	217.363.310,00	97,91	0,00	0,00	0,00
	- <i>Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</i>	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	350.820.000,00	347.540.722,00	99,07	0,00	0,00	0,00
	- <i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun</i>	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	9.273.293.957,00	9.206.011.530,00	99,27	0,00	0,00	45,15
	- <i>Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</i>	0,00	0,00	0,00	1.329,00	600,00	45,15
1.03.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>2.951.876.000,00</b>	<b>2.836.178.023,00</b>	<b>96,08</b>	0,00	0,00	<b>100,00</b>
	- <i>Persentase Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.951.876.000,00	2.836.178.023,00	96,08	0,00	0,00	48,64
	- <i>Panjang sistem drainase yang terhubung langsung dengan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	<i>sungai dalam daerah kabupaten/kota</i>						
1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	2.754.876.000,00	2.640.277.023,00	95,84	0,00	0,00	45,93
	- Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	0,00	0,00	0,00	17.417,00	8.000,00	45,93
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	197.000.000,00	195.901.000,00	99,44	0,00	0,00	0,00
	- Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	0,00	0,00	0,00	3.667,00	0,00	0,00
1.03.10	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>222.355.128.399,00</b>	<b>220.053.439.246,00</b>	<b>98,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,81</b>
	- Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	0,00	0,00	0,00	87,71	84,91	96,81
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	222.355.128.399,00	220.053.439.246,00	98,96	0,00	0,00	92,29
	- Panjang drainase jalan dalam kondisi baik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	- Panjang jalan dalam kondisi baik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	- Panjang pedestrian jalan dalam kondisi baik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	707.000.000,00	703.756.083,00	99,54	0,00	0,00	90,00
	- Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	0,00	0,00	0,00	4,00	3,60	90,00
1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	18.850.419.505,00	18.117.224.382,00	96,11	0,00	0,00	93,92
	- Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	0,00	0,00	0,00	87,00	81,71	93,92
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	12.994.972.000,00	12.900.756.599,00	99,27	0,00	0,00	100,00

	- Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	100,00
1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	6.123.537.670,00	5.980.829.960,00	97,67	0,00	0,00	85,00
	- Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	0,00	0,00	0,00	3,80	3,23	85,00
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	173.625.591.864,00	173.279.097.352,00	99,80	0,00	0,00	84,00
	- Jumlah Jembatan yang Dibangun	0,00	0,00	0,00	400,00	336,00	84,00
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	3.483.000.000,00	3.420.885.170,00	98,22	0,00	0,00	70,00
	- Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	0,00	0,00	0,00	947,00	662,90	70,00
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	6.570.607.360,00	5.650.889.700,00	86,00	0,00	0,00	100,00
	- Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>286.513.876.928,00</b>	<b>278.940.994.744,00</b>	<b>97,36</b>			<b>62,81</b>

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

KODE	URAIAN	PAGU DANA (Rp.)	REAL. KEUANGAN		TARGET FISIK	REAL. FISIK	
			(Rp.)	(%)		K	(%)
1	2	4	5	6	7	8	6
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	83.921.872.279,00	83.360.083.774,00	99,33	0,00	0,00	100,00

1.03.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b> - <i>Presentase peningkatan jumlah penduduk bebas BABS</i>	<b>19.482.470.000,00</b> 0,00	<b>19.465.876.630,00</b> 0,00	<b>99,91</b> 0,00	0,00 86,48	0,00 86,48	<b>100,00</b> 100,00
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota - <i>Jumlah Pembangunan SPALD-S</i>	19.482.470.000,00 0,00	19.465.876.630,00 0,00	99,91 0,00	0,00 1.385,00	0,00 1.385,00	100,00 100,00
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat - <i>Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar</i>	18.732.470.000,00 0,00	18.716.526.000,00 0,00	99,91 0,00	0,00 1.385,00	0,00 1.385,00	100,00 100,00
1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) - <i>Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)</i>	750.000.000,00 0,00	749.350.630,00 0,00	99,91 0,00	0,00 16,00	0,00 16,00	100,00 100,00
1.03.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b> - <i>Persentase panjang drainase desa yang terbangun</i>	<b>18.551.814.600,00</b> 0,00	<b>18.414.860.921,00</b> 0,00	<b>99,26</b> 0,00	0,00 16,23	0,00 16,23	<b>100,00</b> 100,00
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota - <i>Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan</i> - <i>Jumlah Dokumen Monev Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman</i>	18.551.814.600,00 0,00 0,00	18.414.860.921,00 0,00 0,00	99,26 0,00 0,00	0,00 9.302,50 1,00	0,00 9.302,50 1,00	100,00 100,00 100,00
1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan - <i>Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun</i>	18.551.814.600,00 0,00	18.414.860.921,00 0,00	99,26 0,00	0,00 9.302,50	0,00 9.302,50	100,00 100,00
1.03.10	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b> - <i>Persentase panjang jalan desa yang terbangun</i>	<b>45.887.587.679,00</b> 0,00	<b>45.479.346.223,00</b> 0,00	<b>99,11</b> 0,00	0,00 76,49	0,00 76,49	<b>100,00</b> 100,00
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - <i>panjang jalan lingkungan permukiman yang terbangun</i>	45.887.587.679,00 0,00	45.479.346.223,00 0,00	99,11 0,00	0,00 18.831,00	0,00 18.831,00	100,00 100,00

	- jumlah dokumen money pembangunan jalan lingkungan permukiman	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan - Panjang Jalan yang Dibangun	45.887.587.679,00 0,00	45.479.346.223,00 0,00	99,11 0,00	0,00 18,30	0,00 18,30	100,00 100,00
1.04	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>254.993.670.526,00</b>	<b>240.640.601.436,00</b>	<b>94,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,54</b>
1.04.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> - Indeks Reformasi Birokrasi	<b>34.452.454.488,00</b> 0,00	<b>31.152.394.557,00</b> 0,00	<b>90,42</b> 0,00	<b>0,00</b> 84,00	<b>0,00</b> 84,00	<b>100,00</b> 100,00
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan	1.395.066.400,00 0,00	976.967.595,00 0,00	70,03 0,00	0,00 37,00	0,00 37,00	100,00 100,00
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	435.021.200,00 0,00	185.539.250,00 0,00	42,65 0,00	0,00 4,00	0,00 4,00	100,00 100,00
1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PD - Jumlah Dokumen RKA-PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-PD	23.160.000,00 0,00	22.908.500,00 0,00	98,91 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00
1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PD - Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PD	9.920.000,00 0,00	9.536.000,00 0,00	96,13 0,00	0,00 2,00	0,00 2,00	100,00 100,00
1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-PD - Jumlah Dokumen DPA-PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-PD	20.000.000,00 0,00	19.425.000,00 0,00	97,13 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00
1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- PD - Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-PD	20.000.000,00 0,00	19.572.000,00 0,00	97,86 0,00	0,00 2,00	0,00 2,00	100,00 100,00
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	749.365.200,00	619.953.795,00	82,73	0,00	0,00	100,00

	- <i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD</i>	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	100,00
1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	137.600.000,00	100.033.050,00	72,70	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	100,00
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.371.161.000,00	16.743.944.117,00	86,44	0,00	0,00	92,86
	- <i>Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah</i>	0,00	0,00	0,00	21,00	15,00	71,43
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.016.551.000,00	16.392.036.567,00	86,20	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00	100,00
1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan PD	223.310.000,00	221.982.550,00	99,41	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan PD</i>	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	100,00
1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD	131.300.000,00	129.925.000,00	98,95	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD</i>	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	100,00
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.827.364.660,00	2.791.368.195,00	98,73	0,00	0,00	100,00
	- <i>Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	100,00
1.04.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	742.929.660,00	707.083.195,00	95,17	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	100,00
1.04.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	50.000.000,00	49.850.000,00	99,70	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	100,00

1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.416.435.000,00 0,00	1.416.435.000,00 0,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 100,00	100,00 100,00
1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	618.000.000,00 0,00	618.000.000,00 0,00	100,00 0,00	0,00 70,00	0,00 70,00	100,00 100,00
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah - Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah selama 12 bulan	8.908.063.000,00 0,00	8.777.732.950,00 0,00	98,54 0,00	0,00 52,00	0,00 52,00	100,00 100,00
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6.964.223.000,00 0,00	6.847.442.250,00 0,00	98,32 0,00	0,00 44,00	0,00 44,00	100,00 100,00
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	1.943.840.000,00 0,00	1.930.290.700,00 0,00	99,30 0,00	0,00 12,00	0,00 12,00	100,00 100,00
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Tersedianya layanan jasa penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah selama 12 bulan	970.360.340,00 0,00	905.057.350,00 0,00	93,27 0,00	0,00 12,00	0,00 12,00	100,00 100,00
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	560.000.000,00 0,00	521.429.900,00 0,00	93,11 0,00	0,00 45,00	0,00 45,00	100,00 100,00
1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100.000.000,00 0,00	76.280.000,00 0,00	76,28 0,00	0,00 3,00	0,00 3,00	100,00 100,00
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	310.360.340,00 0,00	307.347.450,00 0,00	99,03 0,00	0,00 5,00	0,00 5,00	100,00 100,00
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Jumlah barang milik daerah yang dipelihara dalam setahun	980.439.088,00 0,00	957.324.350,00 0,00	97,64 0,00	0,00 142,00	0,00 142,00	100,00 100,00

1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	426.492.500,00 0,00	413.168.600,00 0,00	96,88 0,00	0,00 30,00	0,00 30,00	100,00 100,00
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	203.946.588,00 0,00	195.826.500,00 0,00	96,02 0,00	0,00 107,00	0,00 107,00	100,00 100,00
1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	350.000.000,00 0,00	348.329.250,00 0,00	99,52 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00
1.04.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b> - Persentase rumah korban bencana yang ditangani - Persentase rumah yang terkena relokasi program pemerintah daerah yang ditangani - Persentase penerbitan dokumen pertelaan rumah susun	<b>4.420.821.250,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>2.401.871.939,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>54,33</b> 0,00 0,00 0,00	0,00 100,00 100,00 100,00	0,00 100,00 100,00 100,00	<b>100,00</b> 100,00 100,00 100,00
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	150.000.000,00 0,00	114.386.000,00 0,00	76,26 0,00	0,00 12,00	0,00 12,00	100,00 100,00
1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana - Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	100.000.000,00 0,00	97.386.000,00 0,00	97,39 0,00	0,00 3,00	0,00 3,00	100,00 100,00
1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota - Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi	50.000.000,00 0,00	17.000.000,00 0,00	34,00 0,00	0,00 3,00	0,00 3,00	100,00 100,00

	<i>Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi</i>						
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	635.060.000,00	304.135.000,00	47,89	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah peserta TIM Satgas, TIM Pendamping dan Fasilitator yang terlatih	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00
1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	635.060.000,00	304.135.000,00	47,89	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.685.761.250,00	1.465.945.606,00	54,58	0,00	0,00	64,93
	- Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	64,00	36,00	56,25
	- Jumlah dokumen pengawasan dan pengendalian pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	600.000.000,00	220.000.000,00	36,67	0,00	0,00	33,33
	- Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	0,00	0,00	0,00	30,00	10,00	33,33
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	800.000.000,00	760.000.000,00	95,00	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	100,00
1.04.02.2.03.0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	497.781.250,00	485.945.606,00	97,62	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	100,00
1.04.02.2.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	787.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	900.000.000,00	497.855.333,00	55,32	0,00	0,00	100,00

	- Jumlah Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang diterbitkan	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	100,00
1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	900.000.000,00	497.855.333,00	55,32	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	50.000.000,00	19.550.000,00	39,10	0,00	0,00	66,67
	- Jumlah dokumen penerbitan SKGB	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	100,00
	- Jumlah dokumen pengawasan pengendalian perumahan	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1.04.02.2.07.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	50.000.000,00	19.550.000,00	39,10	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	100,00
1.04.03	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>4.712.190.000,00</b>	<b>4.414.108.330,00</b>	<b>93,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	- persentase penanganan kawasan kumuh yang belum terselesaikan	0,00	0,00	0,00	6,36	6,36	100,00
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	4.712.190.000,00	4.414.108.330,00	93,67	0,00	0,00	100,00
	- Tersedianya dokumen penangan permukiman kumuh, DED kawasan kumuh dan luas kawasan kumuh yang tertangani	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
	- Jumlah dokumen monev penanganan kawasan kumuh	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	500.000.000,00	491.069.500,00	98,21	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00
1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	4.212.190.000,00	3.923.038.830,00	93,14	0,00	0,00	100,00
	- Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	100,00

1.04.04	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>44.697.400.000,00</b>	<b>43.089.102.700,00</b>	<b>96,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	- <i>Persentase Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>	0,00	0,00	0,00	4,30	4,30	100,00
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	44.697.400.000,00	43.089.102.700,00	96,40	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah lokasi pencegahan kawasan kumuh</i>	0,00	0,00	0,00	133,00	133,00	100,00
	- <i>Jumlah dokumen monev pencegahan kawasan kumuh</i>	0,00	0,00	0,00	133,00	133,00	100,00
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	44.697.400.000,00	43.089.102.700,00	96,40	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki</i>	0,00	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00	100,00
1.04.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>166.710.804.788,00</b>	<b>159.583.123.910,00</b>	<b>95,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	- <i>persentase PSU yang diserahterimakan</i>	0,00	0,00	0,00	15,50	15,50	100,00
	- <i>persentase pemenuhan jalan perumahan</i>	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50	100,00
	- <i>persentase PJUL yang dibangun</i>	0,00	0,00	0,00	38,61	38,61	100,00
	- <i>Persentase taman yang dibangun</i>	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	100,00
	- <i>persentase pemenuhan drainase di perumahan</i>	0,00	0,00	0,00	14,85	14,85	100,00
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	166.710.804.788,00	159.583.123.910,00	95,72	0,00	0,00	100,00
	- <i>jumlah dokumen monev penyediaan PSU</i>	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
	- <i>Jumlah Taman lingkungan yang direvitalisasi</i>	0,00	0,00	0,00	2.664,00	2.664,00	100,00
	- <i>Panjang Drainase lingkungan perumahan yang ditingkatkan</i>	0,00	0,00	0,00	1.992,00	1.992,00	100,00
	- <i>Panjang Jalan lingkungan perumahan yang ditingkatkan</i>	0,00	0,00	0,00	6.550,00	6.550,00	100,00

	- jumlah dokumen pengawasan dan pengendalian PSU	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
	- jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU perumahan	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
	- jumlah dokumen PSU perumahan yang sudah dimanfaatkan	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	100,00
	- Jumlah PJUL yang dibangun	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	100,00
	- jumlah psu yang sudah diserahkan	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	100,00
	- Jumlah Taman Lingkungan yang dibangun	0,00	0,00	0,00	2.128,00	2.128,00	100,00
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2.900.000.000,00	2.726.816.932,00	94,03	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	100,00
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	160.240.804.788,00	153.405.607.943,00	95,73	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	100,00
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	3.420.000.000,00	3.301.719.035,00	96,54	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	100,00
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	150.000.000,00	148.980.000,00	99,32	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	100,00
2.10	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>	<b>66.934.360.078,00</b>	<b>3.715.913.393,00</b>	<b>5,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
2.10.04	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>299.440.000,00</b>	<b>225.727.049,00</b>	<b>75,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	- persentase Penyelesaian Potensi Sengketa Tanah milik pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	100,00
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	299.440.000,00	225.727.049,00	75,38	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Penyelesaian Potensi Sengketa Tanah milik Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	100,00

2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	199.440.000,00 0,00	126.311.009,00 0,00	63,33 0,00	0,00 2,00	0,00 2,00	100,00 100,00
2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00 0,00	99.416.040,00 0,00	99,42 0,00	0,00 2,00	0,00 2,00	100,00 100,00
2.10.05	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b> - Persentase pemenuhan data masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	<b>100.000.000,00</b> 0,00	<b>99.662.118,00</b> 0,00	<b>99,66</b> 0,00	0,00 52,00	0,00 52,00	<b>100,00</b> 100,00
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - jumlah dokumen Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	100.000.000,00 0,00	99.662.118,00 0,00	99,66 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00 0,00	99.662.118,00 0,00	99,66 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00
2.10.08	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b> - Persentase pengelolaan tanah kosong untuk TPU	<b>3.036.803.500,00</b> 0,00	<b>2.866.892.412,00</b> 0,00	<b>94,40</b> 0,00	0,00 25,92	0,00 25,92	<b>100,00</b> 100,00
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong - Luas tanah kosong yang dikelola untuk TPU	3.036.803.500,00 0,00	2.866.892.412,00 0,00	94,40 0,00	0,00 121,97	0,00 121,97	100,00 100,00

	- jumlah dokumen perencanaan penataan TPU	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
	- jumlah dokumen monev penataan TPU	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
2.10.08.2.02.0002	Pemanfaatan Tanah Kosong	3.036.803.500,00	2.866.892.412,00	94,40	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	100,00
2.10.10	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>63.498.116.578,00</b>	<b>523.631.814,00</b>	<b>0,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	- persentase pemenuhan target tahunan penyediaan lahan untuk kepentingan umum	0,00	0,00	0,00	40,50	40,50	100,00
	- persentase kebutuhan lahan untuk jalan yang terpenuhi	0,00	0,00	0,00	58,25	58,25	100,00
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	63.498.116.578,00	523.631.814,00	0,82	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Luas Lahan yang disediakan	0,00	0,00	0,00	42.200,00	42.200,00	100,00
	- jumlah dokumen monev pengadaan tanah untuk jalan	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
	- Jumlah dokumen penilaian ganti rugi tanah untuk jalan	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
	- Jumlah dokumen hasil pengadaan tanah untuk jalan	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
	- jumlah dokumen penilaian ganti rugi tanah untuk kepentingan umum	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
	- Jumlah dokumen hasil pengadaan tanah untuk kepentingan umum	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
	- Luas lahan untuk kepentingan umum dalam 1 tahun yang tersedia	0,00	0,00	0,00	49.411,00	49.411,00	100,00
	- Jumlah dokumen monev pengadaan tanah untuk kepentingan umum	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	63.498.116.578,00	523.631.814,00	0,82	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>405.849.902.883,00</b>	<b>327.716.598.603,00</b>	<b>80,75</b>			<b>98,51</b>

## ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

## : DINAS PEMADAM KEBAKARAN

KODE	URAIAN	PAGU DANA (Rp.)	REAL. KEUANGAN		TARGET FISIK	REAL. FISIK	
			(Rp.)	(%)		K	(%)
1	2	4	5	6	7	8	6
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	28.632.272.597,00	25.365.774.278,00	88,59	0,00	0,00	95,70
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	19.753.033.887,00	16.867.598.380,00	85,39	0,00	0,00	54,42
		0,00	0,00	0,00	74,00	40,27	54,42
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Presentase Keselarasan Renstra Dengan Rencana Pembangunan Daerah, Renja dengan Renstra dan DPA dengan Renja	306.000.000,00	292.099.100,00	95,46	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	156.000.000,00	145.535.100,00	93,29	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	100,00
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000,00	146.564.000,00	97,71	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Presentase Terpenuhi Ketersediaan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	15.610.443.000,00	13.562.484.925,00	86,88	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15.560.443.000,00	13.519.166.925,00	86,88	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	100,00

1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD - <i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD</i>	50.000.000,00 0,00	43.318.000,00 0,00	86,64 0,00	0,00 2,00	0,00 2,00	100,00 100,00
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - <i>Presentase Pegawai yang Terpenuhi Administrasi Kepegawaian</i>	295.000.000,00 0,00	294.051.000,00 0,00	99,68 0,00	0,00 100,00	0,00 100,00	100,00 100,00
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya - <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	295.000.000,00 0,00	294.051.000,00 0,00	99,68 0,00	0,00 4,00	0,00 4,00	100,00 100,00
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah - <i>Cakupan Layanan Administrasi Umum yang Terpenuhi</i>	480.000.000,00 0,00	421.500.174,00 0,00	87,81 0,00	0,00 100,00	0,00 90,00	95,17 90,00
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - <i>Jumlah Layanan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	25.000.000,00 0,00	24.981.000,00 0,00	99,92 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - <i>Jumlah Layanan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	95.000.000,00 0,00	91.003.000,00 0,00	95,79 0,00	0,00 8,00	0,00 8,00	100,00 100,00
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor - <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	60.000.000,00 0,00	45.230.000,00 0,00	75,38 0,00	0,00 4,00	0,00 3,70	92,50 92,50
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.000.000,00	59.560.800,00	79,41	0,00	0,00	93,33

	- Jumlah Layanan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0,00	0,00	0,00	3,00	2,80	93,33
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	225.000.000,00	200.725.374,00	89,21	0,00	0,00	95,16
	- Jumlah Layanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	0,00	0,00	0,00	62,00	59,00	95,16
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	190.000.000,00	182.546.000,00	96,08	0,00	0,00	100,00
	- Presentase Barang Milik Daerah yang Diadakan Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.000.000,00	182.546.000,00	96,08	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	100,00
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.235.031.760,00	1.042.710.019,00	84,43	0,00	0,00	91,67
	- Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	0,00	0,00	0,00	100,00	95,00	95,00
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.800.000,00	56.652.453,00	53,55	0,00	0,00	80,00
	- Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0,00	0,00	0,00	1,00	0,80	80,00
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.129.231.760,00	986.057.566,00	87,32	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	100,00
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.636.559.127,00	1.072.207.162,00	65,52	0,00	0,00	93,05
	- Presentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	0,00	0,00	0,00	100,00	90,00	90,00
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	100.000.000,00	65.081.602,00	65,08	0,00	0,00	80,00

	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0,00	0,00	0,00	7,00	5,60	80,00
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.316.320.427,00	801.131.760,00	60,86	0,00	0,00	94,29
	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0,00	0,00	0,00	35,00	33,00	94,29
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.238.700,00	31.552.800,00	78,41	0,00	0,00	94,00
	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0,00	0,00	0,00	5,00	4,70	94,00
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	99.038.000,00	99,04	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.000.000,00	75.403.000,00	94,25	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	100,00
1.05.04	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>8.879.238.710,00</b>	<b>8.498.175.898,00</b>	<b>95,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	- Meningkatnya Waktu tanggap penanganan kejadian kebakaran dan non kebakaran	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	100,00
	- Meningkatnya jumlah bangunan yang terproteksi terhadap bahaya kebakaran	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	100,00

	- Pencapaian ketepatan waktu petugas pada setiap kejadian	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	100,00
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.606.317.710,00	8.270.845.498,00	96,10	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Jenis Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	100,00
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.841.651.710,00	7.549.972.498,00	96,28	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	100,00
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	350.000.000,00	315.584.000,00	90,17	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	100,00
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	50.000.000,00	49.805.000,00	99,61	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	100,00
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	329.017.000,00	319.835.000,00	97,21	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	100,00

1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga - Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	35.649.000,00 0,00	35.649.000,00 0,00	100,00 0,00	0,00 25,00	0,00 25,00	100,00 100,00
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran - Jumlah Laporan Hasil Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	172.921.000,00 0,00	129.430.000,00 0,00	74,85 0,00	0,00 2,00	0,00 2,00	88,33 100,00
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran - Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	57.921.000,00 0,00	55.430.000,00 0,00	95,70 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00
1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran - Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	115.000.000,00 0,00	74.000.000,00 0,00	64,35 0,00	0,00 1,00	0,00 0,65	65,00 65,00
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran - Laporan Hasil Kejadian Kebakaran yang dilakukan Penelitian dan Pengujian	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran - Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	100.000.000,00 0,00	97.900.400,00 0,00	97,90 0,00	0,00 320,00	0,00 320,00	100,00 100,00
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	100.000.000,00	97.900.400,00	97,90	0,00	0,00	100,00

	- Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>28.632.272.597,00</b>	<b>25.365.774.278,00</b>	<b>88,59</b>			<b>95,70</b>

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

KODE	URAIAN	PAGU DANA (Rp.)	REAL. KEUANGAN		TARGET FISIK	REAL. FISIK	
			(Rp.)	(%)		K	(%)
1	2	4	5	6	7	8	6
1.05	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>34.770.413.373,00</b>	<b>32.052.149.415,00</b>	<b>92,18</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>96,38</b>
1.05.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>19.269.652.148,00</b>	<b>17.353.977.870,00</b>	<b>90,06</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>92,93</b>
	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49,50</i>	<i>46,00</i>	<i>92,93</i>
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	490.287.680,00	411.960.500,00	84,02	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	97,12
	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13,00</i>	<i>10,00</i>	<i>76,92</i>
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	81.300.000,00	80.865.000,00	99,46	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>100,00</i>
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PD	20.000.000,00	9.100.000,00	45,50	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
	- Jumlah Dokumen RKA -PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-PD	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>100,00</i>
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PD	20.000.000,00	10.665.000,00	53,33	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,00

		- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PD	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
1.05.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-PD	20.000.000,00	1.081.200,00	5,41	0,00	0,00	100,00
		- Jumlah Dokumen DPA-PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-PD	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
1.05.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- PD	20.000.000,00	3.230.500,00	16,15	0,00	0,00	100,00
		- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-PD	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
1.05.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	196.487.680,00	183.963.100,00	93,63	0,00	0,00	100,00
		- Jumlah Laporan Capaian Kinerja da Ikhtisar Realisasi Kinerja PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	100,00
1.05.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	132.500.000,00	123.055.700,00	92,87	0,00	0,00	100,00
		- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	100,00
1.05.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.862.969.680,00	14.232.154.316,00	89,72	0,00	0,00	98,75
		- Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	0,00	0,00	0,00	32,00	30,00	93,75
1.05.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.650.947.000,00	14.022.559.519,00	89,60	0,00	0,00	100,00
		- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	100,00
1.05.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan PD	134.627.680,00	133.310.097,00	99,02	0,00	0,00	100,00

	- <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan PD</i>	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	100,00
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	27.420.000,00	27.419.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD</i>	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD	49.975.000,00	48.864.800,00	97,78	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD</i>	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	100,00
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	812.139.000,00	766.001.142,00	94,32	0,00	0,00	98,13
	- <i>Jumlah Dokumen Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	446.490.000,00	433.600.942,00	97,11	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	0,00	0,00	0,00	186,00	186,00	100,00
1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	165.280.000,00	162.708.000,00	98,44	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	100,00
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.369.000,00	169.692.200,00	84,69	0,00	0,00	92,54
	- <i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	0,00	0,00	0,00	670,00	620,00	92,54
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	914.561.500,00	800.688.625,00	87,55	0,00	0,00	95,71

	- Tersedianya bahan penunjang administrasi perkantoran	0,00	0,00	0,00	78,00	75,00	96,15
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.250.000,00	101.659.300,00	99,42	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	100,00
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000,00	49.914.200,00	99,83	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.905.000,00	71.381.700,00	92,82	0,00	0,00	86,21
	- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0,00	0,00	0,00	29,00	25,00	86,21
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.443.500,00	39.664.000,00	95,71	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	100,00
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.550.000,00	28.537.500,00	99,96	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	100,00
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	605.413.000,00	499.631.925,00	82,53	0,00	0,00	83,33
	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	0,00	0,00	0,00	12,00	10,00	83,33
1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD	10.000.000,00	9.900.000,00	99,00	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	100,00
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.780.448,00	132.500.000,00	87,88	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00

1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - <i>Jumlah sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya</i>	150.780.448,00 0,00	132.500.000,00 0,00	87,88 0,00	0,00 2,00	0,00 2,00	100,00 100,00
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - <i>Tersedianya Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	541.743.840,00 0,00	525.600.000,00 0,00	97,02 0,00	0,00 22,00	0,00 16,00	81,82 72,73
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	49.500.000,00 0,00	36.000.000,00 0,00	72,73 0,00	0,00 22,00	0,00 16,00	72,73 72,73
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	492.243.840,00 0,00	489.600.000,00 0,00	99,46 0,00	0,00 12,00	0,00 12,00	100,00 100,00
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - <i>Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	497.170.000,00 0,00	485.073.287,00 0,00	97,57 0,00	0,00 73,00	0,00 73,00	100,00 100,00
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	65.400.000,00 0,00	65.400.000,00 0,00	100,00 0,00	0,00 6,00	0,00 6,00	100,00 100,00
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	282.500.000,00	271.467.100,00	96,09	0,00	0,00	100,00

	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	100,00
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	98.936.187,00	98,94	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.270.000,00	49.270.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	100,00
1.05.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>15.500.761.225,00</b>	<b>14.698.171.545,00</b>	<b>94,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,72</b>
	- Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	100,00
	- Rasio Linmas Per RT	0,00	0,00	0,00	7,90	6,90	87,34
	- Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Satpol PP	0,00	0,00	0,00	22,50	21,50	95,56
	- Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	100,00
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.001.234.945,00	10.636.879.165,00	96,69	0,00	0,00	98,33
	- Jumlah Laporan Hasil Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	254,00	254,00	100,00
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	647.050.000,00	569.340.930,00	87,99	0,00	0,00	92,23

	- <i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota</i>	0,00	0,00	0,00	103,00	95,00	92,23
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	285.148.000,00	243.570.000,00	85,42	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	100,00
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	1.372.223.040,00	1.331.468.856,00	97,03	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	100,00
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	509.062.425,00	499.703.600,00	98,16	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan</i>	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	100,00
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	7.247.928.480,00	7.126.111.312,00	98,32	0,00	0,00	100,00
	- <i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</i>	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	100,00

1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa - <i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan</i>	939.823.000,00 0,00	866.684.467,00 0,00	92,22 0,00	0,00 77,00	0,00 74,00	96,10 96,10
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota - <i>Tersedianya Laporan Hasil Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</i>	3.437.158.600,00 0,00	3.048.932.780,00 0,00	88,71 0,00	0,00 66,00	0,00 59,00	92,35 89,39
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - <i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	2.059.337.600,00 0,00	1.935.225.000,00 0,00	93,97 0,00	0,00 28,00	0,00 28,00	100,00 100,00
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah - <i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP</i>	788.421.000,00 0,00	616.539.830,00 0,00	78,20 0,00	0,00 35,00	0,00 28,00	80,00 80,00
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - <i>Tersedianya Laporan hasil Penegakan Peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati dan Walikota</i>	589.400.000,00 0,00	497.167.950,00 0,00	84,35 0,00	0,00 3,00	0,00 3,00	100,00 100,00
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota - <i>Tersedianya Laporan Hasil Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil</i>	1.062.367.680,00 0,00	1.012.359.600,00 0,00	95,29 0,00	0,00 174,00	0,00 174,00	100,00 100,00
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	1.062.367.680,00	1.012.359.600,00	95,29	0,00	0,00	100,00

	- Tersedianya laporan Hasil Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	174,00	174,00	100,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>34.770.413.373,00</b>	<b>32.052.149.415,00</b>	<b>92,18</b>			<b>96,38</b>

### 3.4 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

Penilaian kinerja pelaksanaan RKPD berdasarkan capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan terhadap pengakuan capaian kinerja fisik berupa keluaran yang dihasilkan (output) dan realisasi serapan anggaran pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil penilaian tersebut secara agregat menunjukkan capaian kinerja bidang urusan yang mencakup masing-masing program dan kegiatan tersebut. Pada periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2024, dengan penilaian capaian kinerja merujuk pada rumusan kriteria penilaian seperti disajikan pada di bawah ini.

**Tabel 3.5 Pedoman Penilaian Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan RKPD pada Triwulan IV Tahun 2024**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91,00 >	Sangat Tinggi (ST)
2	76,00 < 90,00	Tinggi (T)
3	66,00 < 75,00	Sedang (S)
4	51,00 < 65,00	Rendah (R)
5	< 50,00	Sangat Rendah (SR)

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Penerapan jenjang kriteria penilaian kinerja sedemikian dalam menetapkan status hasil capaian suatu program/kegiatan dimaknai sebagai berikut:

- (1) Hasil "Sangat Tinggi (ST)", yaitu apabila proporsi capaian > 91,00. Rentang ini menunjukkan capaian realisasi kinerja berada di atas persyaratan minimal penilaian kinerja;
- (2) Hasil "Tinggi (T)", yaitu apabila proporsi capaian berkisar lebih dari 76,00 sampai kurang dari 90,00. Rentang ini menunjukkan capaian realisasi kinerja relatif memenuhi target;
- (3) Hasil "Sedang (S)", yaitu apabila proporsi capaian berkisar lebih dari 66,00 sampai kurang dari 75,00. Rentang ini menunjukkan capaian realisasi kinerja relatif memenuhi persyaratan minimal;
- (4) Hasil "Rendah (R)", yaitu apabila proporsi capaian berkisar lebih dari 51,00 sampai kurang dari 65,00. Rentang ini menunjukkan capaian realisasi kinerja belum cukup untuk memenuhi persyaratan minimal; dan



- (5) Hasil "Sangat Rendah (SR)", yaitu apabila kondisi capaian kurang dari 50,00. Rentang sedemikian menunjukkan capaian realisasi kinerja tidak memenuhi persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan rumusan rencana program pembangunan tahun 2024, alokasi setiap urusan/bidang urusan dirinci atas program. Kegiatan dan sub kegiatan dengan anggaran yang harus dievaluasi kinerjanya berdasarkan rencana capaian target pada setiap triwulan sepanjang rentang waktu tahun berjalan. Rekapitulasi hasil evaluasi atas pelaksanaan program Triwulan IV Tahun 2024 yang secara garis besar disajikan berdasarkan bidang urusan dimaksudkan untuk menunjukkan realisasi pencapaian kinerja pelaksanaan program secara umum.

Pencapaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV pada Tahun Anggaran 2024, untuk keseluruhan program dan kegiatan di Kabupaten Bekasi, capaian kinerja fisik sebesar 93,26% dengan capaian realisasi penyerapan anggaran sebesar 90,74%. Capaian realisasi penyerapan anggaran tersebut terdiri dari Urusan Wajib pelayanan dasar sebesar 92,77%, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sebesar 90,54%, Urusan Pilihan sebesar 88,52%, Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar 93,24%, Pendukung Urusan Pemerintahan sebesar 91,43%, dan Pemerintahan Umum Kewilayahan sebesar 93,63%.

Sedangkan untuk capaian realisasi kinerja fisik terdiri dari Urusan Wajib pelayanan dasar sebesar 89,45%, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sebesar 95,76%, Urusan Pilihan sebesar 87,53%, Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar 90,21%, Pendukung Urusan Pemerintahan sebesar 96,45%, dan Pemerintahan Umum Kewilayahan sebesar 84,92%.

Berdasarkan agregat rerata capaian kinerja pelaksanaan program menurut bidang urusan sampai dengan akhir Triwulan IV 2024, hasil evaluasi secara umum menunjukkan rerata capaian kinerja fisik "sangat tinggi" (93,26%) dan rerata kinerja penyerapan anggaran "sangat tinggi" (90,74%).

Berdasarkan kondisi di atas dapat diketahui bahwa rerata capaian kinerja fisik lebih tinggi dari capaian kinerja penyerapan anggaran dimana capaian fisik lebih tinggi sebesar 2,52% dari capaian kinerja penyerapan anggaran. Capaian kinerja fisik dan penyerapan anggaran tersebut mengalami kenaikan pesat pada Triwulan IV jika dibandingkan pada triwulan sebelumnya. Hal ini disebabkan karena banyaknya kegiatan pada masing-masing perangkat daerah yang masih dalam proses pada triwulan sebelumnya telah selesai dilaksanakan.



Untuk melihat implikasi langsung maupun tidak langsung dari pencapaian kinerja, diperlukan perhitungan secara tersendiri melalui evaluasi pelaksanaan dan output pada setiap kegiatan dan sub kegiatan yang tercakup dalam suatu program. Dengan demikian, kontribusi setiap sub kegiatan dan kegiatan akan dapat diperhitungkan berdasarkan nilai kinerjanya dalam pencapaian target yang ditetapkan dalam indikator program. Realisasi kinerja sub kegiatan, kegiatan dan program dapat dilihat secara lengkap pada Lampiran 1 Laporan Evaluasi RKPD Kabupaten Bekasi Triwulan IV ini.

Rekapitulasi hasil evaluasi program yang disusun berdasarkan Kelompok disajikan untuk menunjukkan realisasi capaian kinerja pelaksanaan program yang ditunjukkan oleh masing-masing Bidang Urusan (lihat Tabel 3.6). Rekapitulasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan perangkat daerah se-Kabupaten Bekasi berdasarkan urusan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:



**Tabel 3.6 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 Menurut Bidang Urusan**

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Keuangan	Predikat (Keuangan)	% Fisik	Predikat (Fisik)
	<b>URUSAN WAJIB</b>						
	<b>Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar</b>	<b>4.851.663.484.411,00</b>	<b>4.500.949.234.066,00</b>	<b>92,77%</b>	<b>ST</b>	<b>89,45%</b>	<b>T</b>
1	PENDIDIKAN	2.205.204.109.067,00	2.008.744.145.601,00	91,09%	ST	78,88%	T
2	KESEHATAN	1.297.986.568.113,00	1.189.288.171.976,00	91,63%	ST	91,92%	T
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	981.337.632.774,00	958.528.980.287,00	97,68%	ST	90,26%	T
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	259.823.670.526,00	247.293.364.726,00	95,18%	ST	95,54%	ST
5	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	83.112.578.446,00	75.088.162.633,00	90,35%	T	97,36%	ST
6	SOSIAL	24.198.925.485,00	22.006.408.843,00	90,94%	ST	82,74%	T
	<b>Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</b>	<b>823.119.496.352,00</b>	<b>745.288.510.142,00</b>	<b>90,54%</b>	<b>T</b>	<b>95,76%</b>	<b>ST</b>
1	TENAGA KERJA	47.550.106.579,00	44.005.726.629,00	92,55%	ST	96,79%	ST
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	15.089.807.000,00	12.597.502.841,00	83,48%	T	100,00%	ST
3	PANGAN	20.878.133.145,00	18.458.401.734,00	88,41%	T	99,20%	ST
4	PERTANAHAN	66.934.360.078,00	49.896.329.552,00	74,55%	S	100,00%	ST
5	LINGKUNGAN HIDUP	147.847.245.449,00	130.641.280.676,00	88,36%	T	84,35%	T
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	36.776.599.969,00	32.924.809.405,00	89,53%	T	100,00%	ST
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	26.482.401.179,00	24.583.539.087,00	92,83%	ST	99,18%	ST
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	47.730.508.640,00	41.369.802.944,00	86,67%	T	97,50%	ST
9	PERHUBUNGAN	133.148.543.806,00	128.988.570.166,00	96,88%	ST	97,76%	ST
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	60.154.721.365,00	55.528.639.413,00	92,31%	ST	95,38%	ST
11	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	21.179.274.027,00	19.671.550.166,00	92,88%	ST	123,34%	ST

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Keuangan	Predikat (Keuangan)	% Fisik	Predikat (Fisik)
12	PENANAMAN MODAL	28.864.709.603,00	24.656.042.279,00	85,42%	T	64,86%	R
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	125.763.190.322,00	122.240.080.711,00	97,20%	ST	97,34%	ST
14	STATISTIK	1.559.894.720,00	1.520.753.039,00	97,49%	ST	71,25%	S
15	KEBUDAYAAN	23.115.108.539,00	20.690.860.910,00	89,51%	T	100,00%	ST
16	PERPUSTAKAAN	2.586.585.750,00	2.515.472.497,00	97,25%	T	100,00%	ST
17	KEARSIPAN	16.036.851.061,00	13.608.578.573,00	84,86%	T	100,00%	ST
18	PERSANDIAN	1.421.455.120,00	1.390.569.520,00	97,83%	ST	96,67%	ST
	<b>URUSAN PILIHAN</b>	<b>172.530.178.898,00</b>	<b>152.721.956.985,00</b>	<b>88,52%</b>	<b>T</b>	<b>87,53%</b>	<b>T</b>
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	24.131.396.555,00	21.442.527.119,00	88,86%	T	100,00%	ST
2	PARIWISATA	20.372.832.034,00	18.758.554.975,00	92,08%	ST	99,21%	ST
3	PERTANIAN	61.987.424.427,00	56.353.752.314,00	90,91%	ST	97,70%	ST
4	PERDAGANGAN	51.760.522.851,00	43.693.993.959,00	84,42%	T	72,37%	S
5	PERINDUSTRIAN	14.257.603.031,00	12.456.468.618,00	87,37%	T	55,87%	R
6	TRANSMIGRASI	20.400.000,00	16.660.000,00	81,67%	T	100,00%	ST
	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>1.183.690.649.027,00</b>	<b>1.103.683.447.142,00</b>	<b>93,24%</b>	<b>ST</b>	<b>90,21%</b>	<b>T</b>
1	PERENCANAAN	29.762.474.226,00	26.244.317.484,00	88,18%	T	66,76%	S
2	KEUANGAN	1.058.939.322.707,00	993.047.010.075,00	93,78%	ST	91,12%	ST
3	KEPEGAWAIAN	23.155.414.887,00	21.831.443.625,00	94,28%	ST	97,03%	ST
4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	14.175.117.607,00	12.806.920.075,00	90,35%	T	100,00%	ST
5	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	11.861.118.000,00	11.638.844.000,00	98,13%	ST	100,00%	ST
6	INSPEKTORAT DAERAH	45.797.201.600,00	38.114.911.883,00	83,23%	T	86,32%	T

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Keuangan	Predikat (Keuangan)	% Fisik	Predikat (Fisik)
	<b>PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>538.231.446.708,00</b>	<b>492.098.142.439,00</b>	<b>91,43%</b>	<b>ST</b>	<b>96,45%</b>	<b>ST</b>
1	SEKRETARIAT DAERAH	286.051.208.054,00	271.915.130.091,00	95,06%	ST	99,13%	ST
2	SEKRETARIAT DPRD	129.507.747.732,00	99.104.668.087,00	76,52%	T	90,21%	T
3	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	122.672.490.922,00	121.078.344.261,00	98,70%	ST	100,00%	ST
	<b>PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN</b>	<b>242.045.286.660,00</b>	<b>226.625.846.113,00</b>	<b>93,63%</b>	<b>ST</b>	<b>84,92%</b>	<b>T</b>
1	KECAMATAN	242.045.286.660,00	226.625.846.113,00	93,63%	ST	84,92%	T
	<b>TOTAL</b>	<b>7.811.280.542.056,00</b>	<b>7.087.761.241.314,00</b>	<b>90,74%</b>	<b>ST</b>	<b>93,26%</b>	<b>ST</b>

Sumber : SIMPPD, Bappeda 2024

### **3.5. DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN NASIONAL**

#### **3.5.1. DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL**

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tersebut dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024, yang merupakan Agenda Pembangunan sebagaimana termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2024 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal tersebut ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Adapun sasaran dari masing- masing PN tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
- 7) Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.



**Tabel 3.7 Sinkronisasi Prioritas Kabupaten Bekasi dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024**

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	1	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT (gigawatt) - kumulatif	19,2	1	Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan	Kapasitas terpasang tambahan pembangkit EBT (MW)			-	-	-	
						2	Peningkatan pasokan bahan bakar nabati	Pemanfaatan biofuel untuk Domestik (Juta kilo liter)			-	-	-	
						3	Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi	Intensitas energi primer (SBM/Rp Miliar)			-	-	-	
								penurunan Intensitas energi final (SBM/Rp Miliar)			-	-	-	
						4	Peningkatan pemenuhan energi domestik	Domestic Market Obligation (DMO) Batubara (Juta Ton)			-	-	-	
Alokasi Pemanfaatan Gas Domestik (Persen)			-	-	-									
5	Pengembangan industri pendukung EBT	TKDN sektor pembangkit EBT (Persen)			-	-	-							
		2	Peningkatan kuantitas/ketahanan	Produktivitas air (water)	3	1	Pemantapan Kawasan berfungsi	Luas Minimal Kawasan berfungsi Lindung			-	-	-	

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		air untuk mendukung pertumbuhan	productivity) (kg/m <sup>3</sup> g)			Lindung (kumulatif)	(kumulatif) (Juta ha)						
					2	Pengelolaan hutan berkelanjutan	Luas kawasan hutan produksi (Juta Ha)			-	-	-	
					3	Penyediaan air untuk pertanian	Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun (Hektare)			-	-	-	
				Luas lahan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi beririgasi (Hektare)			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	4.847.721.411	7.562.111.994	
					4	Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas	Tambahan penyediaan Air Baku dari Sumber Air Berkelanjutan (m <sup>3</sup> /detik)	Peningkatan Konduktivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	128.465.000.000	112.195.729.674
					5	Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistem	Peningkatan tutupan hutan (Hektar)			Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/ Kota	-	-	

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Nya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau							
					6	Pengembangan waduk multiguna	Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air (miliar m3) (Kumulatif)(m3)	Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengamanan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	128.465.000.000	112.195.729.674
		3	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	105,00–108	1	Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan	Konsumsi ikan (2.2.2(c)) (kg/kapita/ta hun)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-	200.000.000	195.526.750
				2100			Konsumsi daging (kg/kapita/ta hun)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	1.889.626.000	2.138.760.209

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari)	57			Konsumsi sayur dan buah (gram/kapita/tahun)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	1.889.626.000	2.138.760.209
			Prevalence of Undernourishment (PoU) (%)	5			Konsumsi protein asal ternak (gram/kapita/hari)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	1.889.626.000	2.138.760.209
			Food Insecurity Experience Scale (FIES) (%)	4			Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi (% Penerima BPNT)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-	250.000.000	247.270.580
			Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)				Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	1.283.750.000	1.097.951.710

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Luas lahan produksi beras biofortifikasi (ha)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	2.015.000.000	2.052.244.460
							Persentase pangsa pangan organik** (Persentase)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	2.015.000.000	2.052.244.460
					2		Penggunaan Benih Bersertifikat (Persen)			-	-	-	
						Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan	Ketersediaan Beras (Juta ton)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	3.740.712.362	6.545.167.856
				Ketersediaan Protein Hewani (Juta ton)									
				Produksi jagung (Juta ton)									
						Produksi daging (Juta ton)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan	-	480.299.749	390.476.866	

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										Ternak serta Pakan			
							Produksi umbi-umbian (Juta ton)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	3.740.712.362	6.545.167.856
					3	Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar	Teknologi yang diterapkan oleh petani (%) Nilai tambah per tenaga kerja pertanian (2.3.1*) (Rp juta/tenaga kerja/tahun) Nilai tukar petani	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	3.103.692.400	2.497.383.814
					4	Peningkatan berkelanjutan produktivitas sumber daya pertanian,	Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (%)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	-	890.000.000	836.791.620

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						dan digitalisasi pertanian, dan digitalisasi pertanian	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan pangan yang dilepas (2.5.1*) (Varietas unggul baru dan galur)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	170.000.000	155.240.650
						Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia (2.5.2*) (Akses)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	936.000.000	1.227.012.750
					5	Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional	Global food security index				-	-	-
		4	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Konservasi kawasan kelautan (14.5.1)a) (juta ha)	30	1	Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan	Pengelola WPP (14.2.1(b)) (Unit)				-	-

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1)a (%)	≤80		(WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	Akurasi pendataan stock dan pemanfaatan WPP (WPP)						
			Produksi perikanan (juta ton)	32,75			Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (RZ)						
			Produksi garam (juta ton)	2	2	Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan				-	-	-	
			Nilai Tukar Nelayan	107–110		Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Produksi ikan (Juta ton)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	710.000.000	1.904.627.120
								Peningkatan Kualitas Sumber	Program Pengelolaan	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	1.175.000.000	785.679.620

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Daya Manusia	Perikanan Budidaya				
								Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	3.591.323.017	3.835.727.340
										Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-	
							Produksi rumput laut (Juta ton)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	3.591.323.017	3.835.727.340
							Produksi garam (Juta ton)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	1.175.000.000	785.679.620
					4	Peningkatan fasilitas usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan				-	-	-	

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA							
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
						skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya								
					5	Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan				-	-	-		
		5	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	Rasio Kredit UMKM Terhadap Total Kredit Perbankan (%) (8.10.1)	22	1	Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar				-	-	-	
				Pertumbuhan wirausaha (%)	2,9	2	Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha	Proporsi IKM dengan pinjaman/kredit (9.3.2*) (Persen)				-	-	-
				Kontribusi koperasi terhadap PDB (%)	5,5			Proporsi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sektor produksi (Persen)				-	-	-

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					3	Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi	jumlah koperasi moderen yang dikembangkan (unit)	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	1.000.000.000	990.260.000
					4	Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha	Pertumbuhan jumlah wirausaha (Persen)	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	5.425.000.000	5.222.059.847
							Jumlah sentra industri kecil dan menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi (Kumulatif)	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	2.630.000.000	2.233.420.846
						Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri (9.3.1*) (Persen)							

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							Penumbuhan startup (unit)	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	5.425.000.000	5.222.059.847	
					5	Peningkatan nilai tambah usaha sosial	Kontribusi usaha sosial (Persen PDB)				-	-	-	
		6	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas (%)	5,80–6,20	1	Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non argo yang terintegrasi hulu- hilir	Pertumbuhan PDB subsektor industri makanan dan minuman (Persen)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	615.475.249	
			Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas (%)	17,90–18,2	Kontribusi PDB Industri Pengolahan(9 .2.1 *) (Persen)		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		-	2.630.000.000			

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Nilai tambah ekonomi kreatif (triliun rupiah)	1.347,00			Pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas (Persen)			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	2.630.000.000	
			Jumlah tenaga kerja industri pengolahan (juta orang)	22,5			Pertumbuhan PDB perkebunan (Persen)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				
			Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja (9.2.2)a (%)	15,7			Peningkatan produksi kakao (Persen)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				
			Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2)a (juta orang)	22,08			Peningkatan produksi kopi (Persen)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	3.740.712.362	6.545.167.856
			Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (juta orang)	22,74			Peningkatan produksi kelapa sawit (Persen)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				
			Nilai realisasi PMA dan PMDN (triliun rupiah)	1.450–1650			Pertumbuhan PDB hortikultura (Persen)	Peningkatan Kualitas Sumber	Program Penyediaan dan Pengembangan				

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Nilai Realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan (triliun rupiah)	662,7–731,1				Daya Manusia	an Sarana Pertanian				
							Peningkatan produksi buah-buahan (Persen)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				
							Peningkatan produksi sayuran (Persen)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Penyediaan dan Pengembangan				
			Pertumbuhan PDB pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian (%)	3,60–3,80			Peningkatan produksi florikultura (Persen)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				
					2	Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa	Jumlah Kawasan Industri (KI) yang difasilitasi di luar Jawa (KI-KEK Industri)			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		2.630.000.000	2.233.420.846

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA							
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
					3	Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok	Destinasi pariwisata prioritas yang dipercepat pengembangannya (Destinasi) Revitalisasi destinasi Bali (Destinasi) Destinasi wisata alam berkelanjutan berbasis kawasan hutan prioritas (Unit) Destinasi wisata berbasis Geopark (Destinasi) Destinasi wisata bahari (Destinasi)	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-		1.400.000.000	1.794.679.448
					4	Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	Pertumbuhan PDB ekonomi kreatif (Persen)	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-		793.696.000	770.164.200

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Pertumbuhan PDB informasi dan telekomunikasi (Kab/kota)	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	793.696.000	
							Jumlah kab/kota kreatif yang dikembangkan(Kab/ kota)	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	793.696.000	
							Jumlah kawasan dan klaster kreatif yang dikembangkan (Lokasi)	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	793.696.000	

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA							
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							Revitalisasi ruang kreatif (Unit)	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	793.696.000		
							Skema pembiayaan berbasis HKI (Skema)	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	793.696.000		
					5	Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan	Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia (Ranking EODB) yang ditunjukkan antara lain dengan meningkatnya indikator memulai usaha jumlah prosedur				-	-	-	

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							dan waktu (Ranking EoDB)						
							<p>Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Rp triliun)</p> <p>Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN (Persen)</p>	<p>Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja</p>	<p>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</p>	<p>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p>	-	315.000.000	304.320.000
							<p>Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan (Rp Triliun)</p> <p>Kontribusi realisasi investasi luar Jawa (Persen)</p>	<p>Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja</p>	<p>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</p>	<p>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p>	-	-	
								<p>Peningkatan Daya Saing dan</p>	<p>Program Pengembangan Iklim</p>	<p>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</p>	-	283.500.000	251.953.500

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
								Kesempatan Kerja	Penanaman Modal					
							Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (K/L/D)	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	1.680.000.000	382.856.304	
					6	Pengembangan industri halal	Kawasan Industri yang difasilitasi (Jumlah Kawasan Industri)			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	2.630.000.000		
		7	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) tinggi dan	Neraca perdagangan barang (US\$ miliar)	47,2–49,5	1	Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa	Pertumbuhan ekspor pertanian (Persen)	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	700.000.000	948.004.245

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA									
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Pertumbuhan ekspor nonmigas (%)	9,8			Ekspor hasil pertanian (US\$ juta)									
			Jumlah wisatawan mancanegara (8.9.1a) (juta kunjungan)	9,5–14,3			Ekspor hasil perikanan (USD miliar)									
			Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (juta perjalanan)h	1.250–1500			Kontribusi ekspor industri pengolahan (Persen)									
			Pertumbuhan ekspor produk industri berteknologi tinggi (%)	11,5			Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi (komputer, instrumen, ilmiah, mesin listrik, dirgantara) (Persen)									
							Pertumbuhan ekspor non migas (Persen)									
							Rasio ekspor jasa terhadap PDB (Persen)									
							Nilai ekspor produk industri kehutanan (USD miliar)									

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					2	Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor	Jumlah negara tujuan ekspor (Negara)	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	700.000.000	948.004.245
							Share ekspor produk Indonesia di kawasan Afrika, Amerika Selatan, dan Eropa Timur (Persen)						
							Share ekspor produk Indonesia di pasar tradisional (Persen)						

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					3	Pengelolaan Impor	Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang) (Persen)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	615.475.249	237.914.217
				Produk industri yang mendapatkan sertifikat TKDN (Produk per tahun)			Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-		
				Jumlah wisatawan nusantara (8.9.1(b) (Juta perjalanan)			Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	1.102.361.000	3.372.712.283	
							Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	1.400.000.000	1.794.679.448	
				4	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk	Pertumbuhan jumlah produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (Persen)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	615.475.249		

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif							
					5	Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global	Jumlah sektor prioritas yang difasilitasi investasi dalam jaringan produksi global (Sektor)	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	993.446.663.476	851.267.134.138
					6	Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif	Jumlah wisatawan mancanegara (8.9.1(a)) (Juta orang)	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-	
				Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	1.102.361.000	3.372.712.283	
				Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	1.400.000.000	1.794.679.448	

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Nilai ekspor ekonomi kreatif (USD miliar)	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	700.000.000	948.004.245
						Peningkatan efektifitas <i>Preferential Trade Agreement</i> (PTA) / <i>Free Trade Agreement</i> (FTA) / <i>Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (CEPA) dan diplomasi ekonomi	Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia (Negara)			-	-	-	
					7		Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia (Negara)			-	-	-	
							Jumlah ratifikasi perjanjian kerjasama ekonomi internasional (Ratifikasi)			-	-	-	

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah promosi <i>Tourism, Trade and Investment</i> (TTI) terintegrasi (Promosi terintegrasi)	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	700.000.000	
						PTA/FTA/CEPA yang disepakati							
		8	Tingkat inflasi pangan berkejang (%)	3,0-5,0	1	Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan	Rasio M2/PDB (Persen)	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	1.160.000.000	
			Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (%)	4,57-4,58			Jumlah ATM per 100.000 penduduk (8.10.1*) (Unit)			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan	-	

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Lembaga Keuangan Bukan Bank		
			Rasio Uang Beredar M2/PDB (%)	50,5–51,2			Jumlah Kantor Bank per 100.000 penduduk (8.10.2*) (Unit)	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	1.747.566.781	1.319.850.900
			Skor logistic performance index (skor)	3,5	2	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0	Kontribusi ekonomi digital (Persen)	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	650.000.000	

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Peringkat travel and tourism development index (peringkat)j	NA			Nilai transaksi <i>e-commerce</i> (Rp triliun)			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	
			Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) (%)	100			Jumlah pelaku kreatif yang difasilitasi infrastruktur TIK (Orang)			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-	
			Imbal hasil (yield) surat berharga negara (%)	menurun			Skor <i>Logistic Performance Index</i>			-	-	-	
			Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD meningkat (%)	34,94	3	Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga	Tingkat inflasi (Persen)			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	920.000.000	

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA								
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			Penyediaan data ekonomi dan sosial yang berkualitas (database)	11	4	Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (12.6.1(a)) (Perusahaan)	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	1.000.000.000	936.453.177		
						Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development (12.b.1) (Lokasi)									
					5	Reformasi Fiskal	Rasio perpajakan terhadap PDB (17.1.1(a)) (Persen)				Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		795.000.000	700.458.243
							Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan ( <i>core tax administration system</i> ) (Persen)					Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		1.310.023.500
						Imbal hasil (yield) surat berharga negara (Persen)				-	-	-			

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD Meningkat (Persen)			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan	150.000.000	22.088.000
					6	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, ekonomi Kreatif, dan ekonomi Digital	Ketersediaan data statistik pariwisata dan ekonomi kreatif (Data base)			-	-	-	
						Ketersediaan data dan informasi statistik e-commerce (Data base)							
						Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan perbaikan data pangan (Data base)							
<b>JUMLAH PN 1</b>											<b>1.389.526.305.842</b>	<b>1.168.253.760.717</b>	

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA							
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR		PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
PN 2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1	Pembangunan Wilayah Jawa-Bali	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa-Bali (%/tahun)	5,2-5,5	1	Pengembangan Kawasan Strategis			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	5.000.000.000	
													Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	4.500.000.000	3.923.038.830
													Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	500.000.000	491.069.500
			IPM Provinsi di Wilayah Jawa-Bali (nilai min-maks)	73,65-82,57	2	Pengembangan Sektor Unggulan			Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	300.000.000		

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa-Bali (%)	7,00–7,50	3	Pengembangan Kawasan Perkotaan		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	33.000.000.000	43.103.124.700
								Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	6.000.000.000	15.423.952.402
											Pengelolaan Leger Jalan	250.000.000	703.756.083
											Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.100.000.000	3.420.885.170
											Pembangunan Jalan	143.899.448.450	174.090.398.241

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Pelebaran Jalan Menuju Standar	6.196.417.500	5.980.829.960
											Rekonstruksi Jalan	158.790.249.060	173.539.703.816
											Pemeliharaan Berkala Jalan	20.000.000.000	12.900.756.599
											Pemeliharaan Rutin Jalan	20.000.000.000	5.650.889.700
											Pembangunan Jembatan	185.000.000.000	173.279.097.352
											Rehabilitasi Jembatan	4.000.000.000	1.378.392.783
											Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	11.755.595.505	
								Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah	Program Penyelenggaraan Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	200.000.000	192.517.290
										Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	300.000.000	698.215.000
											Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan	37.040.000.000	72.441.046.376

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Kabupaten/Kota		
											Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	500.000.000	468.288.705
											Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.500.000.000	22.616.051.578
										Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	100.000.000	93.548.136
											Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	501.600.000	503.857.200
										Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan	396.000.000	359.764.400

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Kabupaten/Kota		
											Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100.000.000	233.451.173
										Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	997.600.000	996.530.500
											Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.750.000.000	1.054.100.000
											Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala	200.000.000	295.772.793

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Kendaraan Bermotor		
											Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50.000.000	45.426.000
										Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	200.000.000	195.631.950
											Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	500.000.000	2.647.440.000
											Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa	75.000.000	74.615.000

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
											Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	7.397.000.000	7.110.157.280
											Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000	96.026.000
										Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	75.000.000	23.600.000
										Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggara	50.000.000	174.202.000

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											an Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		
										Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	50.000.000	1.282.661.650
										Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	71.206.500

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					4	Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi		Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	522.000.000	
				Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			150.000.000						
				Penyuluhan Transmigrasi			150.000.000				16.660.000		
				Pelatihan Transmigrasi			100.000.000						
					5	Kelembagaan dan		Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	93.300.000.000	
				Pembangunan Jalan Strategis Desa			34.035.561.679						
					5	Kelembagaan dan		Peningkatan Kualitas Tata Kelola	Program Pengelolaan	Kegiatan Pengelolaan	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	166.500.000	60.019.000

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Keuangan Daerah		Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	490.000.000	471.000.000
											Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	650.000.000	522.315.000
											Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.310.023.500	1.280.930.770
											Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	266.669.900	250.243.990
											Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	795.000.000	700.458.243
											Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah	297.550.000	211.522.186

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											dan Bangunan (BPHTB)		
											Penetapan Wajib Pajak Daerah	286.000.000	271.123.138
											Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	259.105.000	250.675.000
											Penagihan Pajak Daerah	728.945.000	930.076.850
											Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	78.900.000	68.760.000
											Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	223.221.000	206.055.000
											Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	144.000.000	237.358.500
											Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	150.000.000	147.442.000

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	127.300.000	99.564.000
							Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				150.000.000	87.408.000	
							Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD				217.000.000	199.090.000	
											Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	150.000.000	133.011.000
											Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	250.000.000	234.335.000
											Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	250.000.000	167.384.000

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	140.360.000	117.600.800
											Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	222.600.000	177.233.400
											Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	720.000.000	164.947.000
										Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	25.000.000	341.006.000

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	32.000.000	31.768.250 9
											Penatausahaan Pembiayaan Daerah	400.000.000	608.118.490
											Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	150.000.000	22.088.000
											Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	49.150.000	60.970.000

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	60.000.000	0
											Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	67.428.903	245.000.000
										Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	100.000.000	56.283.500

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	55.000.000	537.651.250
											Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	60.000.000	52.500.000

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	100.000.000	
										Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	637.108.776.398	544.841.189.298
											Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100.000.000.000	13.931.224.840
											Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	256.337.887.078	292.494.720.000
<b>JUMLAH PN 2</b>												<b>1.783.324.888.973</b>	<b>1.585.755.968.922</b>
PN 3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1	Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan	Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	100	1	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan				-	-	-

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Berkualitas dan Berdaya Saing		Persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan (%)	100	2	Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan				-	-	-	
			Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	100	3	Pendampingan dan Layanan Terpadu	Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan (%)			-	-	-	
			Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun (%)	100			Presentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (%)						

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA							
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Persentase kementerian/lembaga yang mengadopsi kualifikasi standar nasional pendamping pembangunan (%)	50			Persentase Provinsi/ kab/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan monev unit terpadu dalam proses penyusunan program- program penanggulangan kemiskinan							
					4	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk	Persentase Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengetahuan pengelolaan kependudukan (Persen Pemerintah Daerah Provinsi, kabupaten dan Kota)	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-		250.000.000	365.740.000

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Persentase Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota yang melaksanakan dan memanfaatkan analisis kependudukan dan informasi kependudukan (termasuk hasil Pendataan Keluarga) - (Persen Pemerintah Daerah Provinsi, kabupaten dan Kota)	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	481.506.000	449.592.000
		2 Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	98	1	Sistem jaminan sosial nasional				-	-	-	
			Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas (%)	11	2	Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran	Penyaluran Bantuan keluarga untuk kesehatan dan pendidikan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	1.361.660.000	

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia (%)	<10,00			Penyaluran Bantuan Pangan melalui Kartu Sembako Murah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	1.361.660.000	
			Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip inklusif (%)	20			Penyaluran Bantuan LPG 3 Kg	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	1.361.660.000	
			Persentase cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan: Pekerja formal (%); Pekerja informal (%)	74,57; 25,94			Penyaluran Bantuan listrik daya 450 VA dan 900 VA	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	1.361.660.000	
			Cakupan penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (juta pekerja)	20	3	Perlindungan Sosial	Tersusunnya Sistem Perlindungan Sosial Adaptif	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	1.361.660.000	
					4	Kesejahteraan Sosial	Persentase rumah tangga lanjut usia yang memperoleh bantuan sosial (%)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	1.361.660.000	

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							Persentase anak penyandang disabilitas usia sekolah yang memiliki akses terhadap layanan pendidikan dasar (%)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	3.694.329.000	3.430.451.183	
							Persentase Pemerintah Daerah yang menerapkan prinsip-prinsip kab/kota inklusif	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	920.000.000		
		3	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta			1	Persentase persalinan di fasyankes (%)	95	Peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	440.000.000	436.366.200
			Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) (%)	63,41			Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (persen)			-	-	-		

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	7,4	2	Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	120.000.000	1.421.993.720
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1.000 perempuan)	18			Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	428.000.000	419.696.450
			Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)	90			Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	440.000.000	
			Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,18	3	Peningkatan Pengendalian Penyakit	Persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	600.000.000	570.135.850

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Kesehatan Masyarakat	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
			Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu (%)	90			Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC Success Rate)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.000.000.000	874.663.600

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah kabupaten/kota dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria (kabupaten/kota)	95			Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	230.000.000	3.478.506.000
			Jumlah kabupaten/kota sehat (kabupaten/kota)	420			Persentase kabupaten/ kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan C pada populasi berisiko			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	230.000.000	
			Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) (kabupaten/kota)	514			Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	230.000.000	

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	100			Jumlah kabupaten/ kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	230.000.000	
			Persentase rumah sakit terakreditasi (%)	100			Jumlah desa endemis <i>schistosomiasis</i> yang mencapai eliminasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	230.000.000	
			Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	83			Jumlah kabupaten/ kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	230.000.000	
			Persentase RSUD kab/kota memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya (%)	90			Jumlah kabupaten/ kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	480.000.000	420.658.120
			Persentase obat memenuhi syarat (%)	97	4	Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Jumlah kabupaten/ kota sehat			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup	480.000.000	

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
										Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bersih dan Sehat			
			Persentase makanan memenuhi syarat (%)	88	5	Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase puskesmas tanpa dokter			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	49.480.000	49.058.000	
								Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	49.480.000	
								Persentase RSUD kabupaten/ kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1.455.000.000	1.284.793.000
							Persentase rumah sakit terakreditasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100.000.000	69.350.000
							Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	279.386.107.487	386.268.690.812
							Jumlah kabupaten/ kota yang telah melakukan perbaikan tata kelola pembangunan kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Persentase obat memenuhi syarat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	120.000.000	119.708.600
							Persentase makanan memenuhi syarat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan		140.000.000	
								Kesehatan dan Makanan Minuman	Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-			

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4 Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya: SMA/SMK/MA/Sederajat; Pendidikan tinggi	0,83; 0,43	1	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test AKSI (Persen): Membaca, Matematika dan Sains Test AKSI (Persen): Membaca, Matematika dan Sains	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	658.482.063.580	195.389.561.775
			Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA (%): Membaca; Matematika; Sains	34,10; 30,90; 44			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	299.830.777.401	73.417.121.500	
			Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi (%): Literasi; Numerasi	61,20; 43,54				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	2.826.262.000	

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Tingkat penyelesaian pendidikan (%): SD/MI/Sederajat; SMP/MTs/Sederajat; SMA/SMK/MA/Sederajat	98,94; 93,33; 71,71			Persentase Guru (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB) yang Bersertifikat Pendidik (Persen)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	658.482.063.580	195.389.561.775	
			Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (%)	64,38				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	299.830.777.401	73.417.121.500	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (PT) (%)	32,28				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	2.826.262.000		
					2	Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun	Angka Partisipasi Kasar (Persen) Pendidikan Tinggi				-	-	-	
							Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/1 laki-laki di Perguruan Tinggi			-	-	-		

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA							
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
					3	Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan					-	-	-	
					4	Penjaminan Mutu Pendidikan	Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B: SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-		658.482.063.580	195.389.561.775
							Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-		299.830.777.401	73.417.121.500	
							Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-		2.826.262.000		
							Perguruan Tinggi Terakreditasi A			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	10.765.000.000		

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					5	Peningkatan Tata Kelola Pendidikan				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	10.765.000.000	
		Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	Persentase perempuan umur 20–24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun (%)	8,74	1	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Pemenuhan hak dan Perlindungan Anak	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	295.069.200	242.234.610
			Prevalensi anak usia 13–17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	menurun		Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	270.000.000	166.107.360
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	79,16-81,21	2			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	169.450.000	132.339.000

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	55				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	456.918.500	397.892.720
			Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	menurun	3	Kualitas Pemuda		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pelopor Pemuda Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	4.100.000.000	3.248.600.297
			Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir (%)	82,58				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Kapasitas Kepemudaan	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	850.000.000	1.808.697.550

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase pemuda berumur 16–30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir (%)	6,72									
			Persentase pemuda (16–30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan white collar (%)	0,55									
			Proporsi pemuda usia 16-30 tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan/aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir dalam kelompok usia 16-30 tahun (%)	6,87									

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6 Pengentasan kemiskinan	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha (%)	50	1	Akselerasi penguatan ekonomi keluarga	Penyelenggaraan bantuan usaha ekonomi produktif dan pembiayaan ultra mikro bagi penduduk (KK)	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	5.425.000.000	5.222.059.847
			Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses kepemilikan tanah (rumah tangga)	300.120	2	Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	Desa yang mengembangkan keperantaraan usaha Pendamping kelompok usaha yang meningkat kapasitasnya Pengembangan kewirausahaan sosial	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	5.425.000.000	

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					3	Reforma Agraria	Luas bidang tanah yang diretribusi dan dilegalisasi dalam kerangka reforma agrari Jumlah kelompok masyarakat penerima tanah objek reforma agrarian (TORA) yang memperoleh objek reforma agrarian (TORA) yang memperoleh pemberdayaan			Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	
					4	Perhutanan Sosial	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (HA)			-	-	-	
		7	Peningkatan produktivitas dan daya saing	Jumlah lulusan pelatihan vokasi (juta orang) Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan (%)	2,8 40,95	1	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri PT Vokasi berakreditasi A	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-	2.507.933.800	739.552.200

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan (%)	61,71			Jumlah lulusan pendidikan menengah vokasi (orang)						
			Jumlah prototipe dari perguruan tinggi (prototipe)	243			Jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi (orang)						
			Jumlah produk inovasi dari tenant Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina (produk)	600			Jumlah lulusan pelatihan vokasi (orang) (Pelaksanaan Kartu Pra-Kerja)						
			Jumlah inovasi yang dimanfaatkan industri/badan usaha (inovasi)	210			Jumlah pemagangan dalam negeri (orang)						
			Jumlah permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI domestik (paten)	3.000			Jumlah pemagangan luar negeri (orang)						

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA							
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Jumlah paten granted (domestik) (paten)	1.000	2	Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas	Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan				-	-	-	
			Persentase sumber daya manusia iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 (%)	20			Jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional							
			Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan (PUI)	138			Jumlah sitasi di jurnal internasional							
			Jumlah infrastruktur iptek strategis yang dikembangkan (infrastruktur)	10			Jumlah KI yang didaftarkan							
			Jumlah Science Techno Park yang ada yang dikembangkan: Berbasis perguruan tinggi (unit); Berbasis nonperguruan tinggi (unit)	8; 5	3	Peningkatan Kapabilitas IPTEK dan Penciptaan Inovasi	Peringkat <i>Global Innovation Index</i>				-	-	-	

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah produk inovasi dan produk riset Prioritas Riset Nasional yang dihasilkan (produk)	40			Jumlah paten yang diberikan (resident)						
			Jumlah penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan: Penerapan teknologi untuk pemanfaatan sumber daya alam (teknologi); Penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana (teknologi)	24; 35	4	Prestasi Olahraga	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	1.100.000.000	1.555.321.120
			Jumlah perolehan medali emas pada Olympic Games	3			Jumlah perolehan medali emas pada <i>Olympic Games</i>	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	11.300.000.000	54.093.226.676

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Jumlah perolehan medali emas pada Paralympic Games	3			Jumlah perolehan medali emas pada <i>Paralympic Games</i> Peringkat pada Asian Games Peringkat pada Asian Para Games		Keolahragaan					
<b>JUMLAH PN 3</b>												<b>3.237.030.54 2.930</b>	<b>1.273.685.48 4.740</b>	
PN 4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk mentalitas Bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Melayani (nilai)	79,38	1	Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	658.482.063.580	195.389.561.775
			Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Tertib (nilai)	78,08										

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Mandiri (nilai)	66,39			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	4.100.000.000	3.248.600.297
			Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersatu (nilai)	73,65		Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	-	1.179.200.000	1.018.170.000
			Nilai Dimensi Ketuhanan Yang Maha Esa (nilai)	75,01	2			Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	3.572.113.787	2.621.143.000
			Nilai Dimensi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (nilai)	79,42				Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan	Program Kepegawaian Daerah	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	1.156.522.000	1.459.157.500

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Pelayanan Publik					
			Nilai Dimensi Persatuan Indonesia (nilai)	79,07	3	Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	270.000.000	166.107.360
			Nilai Dimensi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan (nilai)	75,43				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	821.690.600	731.726.760

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Nilai Dimensi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (nilai)	72,72	4	Penguatan pusat- pusat perubahan gerakan revolusi mental		Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	1.958.800.000	2.149.045.731
			Indeks Kerentanan Keluarga (nilai)	10	5	Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pancasila		Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	2.696.644.162	4.260.892.283
			Indeks Karakter Remaja (nilai)	69,92	6	Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalism		Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	2.696.644.162	

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						ke dan patriotisme							
		Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk memperkuat karakter dan mempertahankan jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia	Nilai Dimensi Warisan Budaya (nilai)	57,6	1	Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	955.000.000	828.362.980
			Nilai Dimensi Ekspresi Budaya (nilai)	39,01	2	Pengembangan dan pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	955.000.000	828.362.980
			Nilai Dimensi Ekonomi Budaya (nilai)	50	3	Perlindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	955.000.000	828.362.980

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					4	Pengembangan Diplomasi Budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	1.679.918.000	1.676.668.986
					5	Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	955.000.000	828.362.980
		3	Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial	73,39	1	Penguatan cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan		Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	720.000.000	1.015.031.415

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						kebersamaan di kalangan umat beragama							
			Nilai Dimensi Kerja Sama (nilai)	76,96	3	Penyelarasan relasi agama dan budaya		Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilitas Ekonomi	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	720.000.000	1.015.031.416
		4			Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama		Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilitas Ekonomi	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	-	720.000.000	1.015.031.417	
		5			Pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan		Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilitas Ekonomi	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	720.000.000	1.015.031.418	

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (nilai	15	1	Peningkatan budaya literasi		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	532.319.650	270.328.500
2	Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra					Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam	-			-			
3	Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	1.438.000.000	895.930.390		
4	Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi							Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
<b>JUMLAH PN 4</b>												<b>987.834.693.342</b>	<b>221.260.910.168</b>

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1 Infrastruktur Pelayanan Dasar	Rasio outstanding KPR terhadap PDB (%)	3,26	1	Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau	Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui peran pemerintah (unit)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	4.500.000.000	3.923.038.830
	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)		94,18	Jumlah hunian yang terbangun melalui peran masyarakat dan dunia usaha (unit)			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	-	-	
	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)		83,55	Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan, termasuk SMF dan TAPERA (rumah tangga)			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	-	10.000.000.000	4.414.108.330	

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)	75,99			Jumlah rumah tangga berpendapat rendah yang menerima bantuan/ subsidi pembiayaan perumahan berupa bantuan uang muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) (rumah tangga)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	-	10.000.000.000	4.414.108.330
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	92,76			Jumlah peningkatan kualitas hunian melalui peran pemerintah (unit)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	-	10.000.000.000	4.414.108.330
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	15			Jumlah kabupaten/ kota yang mengembangkan iklim kondusif perumahan melalui reformasi perizinan dan administrasi pertanahan (kabupaten/kota)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Kawasan Permukiman	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	25,53			Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan (kabupaten/kota)	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	4.900.000.000	2.963.975.370
			Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan (%)	67,23			Jumlah luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu (Hektar)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	10.000.000.000	4.414.108.330
			Persentase PDAM dengan kinerja sehat (%)	100				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	-	10.000.000.000	4.414.108.330
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah	86 layak termasuk 12 aman	2	Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala kota/regional (SR)	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam	-	26.339.298.471	19.465.876.630

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			domestik layak dan aman (%)					n Persampahan		Daerah Kabupaten/Kota			
			Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) ditempat terbuka (%)	3			Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	26.339.298.471	8.602.786.312
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaane (%)	80 penanganan dan 20 pengurangan			skala permukiman (SR) Jumlah rumah tangga yang terlayani IPLT (RT)	Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	54.800.000.000	159.708.209.910
			Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan (menit)	22			Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill (RT)	Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	54.800.000.000	

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan air bakunya secara berkelanjutan (kab/kota)	97			Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R (RT)	Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	54.800.000.000	
			Volume tampungan air per kapita (m3/kapita)	66,34			Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R (RT)	Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	54.800.000.000	
			Persentase luas sawah beririgasi (%)	69,1			Jumlah kabupaten/ kota yang memiliki sistem pengelolaan air limbah, termasuk layanan lumpur tinja (Kab/Kota)	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	26.339.298.471	19.465.876.630
			Luas daerah irigasi yang dimodernisasi (hektar)	11.956			Jumlah kabupaten/ kota yang memiliki sistem pengelolaan sampah domestik (Kab/Kota)			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (SR)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	5.160.000.000	9.770.915.562
							Jumlah rumah tangga dengan akses air minum Bukan Jaringan Perpipaan (RT)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	5.160.000.000	9.770.915.562
							Jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman (RT)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	5.160.000.000	9.770.915.562
							Persentase PDAM dengan kinerja sehat (%)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	5.160.000.000	9.770.915.562

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Persentase angka BABS di tempat terbuka (%)	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	26.339.298.471	19.465.876.630
					3	Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan	Tambahan penyediaan air baku dari sumber air berkelanjutan (m3/detik)	Peningkatan Konduktivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	128.465.000.000	112.195.729.674
				Jumlah wilayah sungai yang menetapkan kebijakan pengelolaan SDA Terpadu (wilayah sungai)			Peningkatan Konduktivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	128.465.000.000	112.195.729.674	
				Jumlah BBWS/BWS yang melaksanakan Pengelolaan SDA terpadu berbasis teknologi cerdas			Peningkatan Konduktivitas Wilayah dalam rangka	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1	-	128.465.000.000	112.195.729.674	

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							(smart water management) (unit)	Stabilisasi Ekonomi		(satu) Daerah Kabupaten/Kota			
					4	Keselamatan dan Kemanan Transportasi	Rasio kejadian kecelakaan pelayaran per 10.000 pelayaran (rasio)			-	-	-	
							Rasio kejadian kecelakaan penerbangan per 1 juta penerbangan (rasio)						
							Rasio kejadian kecelakaan KA per 1 juta km perjalanan KA (rasio)						
							Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan (menit)						
					5	Ketahanan dan Kemananan Transportasi		Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	39.340.000.000	96.223.601.659

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	601.600.000	597.405.336
								Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	-	8.272.000.000	10.123.870.230
								Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas	-	75.000.000	23.600.000
								Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	75.000.000	71.206.500

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Antarwilayah		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
					6	Ketahanan Kebencanaan	Jumlah Provinsi yang meningkatkan ketahanan pangan bencana (hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan) (Provinsi)			-	-	-	
				Infrastruktur		Jumlah wilayah sungai yang menerapkan restorasi dan konservasi lingkungan dan sumber daya air (wilayah sungai)							
					7	Waduk Multipurpose dan modernisasi irigasi	Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air (miliar m3) (Kumulatif)	Peningkatan Konduktivitas Wilayah dalam rangka	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi	-	425.000.000	2.906.833.508

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA							
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							Jumlah bendungan yang ditingkatkan fungsinya (unit) (kumulatif)	Stabilisasi Ekonomi		yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
						Jumlah bendungan dengan peningkatan kinerja dan penurunan indeks risiko (unit)								
						Presentase daerah irigasi dengan indeks kinerja di atas 70 persen (persen) (kumulatif)								
						Luas lahan beririgasi untuk komoditas non padi (Hektare)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	7.647.721.411	7.562.111.994		
		2	Infrastruktur Ekonomi	Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota (%)	95/74/64	1	Konektivitas Jalan	Panjang jalan baru yang dibangun (3.000 km)	Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	684.327.272.194	584.485.886.488

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR		PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/atau beroperasi (km)	1.513			Persentase kondisi mantap jalan nasional (97%)						
			Panjang jalan tol baru yang terbangun (km)	2.410			Persentase kondisi mantap jalan provinsi (75%)						
			Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif) (km)	7.255			Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/ kota (65%)						
			Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar (lokasi)	7			Panjang jalur KA yang dibangun (termasuk reaktivasi dan jalur ganda) (km)						
			Jumlah rute subsidi tol laut (rute)	35	2	Konektivitas Kereta Api	Persentase kondisi jalur KA sesuai standar <i>Track Quality Index kategori 1 dan 2 (persen)</i>						
			Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (kumulatif) (lokasi)	23 (17 selesai, 6 berlanjut)			Panjang jalur KA yang beroperasi (km)						

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA							
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			Jumlah bandara baru yang dibangun (kumulatif) (lokasi)	12 (selesai)			Jumlah simpul transportasi yang terakses Kereta Api (bandara dan pelabuhan) (lokasi)			-	-	-			
			Jumlah rute jembatan udara (rute)	44	3	Konektivitas Laut	Jumlah pelabuhan-pelabuhan utama yang mencapai standar pelayanan (28 pelabuhan) (lokasi)			-	-	-			
							Jumlah trayek subsidi tol laut (25 trayek) (trayek)								
							4	Konektivitas Udara	Jumlah rute jembatan udara (43 rute) (Rute)						
									Jumlah bandara baru yang dibangun (21 lokasi) (lokasi)						
							Jumlah bandara hub primer yang ditingkatkan kapasitasnya (10 lokasi) (lokasi)			-	-	-			
							Jumlah bandara perairan (waterbased airport) yang dibangun (5 lokasi) (lokasi)								

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					5	Konektivitas Darat	Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (36 lokasi) (lokasi)			Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-	
		3 Infrastruktur Perkotaan	Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang kereta api/flyover/underpass (kumulatif) (kota)	10	1	Transportasi Perkotaan	Jumlah angkutan massal berbasis rel yang dibangun (kota)			-	-	-	
	Jumlah sistem angkutan umum massal di perkotaan besar lainnya yang dikembangkan (kota)		6	Jumlah jalur khusus BRT yang dibangun/dikembangkan (kota)									
	Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota (kawasan)		10	Jumlah angkutan umum perkotaan berbasis jalan (BRT dan Sistem Transit) yang dibangun (kota)			Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah	-	50.000.000	1.282.661.650	

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA							
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
					2	Infrastruktur dan Ekosistem TIK perkotaan	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar terhadap total rumah tangga (persen)(kumulatif)				-	-	-	
					3	Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman di perkotaan	Jumlah kawasan perkotaan prioritas dengan penyediaan dan penyelenggaraan akses air minum dan air limbah yang aman dan handal (Kab/kota)	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	26.339.298.471	8.602.786.312	
				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	5.160.000.000	9.770.915.562		
				4				Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan	Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan (kawasan)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	-	10.000.000.000

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		4 Energi dan Ketenagalistrikan	Jumlah produksi tenaga listrik (GWh)	431.281,20	1	Keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan	Penurunan intensitas Energi Final (SBM/Miliar Rupiah)				-	-	-	
			Penurunan emisi CO2 pembangkit (juta ton)	6,07			Porsi kapasitas terpasang pembangkit EBT terhadap total pembangkit (%)							
			Jumlah pengguna listrik (ribu rumah tangga-kumulatif)	85.216	2	Akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan	SAIDI menjadi (jam/ pelanggan)					-	-	-
			Jumlah sambungan rumah jaringan gas kota (kumulatif,sambungan rumah)	4.010.445			Penyediaan gas (SBM)							
			Jumlah kapasitas kilang minyak-kumulatif (Barrel per Calendar Day/BPCD)	1.276.000	3	Kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik	Produksi tenaga listrik (TWh)					-	-	-
					Cadangan operasional BBM (hari)									

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5 Transformasi Digital	Persentase rata-rata pertumbuhan sektor TIK (%)	8,8	1	Penuntasan Infrastruktur TIK	Persentase desa berpenduduk yang mendapatkan akses mobile broadband	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	9.167.555.205	9.972.634.237
			Persentase pengguna internet (%)	82,3			Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)						
			Proporsi individu yang menguasai/miliki telepon genggam (%)	75,7			Persentase rasio harga layanan <i>fixed broadband</i> terhadap pendapatan perkapita (pada kecepatan up to 30 Mbps)						
							Persentase rasio harga layanan <i>mobile broadband</i> terhadap pendapatan per kapita (dilihat dari rata-rata kuota 1 GB)						
							Persentase jangkauan populasi penyiaran TV digital						

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA							
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							Persentase populasi yang terlayani penyiaran radio publik							
							Persentase kontribusi sektor TIK terhadap PDB			-	-	-		
					2	Pemanfaatan Infrastruktur TIK	Persentase K/L/D yang memiliki layanan publik terintegrasi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-		1.680.000.000	382.856.304
					3	Fasilitas pendukung transformasi digital	Jumlah peserta pelatihan digital skill (termasuk kawasan prioritas)				-	-	-	

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							untuk menuju ekonomi digital							
<b>JUMLAH PN 5</b>												<b>1.583.152.641.165</b>	<b>1.367.757.511.342</b>	
PN 6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA) (nilai)	55,5	1	Pencegahan pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan (lokasi)	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	5.726.160.000	2.622.290.039
				Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) (nilai)	60,5		Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang terpantau memenuhi baku mutu lingkungan hidup (perusahaan)	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	1.000.000.000	936.453.177	
				Indeks Kualitas Udara (IKU) (nilai)	84,5		Luas area dengan nilai tinggi yang konservasi dipertahankan secara nasional (juta ha)							

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA							
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL) (nilai)	65,5			Persentase penurunan luas areal hutan dan lahan yang terbakar setiap tahun terhadap <i>baseline</i> rerata luas karhutla tahun 2015 s.d. 2019 (persen)							
								Luas kawasan konservasi (juta ha)	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	297.450.000	279.748.500
								Luas Kawasan Konservasi Perairan (juta ha)						
							Akurasi informasi meteorologi (persen)							
					2	Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah sampah yang dikelola secara nasional (juta ton)	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	-	82.262.839.803	11.018.116.570	
								Persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	-	82.262.839.803	11.018.116.570

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							dari <i>baseline</i> ( <i>persen</i> )	dan Pengelolaan Persampahan					
							Jumlah limbah B3 yang dikelola (juta ton)						
							Persentase penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari baseline 4.546.946,30 kg BOD/hari ( <i>persen</i> )						
					3	Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut (ha)			Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten/Kota			
							Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan secara nasional (ton)						
							Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak						

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							yang dipulihkan (lokasi)  Jumlah spesies TSL punah yang ditingkatkan populasinya (jenis) terancam						
					4	Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan (persen)	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	1.000.000.000	936.453.177
							Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani (kasus)	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-	290.073.475	240.261.610

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman (ha)			Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten/Kota			
							Jumlah daerah yang memiliki Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (daerah)	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-	1.306.200.000	1.279.833.495
		2	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (%)	0,1	1	Penanggulangan Bencana	Rasio investasi PRB terhadap APBN (rasio)			-	-	-
			Penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (%)	1,15				Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	-	4.603.202.491	4.880.064.262
			Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	3	2	Peningkatan Ketahanan Iklim	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor kelautan dan pesisir (persen)			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan	-	-	

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										Adaptasi Perubahan Iklim			
							Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor air (persen)			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	-	-	
							Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor pertanian (persen)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	1.536.213.840	2.150.273.200
							Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor kesehatan (persen)			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	-	-	
		3	Pembangunan Rendah Karbon	Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi	10,15; 11,8	1	Pembangunan Energi Berkelanjutan				-	-	

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			(%) kumulatif, tahunan										
			Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (%)_kumulatif, tahunan	37,79; 57,2			Intensitas energi primer (SBM/Rp Miliar)						
			Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (%)_kumulatif, tahunan	6,99; 9,4			Penurunan Intensitas Energi Final (SBM/Rp Miliar)						
			Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (%)_kumulatif, tahunan	5,24; 2,87	2	Pemulihan Lahan Berkelanjutan	Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut (ha)			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L P2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/K P2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan			
			Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan	6,90; 7,30			Luas tutupan hutan yang ditingkatkan secara nasional (ha)						

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA							
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			(%)_kumulatif, tahunan				Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B (persen)			Berkelanjutan/LCP2B				
					3	Pengelolaan Limbah	Jumlah sampah yang dikelola secara nasional (juta ton)	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	-	82.262.839.803	11.018.116.570	
				Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill (KK)										
				Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R (RT)										
				Jumlah rumah tangga yang terlayani TPST (RT)										

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					4	Pengembangan Industri Hijau	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) (persen)			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	200.000.000	880.786.450
					5	Rendah Karbon Pesisir dan Laut	Jumlah luas rehabilitasi hutan mangrove (ha)			-	-	-	
<b>JUMLAH PN 6</b>											<b>262.747.819.215</b>	<b>47.260.513.620</b>	

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PN 7	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	1 Konsolidasi Demokrasi	IDI Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (nilai)	83,71	1	Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi (Angka target merupakan Proyeksi dengan Intervensi Kebijakan)	Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	104.567.805.000	104.201.596.621
			IDI Aspek Kebebasan (nilai)	72,53	2	Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Skor IDI Variabel Kebebasan (Angka target merupakan Proyeksi dengan Intervensi Kebijakan)	Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	-	104.567.805.000	104.201.596.621
			IDI Aspek Kesetaraan (nilai)	81,94			Skor IDI Variabel Kesetaraan (Angka target merupakan dengan Intervensi						

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA								
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
			Jumlah Regulasi/Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pusat dan Daerah yang Terintegrasi Sesuai Asas-asas Keterbukaan Informasi Publik (dokumen)	11			Kebijakan) Proyeksi		Budaya Politik	Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						
							Indeks Kerawanan Pemilu									
							Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI									
							Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi						Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakatan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		103.400.000
							Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/ Kota			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakatan Kewenangan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik,		103.400.000			

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Hukum, Sosial dan Ekonomi		
					3	Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Persentase (%) konten informasi publik yang berkualitas Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	9.167.555.205	9.972.634.237
		2	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	Jumlah Forum yang Dipimpin oleh Indonesia pada Tingkat Regional dan Multilateral (forum)	16	1	Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim			-	-	-

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional (nilai)	4			Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI							
			Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri (nilai)	92	2	Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional	Jumlah Program/Kegiatan Kerjasama Selatan-Selatan Triangular			-	-	-		
					3	Peningkatan Citra Positif di Dunia Internasional	Indeks citra Indonesia di dunia internasional			-	-	-		
					4	Peningkatan Peran Indonesia di tingkat Regional dan Global	Jumlah forum yang dipimpin oleh Indonesia pada tingkat regional dan multilateral			-	-	-		
					1	Penataan Regulasi	Persentase <i>judicial review</i> yang dikabulkan MK dan MA			-	-	-		
		3	Penegakan Hukum Nasional	4,14	2	Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata	Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek enforcing contracts			-	-	-		
							Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek							

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							resolving insolvency							
							Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek getting credits							
							Persentase Pelaku Residivis							
					3	Penguatan Sistem Anti Korupsi	IPAK			-	-	-		
					4	Peningkatan Akses terhadap Keadilan	Indeks Akses terhadap keadilan			-	-	-		
		4	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Indeks Pelayanan Publik (nilai Kementrian/L embaga; Provinsi;	4,2; 4; 3,80	1	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	Persentase Kementerian dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Kepegawaian Daerah	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	1.156.522.000	1.459.157.500
							Persentase LPNK dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas							
							Persentase Provinsi dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas							

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Persentase Kabupaten/ Kota dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas						
					2	Transformasi pelayanan publik	Jumlah instansi pemerintah dengan tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik	Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-		
								Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	-	75.000.000	23.600.000
								Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-	50.000.000	174.202.000

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA							
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
					3	Penataan Kelembagaan dan proses bisnis	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian /Lembaga) dengan Indeks Maturitas SPBE Baik Keatas Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks Maturitas SPBE Baik Keatas Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/ Kota) dengan Indeks Maturitas SPBE Baik Keatas	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-		12.868.783.000	20.681.072.257
					4	Reformasi Sitem Akuntabilitas Kinerja	Persentase Instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga) yang mendapatkan Opini WTP Pusat Persentase Instansi Pemerintah Provinsi yang	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan	-		315.000.000	646.434.750

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							mendapatkan Opini WTP	Pelayanan Publik		Keuangan Daerah			
							Persentase Instansi Pemerintah Kabupaten yang mendapatkan Opini WTP	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	315.000.000	646.434.750
							Persentase Instansi Pemerintah Kota yang mendapatkan Opini WTP			-	-	-	
							Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian /Lembaga) dengan Skor B Ke atas Atas SAKIP	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Penataan Organisasi	-		
							Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Skor B Ke atas Atas SAKIP	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Penataan Organisasi	-		

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/ Kota) dengan Skor B Ke atas Atas SAKIP	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Penataan Organisasi	-		
		5 Menjaga stabilitas keamanan nasional	Indeks Kekuatan Militer (nilai)	0,21	1	Penguatan Keamanan Dalam Negeri	Indeks Risiko Terorisme (Pelaku)	Peningkatan Konduktivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	1.958.800.000	2.149.045.731
			Indeks Terorisme Global (nilai)	4,29			Indeks Risiko Terorisme (Target)						
			Persentase Orang yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	>60			Angka Pelanggaran Lintas Batas Negara						
			Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (nilai)	3,3			Angka Kejadian Konflik						
					Angka Korban Pengungsi Internal								
					2	Penguatan Kemampuan	Pemenuhan MEF			-	-	-	

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Pertahanan dibarengi Confidence Building Measures (CBM)	Persentase Kontribusi Industri Pertahanan						
					3	Penguatan Keamanan Laut	Angka Pelanggaran Hukum dan Gangguan Keamanan di Laut			-	-	-	
					4	Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Angka Prevalensi Penyalahguna Narkotika	Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	720.000.000	
				Crime Rate			Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	1.958.800.000	2.149.045.731	

N O.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Pelayanan Publik Polri yang Prima	Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	104.567.805.000	104.201.596.621
					5	Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber	Skor Global Cyber Security Index	Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	1.958.800.000	2.149.045.731

N O.	PRIORITA S NASIONA L	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGE T 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORIT AS KABUPA TEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIAT AN	ANGGARA N 2024	REALISASI ANGGARA N 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											JUMLAH PN 7	356.264.075. 205	352.655.462. 550

### 3.5.2. DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI

Berdasarkan arah kebijakan yang diuraikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 prioritas pembangunan daerah Jawa Barat untuk tahun 2024 diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis Jawa Barat, antara lain: kualitas dan daya saing sumber daya manusia, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan wilayah dan infrastruktur dasar, serta reformasi birokrasi dan inovasi daerah. Adapun program prioritas pembangunan Jawa Barat untuk tahun 2024, yaitu:

- 1) Pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi, penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan, serta pengembangan pariwisata;
- 2) Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan serta pendidikan agama;
- 3) Penguatan sistem kesehatan daerah;
- 4) Penguatan sistem perlindungan sosial dan kesiapsiagaan penanggulangan resiko bencana;
- 5) Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup serta gerakan membangun desa; dan
- 6) Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.

Di samping itu, kegiatan di tahun 2024 juga diarahkan pada penormalan ekonomi; operasi, pemeliharaan, optimalisasi, rehabilitasi proyek strategis; keberlanjutan Program Jabar Juara; pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM); reformasi birokrasi; serta penyelesaian program strategis.



## **BAB IV**

### **FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA**

#### **4.1 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA**

Tingkat capaian penyerapan APBD Kabupaten Bekasi dan Capaian kinerja program dan kegiatan sampai Triwulan IV tahun 2024, secara umum di pengaruhi oleh beberapa faktor pendorong dan penghambat yang sebagai berikut :

##### **A. Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :**

1. Arah kebijakan nasional dan regional yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah serta dukungan ketersediaan anggaran untuk menunjang pelaksanaan program yang relevan di daerah;
2. Arah kebijakan nasional dan regional provinsi yang mendukung prioritas peningkatan kompetensi SDM aparatur penyelenggaran pembangunan;
3. Penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, baik teknis (proses) maupun administratif (dokumen perencanaan);
4. Komitmen pimpinan dan aparatur untuk pelaksanaan program dan kegiatan /sub kegiatan untuk selalu normatif sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Terlaksananya kegiatan sesuai dengan waktu yang ditentukan sesuai Arahan dan bimbingan dari pimpinan yang optimal, Dukungan dari staf dan bawahan, Perencanaan kerja yang telah dipersiapkan, Dukungan anggaran yang tersedia, Dukungan data dan informasi yang akurat serta terjalannya komunikasi dan koordinasi yang cukup baik.
6. Sinergitas yang baik antara pimpinan dan bawahan dalam melaksanakan kegiatan.
7. Sudah terbangun mekanisme koordinasi dan komunikasi antar PD maupun dengan institusi pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan;
8. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam keterlibatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Selanjutnya, faktor pendorong capaian kinerja yang dari perangkat daerah terkait dengan pelaksanaan perencanaan Pembangunan Kabupaten Bekasi, antara lain:



## 1. Dinas Lingkungan Hidup

- 1) Dukungan yang baik dari pimpinan serta saling koordinasi dan kolarbosasi dalam proses pelaksanaan kegiatan;
- 2) Struktur dan pengembangan kompetensi personil dan kapasitas SDM yang menangani pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan persampahan di Kabupaten Bekasi;
- 3) Pendanaan dan alokasi anggaran dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan persampahan;
- 4) Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana aksi kegiatan;
- 5) Mulai masifnya pemantauan kualitas air dan udara didukung dengan pelaksanaan Pemantauan Kualitas Air dan Udara yang didukung dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan sistem online;
- 6) Terlaksananya KLHS pada dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen rencana tata ruang;
- 7) Meningkatnya pembinaan terhadap pelaku usaha dan/ atau kegiatan serta masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup;
- 8) Meningkatnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha dan/ atau kegiatan yang sesuai dengan peraturan lingkungan hidup yang berlaku;
- 9) Terlaksananya ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- 10) Terlaksananya dokumen Rencana Aksi melalui kajian bidang pengelolaan lingkungan hidup yang sudah disusun;
- 11) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang memadai;
- 12) Terlaksananya penyusunan kajian identifikasi kawasan bernilai penting bagikonservasi keanekaragaman hayati; dan
- 13) Adanya Forum Group Discussion Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca untuk mengevaluasi hasil inventarisasi tahun sebelumnya dan meningkatkan koordinasi antar PD sehingga data yang diperoleh sesuai.

## 2. Dinas Pemadam Kebakaran

- 1) Adanya usulan dari masyarakat melalui Musrembang untuk peningkatan kegiatan penyuluhan di setiap kecamatan, desa/kelurahan;



- 2) Adanya partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan dini bahaya kebakaran;
- 3) Adanya peraturan daerah dan peraturan yang lebih tinggi tentang proteksi kebakaran terhadap bangunan dan gedung;
- 4) Adanya peningkatan kapasitas sumber daya melalui lembaga-lembaga pelatihan secara rutin, agar kemampuan dan keterampilan petugas pemadam kebakaran dan penyelamat (*rescue*) terus meningkat; dan
- 5) Adanya aparatur pemadam kebakaran yang disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas untuk melayani masyarakat.

### **3. Dinas Perikanan**

- 1) Peningkatan kualitas SDM Perikanan, dengan dilakukannya pelatihan untuk para pembudidaya ikan kecil, nelayan dan unit pengolah ikan; dan
- 2) Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana produksi perikanan Kabupaten Bekasi.

### **4. Dinas Pertanian**

- 1) Perubahan alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman yaitu meningkatnya potensi warga kabupaten bekasi untuk memiliki hewan peliharaan sehingga meningkatnya kebutuhan obat hewan;
- 2) Ada beberapa komoditas hortikultura yang mengalami kenaikan ataupun penurunan. Komoditas yang mengalami kenaikan produksi antara lain adalah Bawang merah, Bayam, kangkung, tomat, cabe keriting, cabe TW, Jamur tiram, Jambu air, lengkuas. Sedangkan yang mengalami penurunan produksi antara lain adalah : Kencur, Jahe, Caisim, Cabe rawit, Jamur merang, Jambu biji, Mangga, Pisang dan Pepaya. Penyebab produksi mengalami penurunan antara lain berasal dari faktor eksternal, yaitu faktor alam yang sangat panas/cuaca ekstrem atau El Nino yang sangat berdampak terhadap tanaman hortikultura tersebut;
- 3) Keberhasilan tersedianya dukungan anggaran dan sarana budidaya produksi tanaman pangan;
- 4) Semakin meningkatnya populasi ternak dan bertambahnya usaha budidaya ternak;
- 5) Dukungan anggaran dari pemerintah daerah Kabupaten Bekasi;
- 6) Jumlah anggaran yang mencukupi untuk mengakomodir semua usulan musrebang dan pokpir;



- 7) Sarana prasarana yang mendukung pelayanan inseminasi buatan (Plastiksheat, plastik gloves, straw, N2 cair);
- 8) Anggaran, sarana prasana yang tersedia;
- 9) Dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi memberikan anggaran APBD dan DID yang digunakan untuk belanja bahan kimia dan pupuk dan pompa 3 inch;
- 10) Dukungan dari Pemerintah pusat yang memberikan Bantuan benih padi sebanyak 294.038 kg . Pemerintah Kabupaten Bekasi juga memberikan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) dan Dana Insentif Daerah (DID) yang digunakan untuk Belanja benih, handsprayer dan pompa (3,4, dan 6 inch) untuk wilayah yang terdampak bencana kekeringan;
- 11) Tersedianya SDM (Sumber Daya Manusia) yang membantu petani secara langsung di lapangan yaitu Petugas POPT (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan) yang terdapat di Setiap Kecamatan;
- 12) Dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman yaitu meningkatnya potensi warga kabupaten bekasi untuk memiliki hewan peliharaan sehingga jumlah dokter hewan praktek meningkat;
- 13) Tersedianya Programa Penyuluhan Pertanian, rencana kerja tahunan dan terlaksananya kunjungan lapangan;
- 14) Komitmen petani dalam mendukung kelembagaan, fungsi kelembagaan sudah berjalan, adanya dukungan dari Instansi terkait; dan
- 15) Lahan demplot, petani pelaksana kegiatan, penyuluh pertanian pendamping kegiatan.

## 5. Dinas Sosial

- 1) Komitmen Pemangku Kepentingan  
Keterlibatan dan komitmen yang kuat dari pemangku kepentingan, termasuk pimpinan organisasi, masyarakat, dan mitra kerja, dapat menjadi pendorong utama untuk kesuksesan evaluasi.
- 2) Partisipasi Aktif Masyarakat  
Partisipasi aktif dan kontribusi masyarakat dalam proses evaluasi dapat memberikan wawasan dan perspektif yang lebih luas terhadap dampak program sosial.
- 3) Pemahaman yang Jelas Terhadap Renja



Pemahaman yang jelas terhadap Renja dan tujuan program oleh seluruh pihak terlibat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses evaluasi.

4) Ketepatan Indikator Kinerja

Indikator kinerja yang tepat dan terukur dapat menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk menilai pencapaian tujuan Renja.

5) Fleksibilitas Terhadap Perubahan

Organisasi yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan dapat merespon temuan evaluasi dengan cepat dan efektif.

6) Ketepatan Waktu Pelaporan

Pengumpulan dan pelaporan data evaluasi yang tepat waktu dapat memberikan informasi yang aktual untuk mendukung pengambilan keputusan.

## 6. Dinas Kesehatan

1) Pemanfaatan Posyandu secara optimal diseluruh wilayah Puskesmas, adanya jaminan persalinan yang berkontribusi terhadap peningkatan keselamatan Ibu Hamil saat melahirkan, pelayanan kesehatan yang diperuntukkan untuk lansia, masyarakat yang dimudahkan untuk mengakses fasilitas kesehatan serta peran aktif petugas kesehatan dalam pemanfaatan Posyandu;

2) Membuat regulasi kebijakan daerah untuk upaya penurunan AKI. Peningkatan Skrining Jejaring Layak Hamil, kelas ibu hamil, P4K, Desa Siaga untuk semua Fasyankes. Pembinaan dari Puskesmas untuk seluruh SPKS yang ada di wilayah kerja;

3) Membuat regulasi kebijakan daerah untuk upaya penurunan AKB. Updating Pelatihan Resusitasi Neonatus untuk seluruh Nakes ASN dan Non ASN yang berkolaborasi dengan Organisasi Profesi. Pembinaan TPMB yang menyumbang kematian pada wilayah kerja Puskesmas masing-masing; dan

4) Tenaga kesehatan yang sudah terampil melakukan skrining Kesehatan.

## 7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil dengan mengakomodir aspirasi yang berkembang di masyarakat yang disinergikan dengan program Nasional, program dan kegiatan Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bekasi serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun berdasarkan masukan dari Musrenbang Desa, Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (FORUM-PD) dan Musrenbang Kabupaten.

#### **8. Dinas Perhubungan**

- 1) Meningkatnya Kualitas SDM Aparat Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi;
- 2) Optimalisasi Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Bekasi melalui pembagian tugas yang jelas;
- 3) Meningkatnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan pihak kedua/dinas/instansi terkait dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan;
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan, dengan maksud untuk mengetahui sedini mungkin kendala dan hambatan serta kekurangan dalam pelaksanaannya; dan
- 5) Mengalokasikan dana khusus APBD untuk kegiatan team teknis administrasi pengadaan barang/jasa, dengan maksud agar petugas kesekretariatan, khususnya tenaga teknis administrasi pengadaan barang/jasa dapat membantu sepenuhnya kelancaran administrasi dan kegiatan team/panitia barang/jasa dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

#### **9. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan**

- 1) Terpenuhinya fasilitas, penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana.
  - a. Tersedianya Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Bantuan Sosial Pembangunan dan Rehabilitasi atau Relokasi Rumah Korban Bencana di Kabupaten Bekasi; dan
  - b. Keputusan Bupati Bekasi nomor HK.02.02/Kep.331-DISPERKIMTAN/2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Penerima Bantuan Sosial untuk Pembangunan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana TA 2024.
- 2) Meningkatnya Ketersediaan Jalan Lingkungan Permukiman dan Perumahan dalam kondisi baik



- a. Terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan, Rumah Susun dan Perniagaan di Kabupaten Bekasi; dan
  - b. Terdapat Keputusan Bupati Bekasi Nomor HK.02.02/Kep.522-Disperkimtan/2024, tanggal 31 Juli 2024, tentang Penetapan Calon Penerima Calon Lokasi Penerima Bantuan Pembangunan Infrastruktur Permukiman.
- 3) Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan jalan
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan, Rumah Susun dan Perniagaan di Kabupaten Bekasi;
  - b. Surat Edaran Bupati Bekasi Nomor 050 / SE-81 /Disperkimtan Tanggal 20 Oktober 2021 tentang Petunjuk teknis pengajuan usulan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
  - c. Tahap KUA-PPAS dianggarkan sebesar 57.300.000.000,- dengan lokasi : Pengadaan tanah untuk pelebaran jalan Marunda dan sekitar overpass Perlintasan Jalan tol Cibitung - Cilincing di Desa Segara Makmur dan Pantai Makmur Kec. Tarumajaya Kabupaten Bekasi III; Pengadaan tanah untuk pelebaran jalan Tegaldanas – Cibeber Tahap V; Pengadaan tanah untuk Fly Over Lemah Abang Tahap V; Pengadaan tanah untuk pengendalian Banjir Kali Bekasi Tahap III; dan
  - d. Serah terima Jalan Lingkungan dari Pengembang seluas 85.440 M2.
- 4) Meningkatnya akses Masyarakat terhadap Ketersediaan sanitasi
- a. Dokumen Review SSK dan Sanitasi Kabupaten Bekasi Tahun 2022;
  - b. Kebijakan berupa SK Bupati Nomor HK.02.02/Kep.452-BAPPEDA/2022; tentang Desa /Kelurahan Prioritas Penanganan Intervensi Penurunan Stunting di Kabupaten Bekasi Tahun 2024; dan
  - c. Laporan Capaian Sanitasi dilakukan pada aplikasi SI-STBM.
- 5) Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum
- a. Terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan, Rumah Susun dan Perniagaan di Kabupaten Bekasi;
  - b. Surat Edaran Bupati Bekasi Nomor 050 / SE-81 / Disperkimtan Tanggal 20 Oktober 2021 tentang Petunjuk teknis pengajuan usulan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;



- c. Usulan permohonan lokasi pembebasan lahan dari instansi terkait sudah lengkap yaitu Perluasan TPA Burangkeng (21.998 M<sup>2</sup>);
  - d. Usulan permohonan lokasi lahan dari instansi terkait sudah lengkap yaitu Pengadaan Tanah Untuk Penanganan Konstruksi Permanen Tanggul Sungai Citarum Hilir Desa Lenggahjaya Kec.Cabangbungin (4.065 M<sup>2</sup>);
  - e. serah Terima Lahan TPU dari Pengembang seluas 90.179 M<sup>2</sup>; dan
  - f. Serah Terima Fasos - Fasum ( 11 Pengembang) seluas 181.162 M<sup>2</sup>.
- 6) Meningkatnya luasan Kawasan kumuh yang tertangani
- a. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Program Berseka (Bersih, Sehat dan Berkah);
  - b. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 663/Kep.508-Disperkimtan/2020 tentang Penetapan LokasiKawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bekasi TA 2020;
  - c. Berita Acara Kesepakatan Perhitungan dan Penetapan Pengurangan Luasan Kumuh di Kabupaten Bekasi Nomor PU.03.02/2949/Disperkimtan/XII/2022 Tanggal 26 Desember 2022; dan
  - d. Dokumen RP2KPKPK Tahun 2024.

## 10. Dinas Pendidikan

- 1) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan dasar unIersal bermutu dan kesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten dan kota melalui:
  - a. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan dasar yang bermutu antar propinsi, kabupaten dan kota yang meliputi penyediaan guru SD/SDLB dan SMP/SMPLB;
  - b. perluasan pemerataan akses SD/SDLB darn SMP/SMPLB bermutu dan kesetaraan gender di semua propinsi, kabupaten dan kota;
  - c. perluasan dan pemerataan akses pendidikan Paket A dan Paket B bemutu dan kesetaraan gender di semua propinsi, kabupaten dan kota; dan
  - d. penyediaan model pembelajaran, data dan infomasi berbasisiset, dan standar mutu pendidikan dasar, serta keterlaksanaan akreditasi pendidikan dasar.



- 2) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan kesetaraan menengah bermutu, kesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua propinsi, kabupaten dan kota melalui:
  - a. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan menengah bermutu yang meliputi penyediaan tenaga kependidikan paket.;
  - b. perluasan dan pemerataan akses pendidikan Paket C bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua provinsi, kabupaten dan kota; dan
  - c. ketersediaan model kurikulum dan pembelajaran data dan informasi berbasis riset dan standar mutu pendidikan kesetaraan menengah serta keterlaksanaan akreditasi pendidikan kesetaraan menengah.
- 3) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dilaksanakan melalui:
  - a. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan orang dewasa bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di provinsi yang meliputi peningkatan tingkat literasi yang berkesetaraan gender di kabupaten dan kota;
  - b. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan orang dewasa bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di provinsi yang meliputi peningkatan tingkat literasi yang berkesetaraan gender di kabupaten dan kota; dan
  - c. Penyediaan model pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar nasional pendidikan orang dewasa berkelanjutan serta keterlaksanaan akreditasi pendidikan orang dewasa berkelanjutan.

#### **11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- 1) Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana fasilitas pelayanan pengaduan Korban Perempuan dan Anak;
- 2) Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana fasilitas untuk pembelajaran SEKOCI di lokasi P2WKSS;
- 3) Memfasilitasi Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan;
- 4) Meningkatkan sistem aplikasi data terpadu mengenai Laporan Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak;



- 5) Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Lintas Sektor terkait Penyusunan ARG; dan
- 6) Sudah Tersedianya Rumah Aman.

## **12. DPMPTSP**

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan PD terkait dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
- 2) Memberdayakan seluruh staf dan pelaksana kegiatan melalui pembagian tugas kepada masing-masing staf dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan;
- 3) Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui kendala dan hambatan serta kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan, untuk diantisipasi dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang;
- 4) Meningkatkan Investasi melalui promosi investasi;
- 5) Meningkatkan pelayanan melalui sistem aplikasi;
- 6) Sosialisasi Pelayanan Perizinan melalui media elektronik;
- 7) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka peningkatan kinerja pada Tahun 2024.

## **13. Satpol PP**

- 1) Standar Operasi Prosedur yang Jelas;
- 2) Pengawasan oleh PPK dan PPTK terhadap pelaksanaan subkegiatan tetap on schedule dan capaian pelaksanaan subkegiatan dapat dimaksimalkan;
- 3) Pelatihan Bimtek terkait Tupoksi dan Kualitas SDM; dan
- 4) Koordinasi yang baik dengan berbagai instansi terkait.

## **14. Dinas Perdagangan**

- 1) Pembinaan terhadap pelaku UMKM terutama dari aspek kualitas sehingga dapat memiliki standar produk yang berorientasi ekspor;
- 2) Meningkatkan promosi dan pameran produk-produk UMKM yang berorientasi ekspor;
- 3) Melaksanakan kerjasama serta koordinasi dengan instansi lain seperti Kementrian, Pemerintah Provinsi, Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam upaya peningkatan ekspor, baik jumlah ataupun negara tujuan ekspor;
- 4) Peningkatan pelayanan SKA bagi para pelaku ekspor;



- 5) Peningkatan SDM Dinas Perdagangan dengan cara mengikuti BIMTEK, Workshop, Seminar dan Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Instansi Pembina/pusat maupun Provinsi;
- 6) Terkendalinya stok dan harga barang pokok dan penting; dan
- 7) Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dengan Kementrian, Pemerintah Pusat dan BUMN dalam rangka Pengendalian Stok dan Harga Komoditas tertentu

#### **15. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah**

- 1) Komitmen Pimpinan Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan kebijakan berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan;
- 2) Fasilitasi usulan penelitian dan pengembangan Badan sebagai dasar penyusunan kebijakan bagi Mitra Kerja Balitbangda; dan
- 3) Fasilitasi penjangkaran inovasi daerah, difusi inovasi daerah dan publikasi inovasi daerah dengan pendampingan dan kerjasama dalam pengembangan inovasi daerah.

#### **16. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang**

- 1) Forum Penataan Ruang Kab.Bekasi berjalan dengan baik dengan melakukan analisis komprehensif terhadap permohonan Persetujuan KKPR sehingga permohonan PKKPR yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Regulasi Sektoral dapat diminimalisir;
- 2) Help Desk Perizinan Pemanfaatan Ruang berjalan dengan baik sehingga dapat membantu masyarakat dalam proses permohonan perizinan;
- 3) Proses perizinan berbasis online/OSS RBA menjadikan proses perizinan transparan; dan
- 4) Pelaku usaha sudah banyak yang memahami RTRW Kabupaten Bekasi.

#### **17. Dinas Arsip dan Perpustakaan**

##### **A. Urusan Perpustakaan**

1. Adanya program literasi untuk kesejahteraan melalui transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Berbagai program dan kegiatan masyarakat dalam berkegiatan dan belajar di perpustakaan telah ditingkatkan dengan mengedepankan aspek kebermanfaatannya yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Sehingga melalui program tersebut perpustakaan dapat berkontribusi pada penyelesaian masalah sosial, ekonomi, pendidikan, maupun bidang lain seperti tingkat kesehatan masyarakat melalui literasi informasi kesehatan;



2. Tingginya antusiasme masyarakat dalam berpartisipasi pada kegiatan perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah turut diimbangi oleh perpustakaan berbasis inklusi sosial yang bersifat swadaya masyarakat sehingga 21 variabel peningkatan kunjungan semakin meningkat karena melalui beberapa program yang dilaksanakan dengan memperlihatkan sinergitas antara pemerintah daerah dan masyarakat.
- B. Urusan Kearsipan
1. Adanya regulasi daerah di Bidang Kearsipan;
  2. Adanya sarana penyimpanan arsip depo arsip / *record center* membuat pengelolaan arsip statis menjadi lebih intensif dan kondusif;
  3. Adanya program Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Dinamis kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi Intensif dalam Pengelolaan Arsip Dinamis Perangkat Daerah.

#### **18. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

- 1) Tersedianya Peraturan Bupati Bekasi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi;
- 2) Tersedianya Peraturan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil belum optimalnya Sistem penilaian kinerja;
- 3) Tersedianya Peraturan Bupati Bekasi Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pola Karier PNS;
- 4) Tersedianya Peraturan Bupati Bekasi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- 5) Tersedianya aplikasi kepegawaian yaitu Bekasi Integrated System Manajemen ASN (BISMA) dan Sistem Informasi Karyawan (SIKAWAN).

#### **19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

- 1) Sudah mulai terbentuknya forum-forum penanggulangan bencana yang membantu kinerja BPBD;
- 2) Sarana prasarana penanggulangan bencana relatif memadai; dan
- 3) Supporting penganggaran yang baik.



**20. Sekretariat DPRD**

- 1) Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD; dan
- 2) Penempatan SDM yang memadai dan proporsional serta professional.

**21. Kecamatan Babelan**

- 1) Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 2) Partisipasi dan keterlibatan serta dukungan masyarakat dalam pelaksanaan program, kegiatan cukup baik; dan
- 3) Tersedianya anggaran yang cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

**22. Kecamatan Cikarang Barat**

- 1) Adanya peraturan yang mendukung pelaksanaan tugas;
- 2) Pimpinan memiliki komitmen dalam meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- 3) Adanya koordinasi yang baik dan dukungan dari internal perangkat daerah;
- 4) Adanya koordinasi yang baik dari pimpinan daerah dan perangkat daerah terkait.

**23. Kecamatan Sukawangi**

- 1) Adanya peraturan yang mendukung pelaksanaan tugas;
- 2) Komitmen pimpinan dalam peningkatan kinerja perangkat daerah;
- 3) Adanya koordinasi yang baik dari pimpinan daerah dan perangkat daerah terkait;
- 4) Adanya dukungan yang baik dari seluruh internal perangkat daerah.

**B. Faktor Penghambat :**

1. Kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam melakukan pengukuran kinerja terhadap kebijakan dan program yang dilaksanakan. Jika ditinjau lebih mendalam, maka kelemahan tersebut terkait erat dengan permasalahan indikator kinerja. Perangkat daerah seringkali gagal dalam menentukan rumus perhitungan indikator kinerja program/kegiatan secara tepat;
2. Keterbatasan SDM personal dan sering berganti-ganti SDM yang mengampu perencanaan;



3. Masih didapati satuan indikator program (*outcome*) pada data evaluasi RKPD yang belum konsisten, dan untuk kemudahan penyusunan cenderung diambil pilihan untuk menggunakan satuan indikator kegiatan (*output*). Secara teknis kondisi tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi OPD untuk menyelesaikan daftar program dan kegiatan, meskipun secara substansi pada prakteknya menjadi kendala pada tahapan evaluasi kinerja teknis. Meskipun mekanisme pelaporan telah menerapkan aturan yang mewajibkan perangkat daerah menggunakan aplikasi SIMPPD, namun masih terjadi pelaporan yang secara substansi belum tepat, baik teknis maupun keuangan;
  4. Perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perubahan anggaran biaya pelaksanaan program dan kegiatan;
  5. Manajemen penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Bekasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi yang menerapkan teknologi sistem informasi yang belum terintegrasi;
  6. Belum tersedia kajian khusus yang dapat diterapkan/dioperasionalkan dalam waktu dekat, khususnya yang ditujukan untuk upaya pengembangan berbagai potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Bekasi, antara lain kajian pengembangan sektor ekonomi kreatif, sektor pariwisata, dan lain-lain;
- Faktor penghambat capaian kinerja yang dari perangkat daerah terkait dengan pelaksanaan perencanaan Pembangunan Kabupaten Bekasi, antara lain:

#### **1. Dinas Lingkungan Hidup**

- 1) Pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tidak diimbangi dengan peningkatan kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup;
- 2) Masyarakat Kabupaten Bekasi yang heterogen memiliki sikap yang kurang peduli terhadap lingkungan;
- 3) Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan yang menyebabkan rendahnya akses dan ketersediaan sumber daya untuk pengelolaan lingkungan hidup;
- 4) Kurangnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara berbagai instansi terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- 5) Kurangnya kompetensi personil (SDM) yang menangani pencemaran dan kerusakan lingkungan serta penanganan persampahan;
- 6) Terbatasnya pendanaan dan alokasi anggaran dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta kurangnya mekanisme insentif dan disinsentif yang efektif;



- 7) Kondisi meteorologi dan cuaca ekstrim yang berdampak;
- 8) Jumlah sarana prasarana yang ada belum dapat memenuhi target pelayanan;
- 9) Dalam menjalankan program pengelolaan sampah Kabupaten Bekasi belum memiliki Perda sampah yang mengatur secara keseluruhan pengolahan sampah di Kabupaten Bekasi, dimana Perda adalah kebijakan regulasi yang akan menaungi beberapa peraturan pendukung di bawahnya;
- 10) Dalam menjalankan program pengelolaan sampah Kabupaten Bekasi, dalam penganggaran program Pengelolaan Sampah belum masuk menjadi prioritas, range anggaran masih 1-2% total APBD idealnya adalah 3%-5%;
- 11) Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat dan ramah lingkungan;
- 12) Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
- 13) Masih kurangnya kebijakan terkait pengelolaan lingkungan; dan
- 14) Masih kurangnya kebijakan terkait pemenuhan Ruang Terbuka Hijau, Rehabilitasi Lingkungan Hidup dan perlindungan terhadap kawasan lindung dan kawasan dengan jasa ekosistem tinggi.

## **2. Dinas Pemadam Kebakaran**

- 1) Jauhnya lokasi kejadian kebakaran dari Pos Pelayanan Pemadam Kebakaran yang pada sampai saat ini baru beroperasi 7 Pos Pemadam Kebakaran selain dari kantor Pemadam Kebakaran;
- 2) Traffic Line yang sulit dikendalikan; dan
- 3) Kecilnya jalan-jalan yang dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran.

## **3. Dinas Perikanan**

- 1) Sarana prasarana dan teknologi budidaya perikanan dan pengolahan hasil perikanan yang belum memadai sehingga produksi yang dihasilkan belum dapat optimal;
- 2) Belum optimalnya pemberdayaan sumberdaya perikanan, berkelanjutan, berbudaya industri dan berwawasan lingkungan.

## **4. Dinas Pertanian**

- 1) Wilayah kerja Kabupaten Bekasi yang luas, kurangnya sumber daya manusia pada bidang keswan dan kesmavet dalam melakukan



- pengawasan serta kurangnya kesadaran pet shop dan poultry shop dalam menjual obat hewan yang tidak berizin;
- 2) Faktor eksternal(Faktor alam) adanya panas yang sangat ekstrim /El Nino terhadap komoditas hortikultura menyebabkan penurunan produksi;
  - 3) El nino yg berkepanjangan sehingga petani bnyk mengalami gagal tanam pertanaman yg tdk tepat waktu karena bencana kekeringan dan belum adanya jaminan ketersediaan lahan (LP2B);
  - 4) Kurang kesadaran peternak dlm mengembangkan teknologi budidaya ternakdan merebaknya penyakit pada ternak ( PMK, LSD dll);
  - 5) Kurangnya sarana pendukung untuk penanganan/pengolahan pasca panen hortikultura;
  - 6) Masih kurangnya kesadaran peternak akan manfaat dan keuntungan sapi yang di IB;
  - 7) Cuaca yang tidak dapat diprediksi membuat petani telat mengantisipasi datangnya bencana banjir (*La Nina*) dan kekeringan (*El-Nino*), kerusakan saluran sekunder, diwilayah utara, sampah dan sedimentasi saluran sekunder serta bangunan liar (Bangli) diatas saluran sekunder di Wilayah Utara;
  - 8) Perubahan waktu tanam yang terjadi akibat cuaca ekstrim dapat mendukung perkembangan OPT antara lain tikus, wereng batang coklat (WBC), penggerek batang padi (PBP), tungro dan Bacterial Leaf Blight (BLB), serta kerdil rumput/kerdil hampa;
  - 9) Luas wilayah kerja , kurangnya sumber daya manusia pada bidang keswan dan kesmavet dalam melakukan pengawasan, kurangnya kesadaran dokter hewan praktek mandiri untuk membuat surat izin praktek dan lamanya proses administrasi dari organisas profesi PDHI; dan
  - 10) Masih rendahnya penanganan pasca panen di tingkat petani yang menyebabkan masih tingginya tingkat susut hasil (losses).

## 5. Dinas Sosial

- 1) Keterbatasan Sumber Daya  
Keterbatasan anggaran, personel, dan teknologi dapat menghambat kelancaran pelaksanaan evaluasi serta pengumpulan data yang diperlukan;
- 2) Perubahan Kondisi Sosial yang Cepat



Adanya perubahan sosial yang cepat dan tidak terduga dapat membuat Renja menjadi kurang responsif terhadap kebutuhan aktual;

3) **Tingkat Kompleksitas Program**

Program-program sosial yang kompleks atau terlalu rumit dapat menghambat evaluasi yang efektif dan menyulitkan pemahaman terhadap dampak yang sebenarnya;

4) **Kurangnya Data yang Akurat**

Keterbatasan data yang akurat dan terkini dapat menghambat analisis yang mendalam dan memberikan gambaran yang tepat tentang kinerja program.

## **6. Dinas Kesehatan**

- 1) Belum maksimalnya peran kader kesehatan masyarakat khususnya pada pelayanan kesehatan ibu hamil sehingga masih memungkinkan adanya ibu hamil yang tidak terpantau kesehatannya, terdapat ibu hamil yang bersalin bukan di fasilitas kesehatan, kurangnya kesadaran ibu balita tentang pentingnya memeriksakan balita di posyandu, kurangnya fasilitas rujukan yang mempunyai NICU untuk menangani kasus Neonatal, dan masih tingginya jumlah penderita penyakit-penyakit penyebab kematian seperti Tuberkulosis (TB) dan Hipertensi;
- 2) Belum adanya kebijakan pemerintah daerah untuk upaya penurunan AKB;
- 3) Capaian pelayanan skrining kesehatan pada usia lanjut yang masih rendah;
- 4) Tidak semua balita gizi buruk mendapat PMT dikarenakan terbatasnya anggaran;
- 5) Lintas Sektor yang masih kurang berpartisipasi untuk Pendeklarasian ODF, Perilaku masyarakat yang belum mau ada perubahan untuk Stop BABS, serta ekonomi masyarakat yang belum mencukupi untuk pembuatan Jamban/WC;
- 6) Tidak semua masyarakat dapat hadir pada pembinaan sarana air minum tersebut dikarenakan terbatasnya anggaran.

## **7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan program dan kegiatan tidak menemukan penghambat yang signifikan hanya saja ada perbedaan rencana awal dengan kondisi dilapangan.



## 8. Dinas Perhubungan

- 1) Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik yang dilakukan dengan pihak pelaksana maupun instansi terkait, sehingga bila dipaksakan kegiatannya tidak bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- 2) Masih minimnya jumlah pegawai dinas perhubungan yang telah memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa;
- 3) Sertifikasi/rekomendasi pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh Kementerian perhubungan bagi Perusahaan yang ingin ikut dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas perhubungan menjadi kendala penyelenggaraan pelelangan; dan
- 4) Keterbatasan personal dalam Menyusun dokumen lelang, mengakibatkan keterlambatan dalam pembuatan dokumen.

## 9. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman dan Pertanahan

- 1) Terpenuhinya fasilitas, penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
- 2) Terdapat Korban Bencana Tidak Memiliki Lahan Pribadi;
- 3) Meningkatnya Ketersediaan Jalan Lingkungan Permukiman dan Perumahan dalam kondisi baik;
- 4) Terdapat perbedaan indikator antara DPA dengan Target Capaian. Bahwa Dokumen DPA satuan jalan lingkungan menggunakan M2, sedangkan Target Capaian IKU menggunakan satuan panjang (Mtr).
- 5) Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan jalan
  - a. Lokasi yang akan dibebaskan belum lengkap proses administrasinya
  - b. DPPT (Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah) belum lengkap dari instansi pemohon
  - c. Alas Hak atas tanah yang akan dibebaskan belum lengkap
- 6) Meningkatnya akses Masyarakat terhadap Ketersediaan sanitasi  
Terdapat Desa yang sudah deklarasi Bebas ODF tetapi kondisi dilapangan masih terdapat OD.
- 7) Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum
  - a. Lokasi yang akan dibebaskan belum lengkap proses administrasinya
  - b. DPPT (Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah) belum lengkap dari instansi pemohon



- c. Alas Hak atas tanah yang akan dibebaskan belum lengkap
- 8) Meningkatnya luasan Kawasan kumuh yang tertangani
- 9) Tidak ada dukungan penangan 7 Indikator Kawasan Kumuh sebagaimana Peraturan Bupati Bekasi nomor 72 tahun 2020 Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Program Berseka (Bersih, Sehat dan Berkah)

#### **10. Dinas Pendidikan**

- 1) Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan;
- 2) Terbatasnya ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah dan berdampak pada belum terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana di bidang Perhubungan serta tidak mencukupinya biaya operasional kegiatan;
- 3) Masih terbatasnya tenaga teknis yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya.

#### **11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- 1) Masih kurangnya Koordinasi dengan Satgas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 2) Masih kurangnya SDM para kader/peserta sekoper cinta
- 3) Kurangnya sinergitas serta kesadaran dari warga dan masing-masing perangkat daerah di lokasi P2WKSS bahwa P2WKSS bukan hanya untuk menjadi juara saja tetapi juga untuk meningkatkan pembangunan Desa terutama dalam aspek ekonomi
- 4) Belum adanya aplikasi data terpadu tentang laporan korban kekerasan padaperempuan dan anak

#### **12. DPMPTSP**

- 1) Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan;
- 2) Terbatasnya ketersediaan anggaran yang berdampak pada belum terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana serta tidak mencukupinya biaya operasional kegiatan; dan
- 3) Masih terbatasnya tenaga teknis yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya.

#### **13. Satpol PP**

- 1) Beberapa pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan mengalami keterlambatan pada tahap awal pelaksanaan sehingga berdampak pada schedule tahapan pelaksanaan selanjutnya;



- 2) Perlunya percepatan administrasi penunjang pencairan anggaran agar proses pelaksanaan subkegiatan dapat tetap berjalan normal;
- 3) Faktor kemampuan belum menunjang atau menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi. Karena aparat Satpol PP untuk anggota memiliki tingkat pendidikan SLTA dan bahkan ada yang memiliki tingkat pendidikan SMP dan SD dan belum maksimal dalam mengikuti pelatihan-pelatihan teknis penunjang yang berhubungan dengan tugas pokok yang diembannya;
- 4) Faktor sarana dan prasarana belum menunjang atau menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi. Karena sarana dan prasarana kurang menunjang pelaksanaan tugas, seperti kendaraan operasional lapangan yang digunakan masih sangat terbatas, demikian juga dengan fasilitas lainnya seperti komputer, printer, meja biro, kursi pejabat struktural dan kursi pegawai masih kurang;
- 5) Faktor Sumber Daya Manusia yang belum memadai, untuk Pegawai Negeri Sipil di Satuan Polisi Pamong Praja belum memadai dengan jumlah yang hanya 65 orang PNS.

#### **14. Dinas Perdagangan**

- 1) Tidak stabilnya kondisi politik dunia misalnya adanya perang Ukraina dan Rusia, Israel dan Palestina yang menyebabkan terganggunya rantai dagang internasional termasuk ekspor dari Indonesia;
- 2) Fluktuasi ekonomi; dan
- 3) Tidak ada lagi kegiatan pameran yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota

#### **15. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah**

- 1) Implementasi diseminasi hasil kajian yang tidak menjadi dasar kebijakan yang berbasis hasil penelitian dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh Perangkat Daerah mitra kerja Balitbangda;
- 2) Partisipasi Stakeholders (Perangkat Daerah, Kecamatan, Puskesmas, Desa, Universitas dan Sekolah) berkomitmen dalam pengembangan inovasi daerah;
- 3) Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi pengembangan inovasi daerah kepada Stakeholder secara berkala dan sistematis.

#### **16. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang**

- 1) Perlu penyesuaian antara substansi revisi RTRW Kab. Bekasi dengan RTRW Prov Jawa Barat yang membutuhkan tahapan dan waktu sampai



sesuai, Adatahapan berikutnya yang harus di tempuh untuk proses revisi RTRW Kabupaten Bekasi yaitu permohonan persetujuan substansi dan pembahasan lintas sektor kementerian / lembaga dan pembahasan Ranperkada dengan DPRD Kabupaten;

- 2) Masa berlaku sumber data penyusunan peta maksimal 2 tahun (Peningkatan Peran Serta Masyarakat);
- 3) Belum diketahui pengaruh / impact sosialisasi terhadap kesadaran masyarakat terhadap tata ruang;
- 4) Sistem OSS RBA dan GISTARU yang baru sehingga masih banyak pemohon yang belum memahami proses di ke -2 sistem tersebut. Hal ini mengakibatkan proses validasi yang lama karena membutuhkan klarifikasi dari pemohon;
- 5) Banyak pelaku usaha yang mengajukan permohonan rekomendasi Pemanfaatan Ruang Blok Plan yang belum memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sehingga proses pengesahan blok plan menjadi lama;
- 6) Kurangnya pemahaman pemilik bangunan bahwa untuk memanfaatkan bangunan harus memiliki SLF;
- 7) Kurangnya pemahaman pemilik bangunan bahwa sebelum membangun harus memiliki PBG.

## **17. Dinas Arsip dan Perpustakaan**

### **A. Urusan Perpustakaan**

1. Masih terbatasnya pengadaan buku-buku dan kurangnya sarana dan prasarana penunjang sehingga pada pelaksanaan kegiatan kurang berjalan optimal;
2. Secara umum penghambat peningkatan kunjungan terbagi menjadi dua faktor yaitu keterbatasan anggaran yang mengakibatkan tidak dapat terakomodasinya permintaan layanan perpustakaan keliling dari masyarakat selama 1 tahun berjalan; dan
3. Belum terjangkaunya data terkait perpustakaan yang dikelola oleh lembaga atau instansi baik negeri maupun swasta di Kabupaten Bekasi.

### **B. Urusan Kearsipan**

1. Anggaran kurang memadai;



2. Terbatasnya sumber daya manusia kearsipan yang dimiliki oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengolahan arsip di Kabupaten Bekasi;
3. Dalam hal Pembinaan dan Pengawasan Arsip Dinamis kepada Perangkat Daerah, masih terdapat kendala berupa kurangnya Sumber Daya Manusia (Pengelola Arsip) dan Sarana dan prasarana pengelolaan arsip dinamis di Perangkat Daerah; dan
4. Pemahaman terkait kearsipan yang masih kurang dikalangan Pegawai Pemerintahan Kabupaten Bekasi.

#### **18. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

1. Kondisi Sistem Merit Kabupaten Bekasi yang masih Predikat Baik;
2. Belum optimalnya Penerapan reward dan punishment terhadap kinerja dan disiplin;
3. Belum optimalnya Sistem penilaian kinerja;
4. Upaya pembinaan aparatur belum optimal;
5. Masih kurangnya kesadaran ASN untuk mengembangkan kompetensinya;
6. Pengembangan kompetensi manajerial, teknis dan fungsional belum optimal; dan
7. Masih kurangnya sumber daya aparatur yang memiliki kualifikasi teknis tertentu.

#### **19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

- 1) Kurangnya jumlah SDM (sumber daya Manusia) dalam penanganan bencana;
- 2) Kurangnya koordinasi dalam unsur pentahelik;
- 3) Belum maksimalnya diimplementasikan regulasi yang dibuat; dan
- 4) Masih belum maksimalnya kegiatan yang berbasis digitalisasi/aplikasi.

#### **20. Sekretariat DPRD**

- 1) Masih terbatasnya tenaga teknis yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
- 2) Ketidakpastian jadwal pelaksanaan kegiatan DPRD;
- 3) Keterbatasan tenaga ahli atau pakar dalam penyusunan perundang-undangan;
- 4) Tingginya kegiatan anggota dan pimpinan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai badan legislatif sehingga diperlukan pendampingan secara intensif dengan para anggota dan pimpinan perwakilan rakyat dalam melakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan; dan



- 5) Tidak adanya usulan Perda inisiatif dari masing-masing komisi dan terjadinya ketidakpahaman terhadap tugas, pokok, dan fungsi serta kebijakan yang belum optimal sehingga berdampak pada pembiasaan tanggungjawab.

#### **21. Kecamatan Babelan**

- 1) Kualitas Sumber Daya Aparatur yang masih rendah dan belum sesuai dengan beban tugas;
- 2) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan; dan
- 3) Kuantitas Sumber Daya Aparatur pelayanan publik yang belum memadai.

#### **22. Kecamatan Cikarang Barat**

- 1) Samarnya tujuan dan kebijakan dari perangkat daerah;
- 2) Kurangnya dukungan dari para penerima kebijakan;
- 3) Adanya ketidakselarasan waktu dalam program dan kegiatan yang direncanakan dengan pelaksanaannya; dan
- 4) Adanya sumber daya manusia yang kurang memadai.

#### **23. Kecamatan Sukawangi**

- 1) Samarnya tujuan dan kebijakan dari perangkat daerah;
- 2) Kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu;
- 3) Kurangnya dukungan dari para penerima kebijakan; dan
- 4) Kurangnya pengembangan sumber daya yang ada.

### **4.2 TINDAK LANJUT BAGI PELAKSANAAN RKPD BERIKUTNYA**

Berdasarkan dari pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan IV tahun 2024, beberapa tindak lanjut yang disarankan untuk dilaksanakan pada RKPD berikutnya adalah sebagai berikut :

1. Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026, dipandang perlu untuk menyelaraskan kembali cakupan program berikut target dan indikator capaian program (*outcome*) dengan sasaran misi yang ditetapkan dalam RPD (target dan indikator capaian sasaran misi) sebagai pedoman bagi PD dalam menyelaraskan indikator dan target capaian kinerja program dan kegiatan dalam Renstra/Renja-nya;
2. Perbedaan penerapan indikator (*outcome*) pada program yang mempunyai cakupan kegiatan (dan sub kegiatan) yang sama masih menjadi kendala dalam proses identifikasi dan evaluasi capaian kinerja program yang bersangkutan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa evaluasi Renstra/Renja oleh masing-masing



perangkat daerah dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki/melengkapi data-data yang belum sesuai. Evaluasi tersebut juga diharapkan dapat mendorong terlaksananya koordinasi dan sinergitas antar perangkat daerah dalam rangka memaksimalkan capaian kinerja pelaksanaan programnya;

3. Konsistensi perencanaan dan penganggaran program RPD ke dalam RKPD dan penjabarannya melalui APBD diharapkan dapat terjaga, untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu sekaligus sebagai acuan dalam perencanaan pada periode pembangunan berikutnya;
4. Mengkaji kembali keselarasan program prioritas maupun program rutin PD termasuk ketersediaan anggarannya dalam upaya mendukung percepatan pencapaian target kinerja sasaran RPD 2023-2026, baik pada tahun berjalan (2024) maupun untuk menunjang penyusunan rencana pada tahun terakhir (2026);
5. Merumuskan perencanaan Anggaran Kas yang terstruktur besarannya di Triwulan I s.d Triwulan IV sehingga proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan besar dapat diselesaikan di Triwulan IV;
6. Merumuskan suatu inovasi atau terobosan baru dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Bekasi demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di Kabupaten Bekasi di segala bidang;
7. Meningkatkan koordinasi antara pimpinan dan bawahan dalam melaksanakan perencanaan kegiatan yang lebih matang;
8. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan yang lebih ketat dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bekasi agar pembangunan yang di tuju tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat;
9. Merumuskan strategi-strategi pembiayaan dan pendanaan pembangunan sesuai aturan berlaku, yang bisa melibatkan sektor swasta / perusahaan untuk bersama-sama melaksanakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi;
10. Tindak lanjut koordinasi secara intensif kepada perangkat daerah dalam penyusunan program dan kegiatan yang berdasarkan diseminasi hasil kajian etiap kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif maka Masyarakat;
11. Implementasi hasil kegiatan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periodemendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan; dan
12. Mempersiapkan perencanaan keberlanjutan untuk memastikan bahwa keberhasilan yang dicapai dapat dipertahankan dalam jangka panjang.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Selama pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Triwulan IV Tahun anggaran 2024, berdasarkan agregat rerata capaian kinerja pelaksanaan program seluruh perangkat daerah sampai dengan akhir Triwulan IV/2024, hasil evaluasi secara umum menunjukkan **rerata capaian kinerja fisik "sangat tinggi" (93,26%) dan rerata kinerja penyerapan anggaran "sangat tinggi" (90,74%)**.

Berdasarkan kondisi diatas dapat diketahui bahwa rerata capaian kinerja fisik lebih tinggi dari capaian kinerja penyerapan anggaran dimana capaian fisik lebih tinggi sebesar 1,47% dari capaian kinerja penyerapan anggaran. Capaian kinerja fisik dan penyerapan anggaran tersebut mengalami kenaikan pesat pada Triwulan IV jika dibandingkan pada triwulan sebelumnya. Hal ini disebabkan karena banyaknya kegiatan pada masing-masing perangkat daerah yang masih dalam proses pada triwulan sebelumnya telah selesai dilaksanakan.

#### **5.2 REKOMENDASI**

Rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD berikutnya kiranya diharapkan dapat ditindaklanjuti dalam cakupan memaksimalkan upaya dalam rangka pencapaian target sesuai indikator yang ditetapkan maupun dalam cakupan perencanaan pembangunan, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Selanjutnya terdapat beberapa rekomendasi untuk penyusunan RKPD periode selanjutnya, antara lain:

1. Optimalisasi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan rencana pembangunan daerah (RKPD) untuk menjamin bahwa kebijakan perencanaan pembangunan daerah (RKPD) yang disusun telah melalui tahapan sesuai ketentuan dan berpedoman/mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi, sehingga dokumen perencanaan merupakan satu kesatuan sistem rencana pembangunan yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya;
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pelaksana kegiatan, perencanaan program dan kegiatan agar lebih akurat dan pendanaan yang tepat, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan oleh perangkat daerah secara berkesinambungan, pembinaan kepada pegawai, serta perlu dilakukan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengejar keterlambatan pencapaian target pada pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran selanjutnya;



3. Menyelaraskan program prioritas maupun program PD termasuk ketersediaan anggarannya untuk mendukung percepatan pencapaian target kinerja sasaran RPD 2023-2026;
4. Optimalisasi pengelolaan data-data pembangunan yang didukung dengan pengembangan prasarana dan sarana pendukungnya, baik dalam cakupan internal Pemerintah Kabupaten Bekasi maupun eksternal (SIPD, Satu Data, dll);
5. Optimalisasi koordinasi dan konsultasi lintas Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan, khususnya dalam menjabarkan arah kebijakan umum yang harus diterjemahkan oleh PD ke dalam Renstra/Renja PD, untuk menunjang pencapaian target kinerja sasaran RPD 2023-2026;
6. Menyusun timeline pelaksanaan kegiatan atau ketepatan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas sehingga capaian realisasi fisik dan keuangan dan tercapai sesuai dengan target.

